

**PENGARUH SIKAP, MOTIVASI
DAN STATUS SOSIAL TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KABUPATEN PATI JAWA TENGAH**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2

**Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Konsentrasi Magister Administrasi Publik**



Diajukan Oleh

**Nama : RAHMAD AGUNG NUGRAHA
NIM : D4E000053**

**Kepada
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002**

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL TESIS

**PENGARUH SIKAP, MOTIVASI
DAN STATUS SOSIAL TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KABUPATEN PATI JAWA TENGAH**

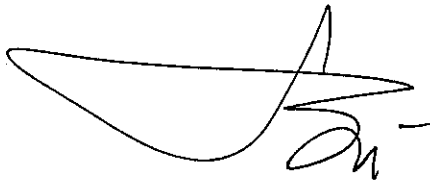
NAMA PENULIS : RAHMAD AGUNG NUGRAHA

NIM : D4E000053

Tesis telah di setujui :

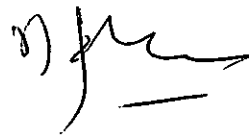
Tanggal :

Pembimbing I



(Drs. Ali Mufiz, MPA)

Pembimbing II



(Dra. Dyah Hariani, MM)

**PENGARUH SIKAP, MOTIVASI
DAN STATUS SOSIAL TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KABUPATEN PATI
JAWA TENGAH**

Dipersiapkan dan Disusun oleh
RAHMAD AGUNG NUGRAHA

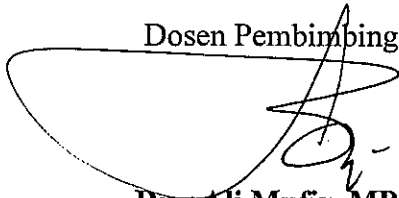
D4E000053

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal :

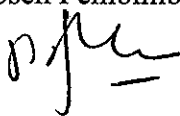
Susunan Tim Penguji

Dosen Pembimbing I



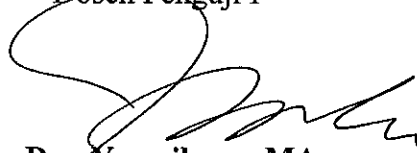
Drs. Ali Mufiz, MPA

Dosen Pembimbing II



Dra. Dyah Hariani, MM

Dosen Penguji I



Drs. Yusmilarso, MA

Dosen Penguji II



Drs. Zaenal Hidayat, MA

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister Sain

Tanggal :

Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik

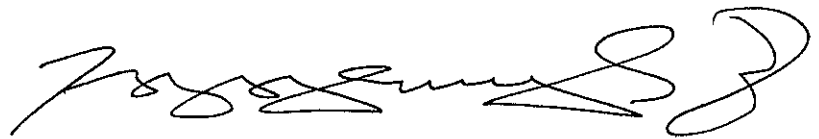


Drs. Warella MPA, PhD

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Semarang, 2 April, 2001

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rahmad Agung Nugraha', with a stylized, flowing script.

RAHMAD AGUNG NUGRAHA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada :

❖ **Ibunda yang tercinta :**

Hj. Oemi Syarifah Soetedjo

❖ **Ayahanda yang terhormat :**

Drs. H. Soetedjo

❖ **Kakak – kakakku dan adikku, serta**

❖ **Especially for My Honey**

MOTTO

**Allah Akan Meninggikan Orang Yang Beriman Diantaramu dan
Orang-orang yang diberi Ilmu pengetahuan Beberapa Derajat
(Al – Mujaadilah : 11)**

Ilmu Iku

Kalakone Kanthi Laku

Lekase Lawan Kas

Tegese Kas Nyantosani

Sedya Budya

Pangekesing

Dur Angkara

(KGPAA Mangkunegara IV)

TEMEN : TEMENAN : TINEMU

TEMEN : Ditata Kanthi Titi

TEMENAN : Tatag, Tanggon, Tangguh

TINEMU : Tatas, Titis, Tutug Kanthi Sempurno

(SUNAN KALIJAGA)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke-Hadirat Illahi Robbi, karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyusun serta menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengaruh Sikap, Motivasi dan Status Sosial Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Pati Jawa Tengah”.

Dalam penyusunan tesis ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs, Warella MPA.,PhD selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Drs. Ali Mufiz, MPA selaku Dosen Pembimbing I yang penuh kesabaran dan pengertian, membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis dari awal sampai akhir.
3. Ibu Dra. Dyah Hariani, MM selaku Dosen Pembimbing II yang berkenan memberikan dorongan dan petunjuk yang penulis butuhkan sehingga dapat terselesaikannya tesis ini.
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pati beserta para pegawai yang membantu memberikan data-data informasi kepada penulis.
5. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kabupaten Pati beserta para pegawai yang membantu memberikan data-data yang penulis butuhkan.

6. Bapak Kepala Desa Kutoarjo, Bapak Kepala Kelurahan Pati Kidul Kecamatan Pati Kota, Bapak Kepala Desa Bulumanis Kidul dan Bapak Kepala Desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yang berkenan memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
7. Aparat Desa Kutoarjo, Pati Kidul, Bulumanis Kidul dan Pohijo yang telah membantu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis.
8. Masyarakat Desa Kutoarjo, Pati Kidul, Bulumanis Kidul dan Pohijo yang telah bersedia menjadi sampel/responden dalam penelitian ini.
9. Ayah dan Ibu tercinta yang telah membesarkan dan mendidik serta selalu senantiasa memberikan nasehat, doa, sarana/fasilitas yang penulis butuhkan sehingga dapat terselesaikannya tesis ini.
10. Dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif sehingga dapat dijadikan perbaikan bagi penulis dalam penyusunan karya selanjutnya. Semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Semarang, 2 April 2002

Penulis

Rahmad Agung Nugraha

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xv
RINGKASAN	xvi
ABSTRACTION	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan teori.....	11
B. Hipotesis.....	60
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Rancangan Penelitian.....	61
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	61
C. Lokasi Penelitian	61
D. Variabel Penelitian.....	62
D.1 Klasifikasi Variabel	62
D.2 Definisi Konseptual.....	63
D.3 Definisi Operasional.....	63
E. Jenis dan Sumber Data.....	66
F. Instrumen Penelitian.....	66

	F.1 Kuesioner (Daftar Pertanyaan).....	66
	F.1.1 Validitas.....	67
	F.1.2 Reliabilitas.....	71
	F.2 Observasi.....	75
	F.3 Interview (Wawancara).....	75
	G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	76
	H. Teknik Pengolahan Data.....	79
	I. Teknik Analisa Data.....	80
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN	
	PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
	A. Tinjauan Umum Kabupaten Pati.....	85
	B. Hasil Penelitian Dalam Tabel Tunggal	94
	C. Analisis Hasil Penelitian.....	146
	D. Diskusi.....	161
BAB	: KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan.....	171
	B. Saran.....	174
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kabupaten Pati.....	7
Tabel II.1 Batas Tingkat Pengeluaran (Garis Kemiskinan) Untuk Penduduk Perkotaan dan Penduduk Pedesaan Menurut Garis Kemiskinan.....	43
Tabel II.2 Batas Tingkat Pendapatan Untuk Penduduk Perkotaan Dan Penduduk Pedesaan Menurut Garis Pengeluaran Setara Beras.....	45
Tabel III.1 Besarnya Sample Yang Diambil.....	79
Tabel IV.1 Angka Kelahiran dan Kematian Penduduk Kabupaten Pati.....	88
Tabel IV.2 Batasan Tentang Penggolongan Angka Kelahiran Dan Kematian.....	89
Tabel IV.3 Jumlah Penduduk, Sex Ratio dan Pertumbuhan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 1995-2000.....	90
Tabel IV.4 Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang PBB.....	94
Tabel IV.5 Tingkat Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar PBB.....	96
Tabel IV.6 Tingkat Kerelaan Mengeluarkan Khusus Untuk Membayar PBB.....	97
Tabel IV.7 Tingkat Keterlambatan Masyarakat Sesudah Jatuh Tanggal Tempo Dalam Membayar PBB.....	99

Tabel IV.8	Tingkat Ketepatan Waktu Sebelum Jatuh Tanggal Tempo Dalam Membayar PBB.....	99
Tabel IV.9	Tingkat Pelanggaran Perpajakan.....	100
Tabel IV.10	Data Keseluruhan Variabel Partisipasi Masyarakat.....	102
Tabel IV.11	Klasifikasi Skor Berdasarkan Nilai Terendah dan Nilai Tertinggi Variabel Partisipasi Masyarakat.....	106
Tabel IV.12	Rekapitulasi Data Variabel Partisipasi Masyarakat.....	106
Tabel IV.13	Pendapat Masyarakat Terhadap Pemungutan PBB.....	108
Tabel IV.14	Tingkat Kemudahan Masyarakat Memahami Prosedur Pembayaran PBB.....	109
Tabel IV.15	Tingkat Persetujuan Masyarakat Terhadap Tata Cara Pemungutan PBB Oleh Pemerintah.....	109
Tabel IV.16	Tingkat Pemahaman / Pentingnya Pemungutan PBB Yang Dilakukan Pemerintah.....	110
Tabel IV.17	Tingkat Kepercayaan/Keyakinan Masyarakat Terhadap Pencapaian Tujuan Pemungutan PBB Oleh Pemerintah.....	111
Tabel IV.18	Tingkat Keyakinan Masyarakat Terhadap Tentang UU PBB Yang Dapat Memberikan Kepastian Hukum.....	112
Tabel IV.19	Tingkat Merasakan Keuntungan Atas Pemungutan PBB.....	112
Tabel IV.20	Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Hasil Pembangunan Dari Pemungutan Pajak.....	113
Tabel IV.21	Ada/Tidaknya Perasaan Bahwa Pemungutan PBB Membebani Masyarakat.....	114

Tabel IV.22	Tingkat Keadilan Yang Dirasakan Atas Pemungutan PBB.....	115
Tabel IV.23	Ada/Tidaknya Usaha Masyarakat Untuk Mengetahui Informasi Tentang Tata Cara Perpajakan.....	115
Tabel IV.24	Tingkat Keinginan Masyarakat Akan Perubahan Tata Cara Pembayaran PBB.....	116
Tabel IV.25	Data Keseluruhan Variabel Sikap.....	117
Tabel IV.26	Klasifikasi Skor Berdasarkan Nilai Terendah dan Nilai Tertinggi Variabel Sikap.....	120
Tabel IV.27	Rekapitulasi Data Variabel Sikap.....	121
Tabel IV.28	Dorongan Masyarakat Untuk Membayar PBB.....	123
Tabel IV.29	Tingkat Kebutuhan dan Harapan Membayar PBB.....	124
Tabel IV.30	Tingkat Dorongan/Keinginan Self Assesment Masyarakat..	125
Tabel IV.31	Tingkat Dorongan / Keinginan Akan Kemudahan Pelayanan Pembayaran PBB.....	125
Tabel IV.32	Tingkat Keaktifan Pemda Setempat Dalam Memberikan Sanksi Pelanggar UU PBB.....	127
Tabel IV.33	Data Keseluruhan Variabel Motivasi	129
Tabel IV.34	Klasifikasi Skor Berdasarkan Nilai Terendah dan Nilai Tertinggi Variabel Motivasi.....	131
Tabel IV.35	Rekapitulasi Data Variabel Motivasi.....	132
Tabel IV.36	Pekerjaan Tetap Responden.....	133
Tabel IV.37	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Pekerjaan Tetap.....	134

Tabel IV.38	Besar Pendapatan Dari Pekerjaan Pokok Responden.....	134
Tabel IV.39	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Hidup Sehari-hari Dari Pendapatan Pokok.....	135
Tabel IV.40	Besar Pendapatan Sampingan Responden.....	135
Tabel IV.41	Tingkat Pemenuhan Hidup Sehari-hari Dari Pendapatan Sampingan.....	136
Tabel IV.42	Besar Pengeluaran Keluarga Per Bulan.....	136
Tabel IV.43	Tingkat Pendidikan Responden.....	137
Tabel IV.44	Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dengan Partisipasi Masyarakat.....	138
Tabel IV.45	Hubungan Antara Pekerjaan Tetap Dengan Partisipasi Masyarakat.....	139
Tabel IV.46	Hubungan Antara Responden Yang Memiliki Pekerjaan Sampingan Dengan Partisipasi Masyarakat.....	140
Tabel IV.47	Data Keseluruhan Variabel Status Sosial.....	142
Tabel IV.48	Klasifikasi Skor Berdasarkan Nilai Terendah dan Nilai Tertinggi Variabel Status Sosial.....	144
Tabel IV.49	Rekapitulasi Data Variabel Status Sosial.....	145
Tabel IV.50	Hubungan Antara Sikap dan Partisipasi Masyarakat.....	147
Tabel IV.51	Hubungan Antara Motivasi dan Partisipasi Masyarakat.....	151
Tabel IV.52	Hubungan Antara Status Sosial dan Partisipasi Masyarakat...	155

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kabupaten Pati
Lampiran II	Perhitungan Validitas dan Reliabilitas
Lampiran III	Klasifikasi Skor Variabel dan Tabel Silang
Lampiran IV	Uji Koefisien Korelasi Rank Kendall dan Uji Konkordasi Kendall

RINGKASAN

Dalam menerima kebijaksanaan yang telah dikeluarkan pemerintah yaitu UU No. 12 tahun 1985 masyarakat dituntut untuk memahami, menghayati, dan melaksanakannya sebagaimana diharapkan sehingga diperlukan partisipasi dari masyarakat. Dalam berpartisipasi sangat ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya sikap, motivasi dan status sosial. Sehingga penelitian ini berjudul pengaruh Sikap, Motivasi dan Status Sosial Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar PBB

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara sikap, motivasi dan status sosial dengan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 80 sampel, sedangkan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif.

Dari analisis data yang dilakukan, ternyata ada hubungan yang positif antara sikap dan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB, dimana diperoleh koefisien korelasi Rank Kendall sebesar 0,534 dengan P value 0,000 serta ada hubungan yang positif antara motivasi dan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB dimana diperoleh koefisien korelasi Rank Kendall sebesar 0,492 dengan P value 0,000, dan ada hubungan positif antara status sosial dengan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB dimana diperoleh koefisien korelasi Rank Kendall sebesar 0,799 dengan P value 0,000. Sehingga hipotesis yang diajukan diterima pada taraf signifikansi 1% dan 5%

Kata kunci : Sikap, Motivasi, Status sosial, Signifikan

ABSTRACTION

The execution of government policy, UU No. 12/1985, requires the public to acknowledge, understand, and implement the policy as what it supposed to be. Therefore participation of the public is crucial. There are several factors that should be considered in participating such as attitude, motivation, and social status. Based on the above mentioned the title of this research is the influence of attitude, motivation and social status toward public participation in paying Land and Property Taxes.

This research aimed to reveal the relation between attitude, motivation, and social status as independent variable and public participation in paying Land and Property Taxes as dependent variable. Samples for this research are 80 samples and data analysis performed in both quantitative and qualitative.

From data analysis its revealed that there is a positive relation between attitude and public participation in paying Land and Property Taxes that is showed from Rank Kendall correlation coefficient of 0,534 and p value of 0,000. Other positive relation are also found between motivation and public participation in paying Land and Property Taxes, by Rank Kendall correlation coefficient of 0,492 and p value of 0,000, and between social status and public participation in paying Land and Property Taxes, by Rank Kendall correlation coefficient of 0,799 and p value of 0,000. Therefore it is firmmed that the hypotheses is accepted at significant rate of 1% and 5%.

Keywords : Attitude, Motivation, Social Status, and Significance.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang hasilnya dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah, yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada pembayarnya. Pemberian balas jasa dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk pemberian kepada seluruh masyarakat seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, pembangunan sarana-sarana umum masyarakat dan lain sebagainya.

Sesuai dengan pernyataan diatas, Zandjani (1992 : 1) memberikan definisi pajak adalah iuran negara yang dapat dipaksakan yang terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pajak adalah :

1. Pungutan oleh pemerintah kepada masyarakat.
2. Berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah tidak secara langsung memberikan balas jasa kepada pribadi pembayar pajak.

4. Pelaksanaannya dapat dipaksakan.

Dengan demikian, membayar pajak kepada negara merupakan suatu kewajiban dari masyarakat sebagai wajib pajak, sekaligus merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengerakkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan dilakukan melalui kebijaksanaan, peraturan, serta kegiatan pembangunan pemerintah yang diarahkan untuk menunjang, merangsang, dan membuka jalan bagi kegiatan pembangunan masyarakat.

Studi empiris banyak menunjukkan kegagalan pembangunan karena kurangnya partisipasi rakyat. Keadaan ini terjadi, antara lain karena :

1. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil dan tidak menguntungkan rakyat banyak, bahkan merugikan.
2. Pembangunan meskipun dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud itu.
3. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat, tetapi sejak semula rakyat tidak diikutsertakan (Kartasasmita, 1997 :56)

Oleh karena itu, menjadi tugas manajemen pembangunan untuk menjamin bahwa pembangunan :

1. Harus menguntungkan rakyat
2. Harus dipahami maksudnya oleh rakyat
3. Harus mengikutsertakan rakyat dalam pelaksanaannya

4. Dilaksanakan sesuai dengan maksudnya, secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan (Kartasasmita, 1997 :56-57)

Berbagai peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan telah dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, ternyata sistem perpajakan yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotongroyongan nasional maupun laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Juga belum dapat menggerakkan peranan dari semua lapisan subyek pajak yang besar peranannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Oleh karena itu pemerintah pada beberapa waktu yang lalu telah menciptakan sistem perpajakan yang baru, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Perpajakan yang baru, yang terdiri dari :

1. UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan
2. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
3. UU No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas barang mewah
4. Pajak kekayaan, IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) dan berbagai pajak yang berkaitan dengan pemilikan kebendaan diubah menjadi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 1985 (Zandjani, 1992 :113)

Adapun karakteristik dan prinsip dari sistem pemungutan pajak yang baru menurut Mardiasmo,(1994:1-2) adalah :

- a) **Pemungutan pajak merupakan perwujudan dan salah satu kewajiban kenegaraan dan pengabdian maupun peran serta warga negara dan anggota masyarakat atau wajib pajak untuk membiayai keperluan pemerintah dan pembangunan nasional.**
- b) **Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar, dan melapor sendiri pajak yang terhutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan mudah, tertib, dan terkendali.**
- c) **Tanggung jawab kewajiban pelaksanaan pajak berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparatur perpajakan (fiskus) sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan**

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pemungutan pajak yang baru ini fiskus memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada anggota masyarakat wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, jaminan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi masyarakat wajib pajak lebih diperhitungkan, sehingga dapat menumbuhkan peningkatan kesadaran dan tanggung jawab perpajakan di masyarakat.

Jadi, pengesahan UU No.12 Th. 1994 tentang perubahan atas UU No. 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri, agar pembangunan dapat terus dilanjutkan sehingga mencapai masyarakat sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu dengan melihat pentingnya pengesahan UU Perpajakan tersebut, kewajiban masyarakat untuk

berpartisipasi membayar pajak merupakan hal yang harus dilakukan oleh masyarakat.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi seseorang dalam partisipasi menurut Santosa Sastropetro (1986 :102), adalah :

1. Pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, kedudukan sosial dan percaya terhadap diri sendiri.
2. Penginterpretasian yang diangkat terhadap agama
3. Kesadaran untuk menyalahartikan motivasi, tujuan, dan kepentingan organisasi penduduk.
4. Tersedianya kesempatan kerja yang lebih baik di luar desa
5. Tidak tersedianya kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan.

Dalam memutuskan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam berpartisipasi, dibutuhkan adanya perilaku dari masyarakat itu sendiri. Setiap individu dalam berperilaku sangat ditentukan oleh faktor – faktor yang sangat kompleks diantaranya adalah faktor fisiologis seperti keadaan dan kemampuan fisik dan mental seseorang, faktor psikologis seperti persepsi, sikap, kepribadian, inteligensi, motivasi, belajar, serta faktor lingkungan seperti keluarga, kebudayaan, label yang melekat pada diri seseorang seperti status sosial, harga diri, tingkat pendidikan dan lain sebagainya.

Sesuai dengan pernyataan tersebut, Maramis (1998 : 61), mengatakan bahwa manusia sebagaimana ia berada pada sesuatu waktu dalam berperilaku merupakan hasil suatu interaksi antara badan (bio / somato), jiwa

(psiko) dan lingkungannya (sosio). Ketiga unsur ini saling mempengaruhi dan tidak boleh memisahkan unsur yang satu dari yang lain, akan tetapi harus memperhatikan serta mempertimbangkan ketiga-tiganya sebagai suatu keseluruhan.

- ❑ Unsur bio / somato : Keadaan badaniah atau jasmaniah
- ❑ Psiko : Kesadaran, afek dan emosi, psikomotor (conation), proses berpikir, pencerapan (persepsi), kepribadian, dan motivasi.
- ❑ Sosio : Lingkungan

Selain itu, dikemukakan variabel - variabel penentu seseorang dalam berperilaku, adalah sebagai berikut :

- a. Variabel fisiologis : Kemampuan fisik dan mental
- b. Variabel Psikologis : Persepsi, sikap, kepribadian, belajar dan watak
- c. Variabel lingkungan : Keluarga, kebudayaan, kelas sosial. (Gibson, 1989 :52).

Pada kenyataannya, partisipasi masyarakat di Kabupaten Pati, terutama kesadaran dalam membayar PBB, belum tinggi, karena dalam penerimaan target, realisasi PBB di Kabupaten Pati baru mencapai 90,62% untuk tahun 2001, .dari baku ketetapan tahun 2001 yang sebesar 5.049.314.013 (data tanggal 25 Januari 2002) dan realisasinya (realisasi dan denda) baru Rp 4.575.572.566 masih mengalami kekurangan sebesar Rp. 473.741.447 dan dalam penerimaan dari tahun sebelumnya, juga belum bisa mencapai 100% dari target yang ditargetkan oleh Kabupaten Pati.

Tabel 1.1
Target dan realisasi PBB
Kabupaten Pati

No	Tahun	Target penerimaan PBB	Realisasi Penerimaan PBB	(%)	Kekurangan penerimaan PBB
1	1999	3.571.743.553	3.465.367.509	97,02 %	107.227.886
2	2000	3.915.153.239	3.668.655.741	93,70 %	247.849.250
3	2001 tgl 31 Oktober (tanggal jatuh tempo)	5.080.431.010	4.239.914.689	83,46 %	841.646.739
4	2001 (bulan Jan. (2002)	5.080.431.010	4.575.572.566 realisasi + denda	90,62	473.741.447

Sumber : Pemerintah Kabupaten Pati
Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2001

Dan dari data di atas tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan PBB Kabupaten Pati dilihat prosentase, dari tahun 1999 ke tahun 2000 mengalami suatu penurunan. Demikian juga pada tahun 2001, dilihat dari data yang diambil pada tanggal jatuh tempo pembayaran PBB menunjukkan bahwa masih adanya masyarakat yang belum sadar sepenuhnya untuk segera melunasi PBB-nya, dan pembayarannya yang berlangsung sampai bulan Januari tahun 2002 ini, masih mengalami kekurangan 473.741.447 dari baku ketetapan tahun 2001 sebesar Rp.5.080.431.010

Dengan direplikasikannya SISTEP (Sistem Tempat Pembayaran) di berbagai pemerintah Kota/Kabupaten di Indonesia di harapkan terciptanya sistem pemungutan dan pembayaran PBB yang lebih baik serta meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya. Hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan SISTEP (Sistem Tempat Pembayaran) yaitu :

- ❑ Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak
- ❑ Penertiban administrasi
- ❑ Mempermudah pengawasan
- ❑ Mempermudah penerapan sanksi
- ❑ Meningkatkan kesadaran wajib pajak

Di dalam pokok-pokok ketentuan SISTEP juga ada kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar PBB-nya yang mana letak tempat pembayaran atau Bank Persepsi yang ditunjuk harus mudah dijangkau dan letaknya paling dekat dari tempat tinggal wajib pajak. Selain itu dalam melunasi PBBnya mereka bisa membayar langsung di Kantor Kelurahan masing-masing (secara kolektif) melalui petugas / staf kelurahan yang khusus menangani masalah PBB. Dari kemudahan-kemudahan yang ada ternyata masyarakat Pati juga belum menggunakan kemudahan tersebut. Selain itu, ternyata masih banyak masyarakat yang belum bisa menghitung besarnya PBBnya, mereka menerima saja apa yang tercantum dalam SPPT, antara lain karena mereka berpendidikan rendah dan kurang informasi akan masalah PBB.

Di lihat dari data tanggal jatuh tempo pembayaran tahun 2001, yang masih mengalami kekurangan sebesar 841.646.739 (83,46 %) dari target penerimaan PBB, data ini menunjukkan bahwa masih adanya masyarakat Pati yang belum sadar sepenuhnya untuk segera melunasi PBB-nya. Masyarakat yang belum atau tidak membayar PBB, antara lain karena merasa keberatan akan jumlah PBB yang dibebankan karena tingkat ekonomi

mereka yang tergolong rendah dan meningkatnya jumlah PBB setiap tahun, selain itu juga ada beberapa masyarakat yang tingkat ekonominya baik tetapi dalam pembayarannya selalu mengalami keterlambatan dan juga kebanyakan masyarakat mengabaikan bahwa rumah yang menjadi obyek pajak tersebut tak merasa ditempati atau kosong, lupa karena sibuk, atau hal-hal yang lain, bahkan ada wajib pajak yang tak membayar PBB-nya selama-bertahun-tahun tanpa alasan yang jelas dan belum ada tindakan yang serius.

Berdasarkan uraian dan permasalahan tersebut, maka perlu diteliti :
“ Pengaruh sikap, motivasi, dan status sosial terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati Jawa Tengah”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan kenyataan diatas, maka perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. “Adakah pengaruh sikap, motivasi, dan status sosial terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati Jawa Tengah”.
2. “Seberapa besar pengaruh sikap, motivasi, dan status sosial terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati Jawa Tengah.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

C.1 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hubungan sikap terhadap partisipasi masyarakat membayar PBB
2. Untuk mengetahui hubungan motivasi terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB
3. Untuk mengetahui hubungan status sosial terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB
4. Untuk mengetahui hubungan sikap, motivasi dan status sosial terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB

C.2 KEGUNAAN PENELITIAN

1. Untuk memberikan rekomendasi berupa pemikiran kepada instansi yang terkait dalam masalah ini.
2. Untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Pati dalam hubungannya peningkatan peran serta masyarakat dalam berpartisipasi membayar PBB

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI / PENGKAJIAN TEORITIS

A.1. PARTISIPASI MASYARAKAT

Dalam menerima kebijaksanaan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat dituntut dapat memahami, menghayati, dan melaksanakannya sebagaimana yang diharapkan. Dengan kata lain, keterlibatan atau partisipasi masyarakat amatlah dibutuhkan demi terciptanya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan pelaksanaan UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu melalui pembayaran PBB oleh masyarakat akan dapat tercapai apabila ada partisipasi masyarakat itu sendiri dalam membayar PBB. Hal ini sesuai dengan amanat GBHN yang berbunyi :

“partisipasi aktif segenap masyarakat dalam pembangunan harus semakin meluas dan merata, baik dalam memikul beban pembangunan maupun dalam menerima kembali hasil pembangunan. Untuk itu perlu diciptakan suasana kemasyarakatan yang mendukung cita-cita pembangunan serta terwujudnya kreatifitas dan otoaktivitas dikalangan masyarakat”

dari hal tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa masyarakat harus ikut serta dalam semua kebijaksanaan yang diambil pemerintah sebagai upaya dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Sondang P. Siagian (Khairuddin, 1992 :125) tentang pentingnya partisipasi masyarakat, yakni :

“ Partisipasi dari masyarakat luas mutlak diperlukan, oleh karena itulah pada akhirnya melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, rakyat banyak memegang peranan sekaligus sebagai objek dan subjek pembangunan “. Untuk itu ada beberapa alasan pembeda bagi pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu :

1. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut.
2. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat.
3. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan, dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan.
4. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulainya dari mana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki
5. Partisipasi memperluas zone (kawasan) penerimaan proyek pembangunan

6. Ia akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat.
 7. Partisipasi akan menopang pembangunan.
 8. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif bagi baik aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia.
 9. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan kas daerah
 10. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis Indonesia untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.
- (Moeljarto, 1987:48-49)

Dengan demikian, membayar PBB yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu kewajiban masyarakat sebagai bentuk dari partisipasi masyarakat.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang partisipasi masyarakat, berikut akan diuraikan beberapa pengertian partisipasi itu sendiri. Menurut Hoofsteede (Khairuddin, 1992 :124), definisi partisipasi adalah :

“ the taking part in one or more phases of the process”,

(mengambil bagian dari suatu tahap/fase atau lebih dari suatu proses (pembangunan)

Sedangkan menurut Keith Davis (1985 : 177) mendefinisikan sebagai berikut : *“as mental and emotional involment of person in a group situation*

which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them "

(keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam situasi kelompok, sehingga orang itu terdorong untuk membantu merealisasikan tujuan-tujuan kelompok dan mau menerima tanggung jawab)

Hal senada juga diutarakan oleh Winardi (1990:202), bahwa :

“partisipasi secara formal dapat didefinisikan sebagai : keikutsertanya seseorang, baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangsih kepada proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan terdapat dan orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawabnya untuk melakukan hal tersebut”.

Dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa keterlibatan masyarakat merupakan keterlibatan mental dan emosional, lebih dari sekedar keterlibatan fisik. Keterlibatan secara mental berarti keterlibatan sebagai suatu kebiasaan hidup disuatu daerah atau lingkungan tertentu. Sedangkan keterlibatan secara emosional berarti keterlibatan yang benar-benar dirasakan, yang timbul dari hati atau perasaan seseorang sebagai kepentingan bersama.

Dan menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1989:207-208), keterlibatan aktif masyarakat berarti :

“keterlibatan dalam proses proses penentuan arah, strategi,dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung

dalam proses politik dan proses sosial hubungan antara kepentingan – kepentingan dalam masyarakat, sehingga mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Kedua, partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program pembangunan. Hal ini dapat berupa sumbangan dalam mobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas jalannya pembangunan, dan lain-lain. Pada pokoknya arah kegiatan masyarakat yang mendukung peningkatan tabungan dan investasi, dan dengan pembentukan modal suatu sistem pemungut pajak yang adil dan merata dapat lebih menggerakkan kesediaan membayar pajak. Ini adalah bentuk partisipasi mutlak yang perlu dalam bernegara, apalagi bila akan membangun.

Ketiga, partisipasi masyarakat adalah memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Bagian-bagian daerah ataupun golongan-golongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya dalam bentuk kegiatan produktif mereka melalui perluasan kesempatan-kesempatan dan pembinaan tertentu”.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Hoofsteede (Khairuddin, 1992:125), partisipasi mempunyai 3 tingkatan, yakni :

1. Partisipasi inisiasi (inisation participation) : partisipasi yang mengandung inisiasi dari pimpinan, baik formal maupun informal, ataupun dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek, yang nantinya proyek tersebut merupakan kebutuhan bagi masyarakat.

Di sini masyarakat sekaligus menjadi subjek dan objek pembangunan, mereka dapat menentukan dan mengusulkan segala sesuatu rencana yang akan dilaksanakan.

2. Partisipasi legitimasi (legitimation participation) : partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut.

3. Partisipasi eksekusi (execution participation) : partisipasi pada tingkat pelaksanaan.

Masyarakat hanya turut serta dalam pelaksanaan proyek, tanpa ikut serta menentukan dan membicarakan proyek tersebut.

Begitu juga yang disampaikan oleh Talizidhuhu Ndraha (1987:102), bahwa :

“ Ada 5 tahapan partisipasi yang perlu diperhatikan agar partisipasi masyarakat benar-benar dapat terwujud. Kelima tahap tersebut meliputi :

1. Partisipasi dalam mengadakan atau melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal dari perubahan sosial.
2. Partisipasi dalam mempersiapkan atau menyerap atau menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan, mengiyakan, menerima dengan syarat maupun dalam arti menolaknya)

3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan termasuk dalam pengambilan keputusan
4. Partisipasi dalam pelaksanaan
5. Partisipasi dalam menilai yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan sesuai rencana dan hasilnya dapat memenuhi kebutuhan anggota masyarakat atau tidak.

Dalam penelitian ini, partisipasi yang sesuai dengan konteks yang ada adalah partisipasi eksekusi atau partisipasi dalam pelaksanaan. Karena kebijaksanaan yang akan dilaksanakan masyarakat sudah terlebih tertuang dalam suatu peraturan perundang-undangan, yang merupakan produk antara pemerintah dengan wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen. Dimana hasilnya merupakan kesepakatan bersama berdasarkan aspirasi rakyat dan telah disesuaikan situasi dan kondisi masyarakat yang ada pada saat ini. Dan menjadi kewajiban masyarakat untuk mentaati dan melaksanakan, khususnya UU No.12 Tahun 1985. Dan perwujudan dari dikeluarkannya undang-undang tersebut adalah adanya kesadaran masyarakat untuk membayar PBB tepat pada waktunya.

Tetapi pada kenyataannya, tidak semua masyarakat mau berpartisipasi dengan alasan yang bermacam-macam. Hal ini dapat disadari karena adanya beberapa faktor yang mungkin membuat mereka terdorong untuk berpartisipasi. Dorongan yang sangat umum adalah apabila hasil partisipasi

tersebut dapat dinikmati langsung oleh mereka sendiri dan memberikan keuntungan kepada mereka.

Menurut Sondang P. Siagian (1984 : 32-33), partisipasi terbagi dalam dua bentuk, yaitu :

1. Partisipasi pasif : berarti bahwa dalam sikap, perilaku, dan tindakannya, rakyat melakukan hal-hal yang tidak dapat menghalangi kelancaran roda pembangunan nasional.
2. Partisipasi aktif, dapat terwujud dalam berbagai hal bentuk, antara lain :
 - a. Turut memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan lembaga-lembaga sosial dan politik yang ada di masyarakat sebagai saluran aspirasinya.
 - b. Menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi dengan tidak menyerahkan penentuan nasibnya kepada orang lain, seperti kepada pimpinan dan tokoh masyarakat yang ada, baik bersifat formal maupun informal.
 - c. Memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab, seperti membayar pajak secara jujur serta kewajiban lainnya.
 - d. Ketaatan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan demi kepentingan bersama yang lebih luas dan lebih matang.

Sedangkan Keith Davis (Sastropetro, 1986:56) juga mengemukakan bentuk dan jenis partisipasi, yaitu sebagai berikut :

1. Bentuk partisipasi, meliputi :

- a. Konsultasi
- b. Sumbangan spontan berupa barang / uang
- c. Sumbangan dari luar yang berbentuk proyek bersifat berdikari
- d. Sumbangan dalam bentuk jasa kerja
- e. Proyek yang dibiayai oleh komunitas setelah ada konsensus dalam rapat komunitas
- f. Aksi massal mengerjakan proyek secara sukarela
- g. Mengadakan perjanjian bersama untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan / cita-cita
- h. Melakukan pembangunan secara endogam dalam lingkungan keluarga
- i. Pembangunan proyek-proyek komunitas yang otonom

Dan dalam pelaksanaan pembayaran PBB oleh masyarakat, harus berpedoman pada UU No. 12 1985. Dimana dalam undang-undang tersebut memuat, antara lain :

1. Objek PBB

2. Subjek PBB
3. Pendaftaran dan pendataan wajib pajak PBB
4. Dasar pengenaan dan cara menghitung PBB
5. Tahun, saat, dan tempat yang menentukan pajak terutang.
6. Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan pajak Terutang (SPPT), dan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
7. Besarnya pajak yang terhutang
8. Tata cara pembayaran dan penagihan
9. Pengurangan, keberatan, dan banding
10. Pembagian hasil penerimaan PBB
11. Sanksi
12. Pengembalian kelebihan pembayaran PBB

Untuk menyukkseskan pelaksanaan kebijaksanaan yang telah dibuat pemerintah, dibutuhkan tiga komponen, yaitu :

1. Knowledge (pengetahuan) : pengetahuan tentang lembaga kemasyaratan dan program yang dilaksanakan.
2. Attitude (sikap) : tanggapan emosional tentang kepercayaan dan tanggapan untuk bertindak.
3. Partise (perilaku) : pernyataan seperti ramah, hangat, agresif, maupun apatis terhadap suatu program.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dijelaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam membayar PBB, yaitu :

1. Masyarakat terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami tentang PBB dan mekanisme pembayarannya.
2. Setelah mengetahui dan memahami, maka akan ada kesadaran dalam diri masyarakat tersebut untuk membayar PBB sebagai kewajiban warga negara.
3. Setelah menyadari akan kewajibannya, maka masyarakat tersebut akan dengan sukarela membayar PBB tepat pada waktunya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Ada beberapa faktor atau hal yang mempengaruhi partisipasi menurut Santosa Sastropoetro. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, kedudukan sosial dan percaya terhadap diri sendiri.
2. Penginterpretasian yang diangkat terhadap agama
3. Kesadaran untuk menyalahartikan motivasi, tujuan, dan kepentingan organisasi penduduk.
4. Tersedianya kesempatan kerja yang lebih baik di luar desa
5. Tidak tersedianya kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan (1986 :22)

Selain itu dalam memutuskan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam berpartisipasi dibutuhkan adanya perilaku dari masyarakat itu sendiri. Setiap individu dalam berperilaku sangat ditentukan oleh faktor – faktor yang sangat kompleks diantaranya adalah faktor fisiologis seperti keadaan

dan kemampuan fisik dan mental seseorang, faktor psikologis seperti persepsi, sikap, kepribadian, inteligensi, motivasi, belajar serta faktor lingkungan seperti keluarga, kebudayaan, label yang melekat pada diri seseorang seperti status sosial, harga diri, tingkat pendidikan dan lain sebagainya.

Sesuai dengan pernyataan tersebut, Maramis (1998 : 61), mengatakan bahwa manusia sebagaimana ia berada pada suatu waktu dalam berperilaku merupakan hasil suatu interaksi antara badan (bio / somato), jiwa (psiko) dan lingkungannya (sosio). Ketiga unsur ini saling mempengaruhi dan tidak boleh memisahkan unsur yang satu dari yang lain, akan tetapi harus memperhatikan serta mempertimbangkan ketiga-tiganya sebagai suatu keseluruhan.

- Unsur bio / somato : Keadaan badaniah atau jasmaniah
- Psiko : Kesadaran, afek dan emosi, psikomotor (conation), proses berpikir, pencerapan (persepsi), kepribadian, dan motivasi.
- Sosio : Lingkungan

Lebih lanjut, Gibson mengemukakan bahwa variabel - variabel penentu seseorang dalam berperilaku, adalah sebagai berikut :

- a. Variabel fisiologis : Kemampuan fisik dan mental
- b. Variabel Psikologis : Persepsi, sikap, kepribadian, belajar dan watak
- c. Variabel lingkungan : Keluarga, kebudayaan, kelas sosial.(1989 :52).

Dari dasar itulah dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat akan terlihat dari perilaku mendukung dan melaksanakan kegiatan pembangunan, dan dalam penelitian ini, penulis hanya membatasi permasalahan pada 3 faktor yang mempengaruhi partisipasi, yaitu : sikap, motivasi, dan status sosial.

A.2 SIKAP

Dalam menerima suatu kebijakan pemerintah, sikap masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Sikap masyarakat yang mendukung atau tidak mendukung kebijakan tersebut akan berpengaruh pada efektivitas kebijakan itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh George C. Edward III (1991 :30), bahwa :

“Sikap merupakan faktor yang amat penting untuk suksesnya implementasi. Jika pelaksana berpandangan positif terhadap suatu kebijakan, maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan apa yang dikendaki oleh pembuat kebijakan. Tetapi bila sikap atau perspektifnya berbeda, maka proses implementasi menjadi terancam kesuksesannya”.

Sikap didefinisikan oleh Louse dan Charles Osgood (Azwar, 1988:3) “Sebagai suatu evaluasi atau reaksi perasaan “. Definisi lain dinyatakan oleh Borkowitz (Azwar 1988:3), bahwa : “Sikap seseorang terhadap objek adalah perasaan mendukung atau memihak (favorable) ataupun perasaan tidak memihak (nonfavorable) objek tersebut”.

Tak jauh berbeda dengan definisi tersebut, Louise Thurstone (Azwar, 1988:3) juga mengutarakan definisi sikap, yaitu :

“sikap sebagai suatu tingkatan afek baik itu bersifat positif maupun negatif dalam hubungannya dengan obyek-obyek psikologis”. Lebih lanjut Thurstone mengatakan bahwa Afek yang positif yaitu afek senang, dengan demikian adanya sikap menerima atau setuju, sedangkan afek negatif adalah sebaliknya, yaitu adanya sikap menolak atau tidak senang. Dengan demikian maka obyek itu dapat menimbulkan perbedaan tingkatan afeksi seseorang baik positif maupun negatif. (Walgito, 1998 :51)

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap adalah :

1. pengaruh atau penolakan
2. penilaian
3. suka atau tidak suka
4. kepositifan atau kenegatifan terhadap suatu objek tertentu.

Pandangan yang sama juga diungkapkan oleh Prof, Dr. Subino Hadisubroto, MA (1988:28) yang menyatakan sikap adalah sejauh mana senang atau ketidaksenangan terhadap sesuatu.

Sedangkan pengertian sikap yang lainnya dinyatakan oleh Gordon Allport (Mar' at, 1981:3), bahwa :

“ an attitude toward any given object, idea, or person is an enduring system with a cognitive component, an affective component, and behavioral tendency. The cognitive component causist of the beliefs about the attitude

object, the affective component causist of the emotional feelings connected with beliefs and the behavioral tendency is what Allport refered assistance the readiness to response in a particular way”.

Dari pernyataan diatas dapat ditarik pengertian tentang sikap yaitu konstelansi dari komponen kognitif, yaitu bagian yang berkaitan dengan proses berpikir pada rasionalitas yang disebabkan oleh kepercayaan, persepsi, dan pendapat seseorang tentang objek sikap, komponen afektif, yaitu bagian yang disebabkan oleh perasaan emosional yang berhubungan dengan tanggapan seseorang berupa tindakan terhadap objek sikap, dan komponen perilaku, yaitu bagian yang berhubungan dengan kecenderungan seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu.

Hal senada juga diutarakan oleh David O. Sears dkk bahwa sikap terhadap obyek, gagasan atau orang tertentu merupakan orientasi yang bersifat menetap dengan komponen-komponen kognitif, afektif, dan perilaku. Komponen kognitif terdiri dari seluruh kognisi yang dimiliki seseorang mengenai objek sikap tertentu, fakta, pengetahuan, dan keyakinan tentang obyek. Komponen afektif terdiri dari seluruh perasaan atau emosi seseorang terhadap objek terutama penilaian. Komponen perilaku terdiri dari kesiapan seseorang untuk bereaksi atau kecenderungan untuk bertindak terhadap objek (1999 :138)

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan suatu proses yang dimulai dengan adanya interaksi kemudian membentuk

suatu persepsi tentang suatu objek psikologis, sehingga komponen kognisi melukiskan objek tersebut dan sekaligus dikaitkan dengan objek-objek lain disekitarnya. Berdasarkan pemahamannya, maka komponen afeksi memiliki penilaian emosional yang dapat bersifat positif atau negatif. Dengan dasar penilaian tersebut maka seseorang akan bertindak laku terhadap objek tersebut.

Dalam implementasi kebijakan tersebut dapat tercapai, maka terlebih dahulu dikomunikasikan UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam bentuk tulisan, dimana pesan yang terkandung dalam UU tersebut disebarluaskan kepada masyarakat melalui komunikasi. Sehingga diperlukan pemahaman terhadap kebijakan tersebut dalam tahap pembentukan persepsi. Namun, tidak semudah itu masyarakat akan memahami maksud dari pesan yang terkandung di dalamnya, sehingga tidak segera mendapatkan umpan balik dari masyarakat, apalagi masyarakat yang ada merupakan masyarakat yang sangat heterogen, dan dimasa lalu pajak mempunyai citra buruk dimata masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama yang terjalin antara masyarakat dengan pemerintah sendiri, sebagai pemungut pajak dengan petugas-petugasnya yang bertanggung jawab atas masalah ini. Karena, penerapan suatu kebijakan itu akan selalu berhadapan dengan kemungkinan mendapat dukungan atau penolakan.

Adapun sikap-sikap yang menghambat implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (1991: 33), adalah :

1. Pejabat yang bertanggung jawab tidak tertarik untuk menerapkan hukum yang seharusnya berlaku.
2. Persaingan interes kebijakan diantara para pelaksana.
3. Para pelaksana bersikap selektif terhadap instruksi yang tidak sama dengan sikap atau pandangan mereka akan kebijakan tertentu tersebut.
4. Perbedaan pandang orang juga merintangai kerja sama di antara badan-badan / orang-orang yang seharusnya bekerja sama melaksanakan kebijakan.
5. Perbedaan pandang antar unit-unit organisasi akan melahirkan hal serupa.
6. Mungkin terdapat cara pandang yang berbeda di antara orang-orang yang berbeda tanggung jawabnya dalam suatu organisasi.
7. Unit-unit organisasi biasanya menekankan program-program baru yang mereka anggap akan memperkuat atau mengembangkan aspek-aspek penting misi kebijakan mereka. Ini mengakibatkan tawar menawar atau pertentangan interorganisasi.
8. Unit-unit organisasi menentang usaha-usaha pihak lain yang mengambil atau bersama-sama memakai sumber-sumber yang penting untuk melaksanakan tugasnya.

9. Unit-unit birokrat mencoba mempertahankan otonomi dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya.
10. Sikap – sikap individu.
11. Sikap mereka yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari implementasi suatu kebijakan menghalangi mereka untuk memperoleh keuntungan tersebut.

Dalam implementasi UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, masyarakat dituntut untuk bersikap konsisten pada ketentuan yang berlaku. Artinya, masyarakat harus memahami apa yang mereka lakukan, tidak semata-mata karena adanya paksaan dari luar, tetapi benar-benar merupakan kesadaran dalam diri masyarakat itu sendiri, bahwa membayar PBB merupakan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

Dengan demikian, sikap-sikap yang dapat merugikan implementasi sejauh mungkin dapat dihindari. Dan lebih lanjut, akan terbentuk keyakinan masyarakat akan niat baik pemerintah, bahwa hasil pembayaran tersebut nantinya akan dirasakan oleh masyarakat sendiri, walaupun tidak secara langsung. Sehingga masyarakat akan menunjukkan sikap-sikap positif terhadap keberhasilan pelaksanaan UU tersebut melalui pembayaran PBB secara tepat sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

A.3. MOTIVASI

Pada dasarnya motivasi mengacu pada konsep yang digunakan untuk menerangkan kekuatan-kekuatan yang ada dan bekerja pada diri organisme atau individu yang menjadi penggerak dan mengarah tingkah laku individu tersebut. Selain untuk keperluan menerangkan kekuatan-kekuatan yang menjadi penggerak dan pengarah tingkah laku, teori atau konsep motivasi juga digunakan untuk menerangkan perbedaan-perbedaan intensitas tingkah laku.

Menurut para teoritikus motivasi, tingkah laku yang intens adalah merupakan hasil dari taraf motivasi yang tinggi, dan sebaliknya. Dari sini bisa diketahui bahwa studi mengenai motivasi tidak hanya diperlukan guna memahami kondisi atau kekuatan-kekuatan yang menjadi penggerak dan pengarah tingkah laku, tetapi juga penting untuk tujuan menemukan cara-cara yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas tingkah laku.

Motivasi berhubungan erat dengan timbulnya suatu kecenderungan untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan. Heckhausen (1979:23) berpendapat bahwa motivasi dapat menentukan tingkah laku seseorang dalam mencapai tujuan tertentu. Istilah *need* dan motivasi mempunyai pengertian yang sama dan dapat disamakan penggunaannya dan *need* bukan merupakan akibat dari kondisi kekurangan sebagai pengertian umum dalam kehidupan sehari-hari. (Atkinson 1958:596).

Motivasi merupakan dasar dari kegiatan untuk mengerakkan serta mengarahkan tingkah laku seseorang dan sangat erat kaitannya dengan motif. Dengan demikian maka motivasi dapat diartikan sebagai kondisi aktif dalam diri individu.

Menurut Herbert L. Petri (1986 : 2), secara garis besar teori motivasi dapat dikategorikan dalam tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan biologis, pendekatan behavioristik dan pendekatan kognitif. Dari pendapat Herbert L. Petri tersebut, penulis menjabarkan ketiga pendekatan-pendekatan tersebut :

- Pendekatan biologis

Pendekatan biologis terdiri dari teori instingtual dan teori fisiologis. Teori insting menekankan keberadaan insting-insting yang menjadi motivator tingkah laku. Contoh teori - teori ini adalah teori dari :

- William James

Teori ini mengatakan bahwa insting-insting itu sama dengan reflek-refleks yang menghasilkan tingkah laku – tingkah laku yang otomatis dalam kondisi-kondisi yang menunjangnya tanpa diketahui ke arah mana atau untuk tujuan apa tingkah laku - tingkah laku tersebut muncul.

- William McDougall

Teori ini percaya bahwa seluruh tingkah laku bersumber pada insting atau instingtif. Hal yang terpenting dalam teori ini adalah menemukan dan menerangkan berbagai insting dalam memahami motivasi.

- Sigmund Freud

Teori motivasi dari Sigmund Freud menggunakan konsep energi psikis yang berakumulasi dalam insting yang terangkum atau berada dalam satu sistem kepribadian yang disebut id. Dan teori-teori insting yang lainnya.

Sedangkan Teori Fisiologis adalah teori – teori yang bertumpu pada asumsi keberadaan mekanisme –mekanisme fisiologis yang ada dibalik tingkah laku. Contoh - contoh teori motivasi fisiologis yaitu :

- Teori keterjagaan (Arousal theory).

Teori motivasi yang menekankan pada asumsi mengenai organisme sebagai suatu keseluruhan dan berpendapat bahwa tingkah laku organisme ditentukan oleh taraf keterjagaan organisme yang bersangkutan.

- Teori Hebb

Teori ini mengemukakan bahwa informasi sensoris organisme bertindak untuk dua tujuan, yakni memberi informasi tentang stimulus atau disebut fungsi isyarat, dan menaikkan keterjagaan individu (fungsi keterjagaan).

- Pendekatan behavioristik

Teori-teori motivasi yang termasuk dalam kategori pendekatan behavioristik adalah sebagai berikut :

1. Teori dorongan.

Diantaranya adalah teori dari :

- Woodworth.

Woodworth yang pertama kali memperkenalkan istilah drive. Dorongan sebagai konstruk motivasional, biasanya dikaitkan dengan pemeliharaan homeostatis yaitu proses dimana mekanisme-mekanisme tubuh bekerja dengan tujuan mempertahankan keadaan yang optimal. Woodworth berasumsi bahwa seluruh tingkah laku (kecuali refleks-refleks) adalah motivasi. Tanpa adanya dorongan tidak akan ada kekuatan yang menggerakkan dan mengarahkan mekanisme-mekanisme yang bertindak sebagai pemuncul tingkah laku.

- Teori dorongan Clark Hull.

Teori dorongan Hull menerangkan faktor non motivasional (belajar) disejajarkan peranannya dengan faktor motivasional (dorongan). Dan teori – teori dorongan yang lainnya.

2. Teori motivasi belajar

Teori yang menekankan peranan belajar dalam pembentukan serta pengarahannya motivasi. Contoh-contoh teori ini, adalah teori classical conditioning dari Ivan Pavlov, teori stimulus respon B.F. Skinner, J.B. Watson, Law of Effect dari Thorndike, Observasional Learning atau Teori Modeling dari Bandura dan teori motivasi belajar yang lainnya.

3. Teori Insentif

Teori motivasi yang memberi tekanan khusus pada peranan faktor-faktor eksternal tanpa mengabaikan sama sekali peranan faktor-faktor internal. Contoh – contoh teori motivasi insentif, misalkan teori :

- Teori motivasi insentif dari Hobart Mowrer

Motivasi insentif adalah pendorong utama bagi tingkah laku. Motivasi insentif berkaitan erat dengan proses belajar respons-respons emosional yang dilakukan oleh organisme

- Model Bolles – Moot Teori

Dalam konsep insentifnya menjelaskan bahwa isyarat-isyarat menjadi motivator-motivator insentif sejauh isyarat-isyarat tersebut bisa meramalkan kedatangan ataupun menjauhkan objek tujuan. Bisa tidaknya isyarat-isyarat itu memainkan peranan sebagai pengendali motivasional adalah tergantung pada bisa tidaknya isyarat-isyarat tersebut dijadikan ukuran peramalan atas akibat-akibat yang akan muncul (isyarat-isyarat prediktif) akan berfungsi sebagai pemerkuat-

pemerkuat sekunder (secondary reinforcers) dan karenanya akan bisa memotivasi organisme untuk melanjutkan tingkah lakunya.

- Model Bindra

Model motivasi yang mencakup tidak hanya isyarat-isyarat prediktif, melainkan keadaan organismik (dorongan) dan insentif-insentif.

- Teori motivasi insentif Eric Klinger.

Teori insentif Eric Klinger memusatkan perhatian dan analisisnya pada tingkah laku manusia, dengan menekankan pentingnya makna dan kebermanaknaan dalam kehidupan manusia. Kebermanaknaan (*meaningfulness*) dicapai oleh individu-individu melalui insentif-insentif yang diperolehnya. Setiap individu selalu berusaha memperoleh objek-objek, kejadian-kejadian, dan pengalaman-pengalaman yang secara emosional penting bagi mereka. Dan teori motivasi Insentif yang lainnya.

4. Teori Motivasi Hedonik

Teori motivasi hedonisme menerangkan bahwa tingkah laku manusia dimotivasi ke arah pencapaian kesenangan dan penghindaran kesakitan.

Contoh-contoh teori teori hedonik adalah :

- Teori hedonik Paul T. Young

Teori ini menerangkan bahwa terdapat kontinum hedonik dengan afeksi positif (perasaan menyenangkan) maksimum di ujung yang satu dan afeksi negatif (perasaan tidak menyenangkan) maksimum di

ujung yang lainnya. Afeksi positif berkaitan dengan tingkah laku yang mendekat, sedangkan afeksi negatif berkaitan dengan tingkah laku menghindar.

- Teori hedonik Thomas Hobbes

Teori ini menerangkan bahwa seluruh tingkah laku manusia dimotivasi oleh hasrat memperoleh kesenangan dan menghindarkan kesakitan.

- Teori hedonik Herbert Spencer

Tingkah laku-tingkah laku yang menyenangkan (menimbulkan kesenangan) oleh organisme akan dipertahankan, sebab tingkah laku – tingkah laku tersebut bersifat adaptif atau memiliki nilai survival. Sebaliknya, respons-respons atau tingkah laku –tingkah laku yang menimbulkan kesakitan akan disingkirkan dari perbendaharaan tingkah laku organisme. Baik kesenangan maupun kesakitan adalah dua aspek yang memegang peranan menentukan dalam pemodifikasian tingkah laku. Dan teori-teori motivasi hedonik yang lainnya.

5. Teori Motivasi Pertumbuhan

Contoh - contoh teori motivasi pertumbuhan terdiri dari teori-teori :

- Teori tendensi pengaktualisasian Carl Rogers

Rogers menekankan bahwa tendensi pengaktualisasian adalah Master Motive yang merepresentasikan tendensi yang inheren pada

manusia sebagai organisme untuk mengembangkan segenap kapasitas atau potensi yang dimilikinya dengan berbagai cara.

- Teori bertingkat dan aktualisasi diri Abraham Maslow
Teori motivasi yang menekankan pada pertumbuhan diri
- Teori motivasi Erick Fromm
Fromm menekankan 3 faktor dalam motivasi yaitu Motive, Expectancy dan Incentif.
- Teori motivasi kebutuhan Model Edwards
Edwards mengklasifikasikan 15 kebutuhan (instrinsik) yang nampak pada manusia dengan kekuatan yang berbeda-beda yang dapat mempengaruhi motivasi individu. Kebutuhan tersebut adalah achievement, deference, order, exhibition, autonomy, affiliation, intraception, succorance, dominan, abasement, nurturance, change, endurance, heterosexuality, aggresion.
- Teori motivasi sosial model Mc Clelland
Dalam konsepnya mengenai motivasi, dalam diri individu terdapat 3 kebutuhan pokok yang mendorong tingkah laku yaitu need for achievement, need for affiliation, need for power
- Dan teori-teori pertumbuhan yang lainnya.

- Pendekatan kognitif

Teori motivasi yang memfokuskan penguraian dan penelitian motivasi tingkah laku manusia serta memandang individu sebagai agen yang aktif mengolah dan menentukan tingkah laku yang diungkapkannya. Contoh Teori – teori yang dimaksud antara lain adalah teori :

- Teori lapangan (field theory) Kurt Lewin

Pendekatan kognitif Lewin terutama dipengaruhi oleh psikologi gestalt, yakni satu aliran psikologi yang menekankan bahwa organisme dalam bertindak laku bersifat aktif dan disertai insight (pemahaman) atas situasi atau masalah yang dihadapinya. Tingkah laku organisme atau individu hanya bisa dimengerti sebagai hasil dari seluruh kekuatan yang bekerja mempengaruhi diri individu tersebut.

- Teori keseimbangan (*balance theory*) Fritz Heider

Menurut teori keseimbangan Heider, relasi antara individu dengan objek bisa positif dan bisa pula negatif. Relasi individu –objek positif adalah relasi yang melibatkan perasaan menyukai atau sikap memiliki. Sebaliknya, relasi individu objek negatif adalah relasi yang menyertakan atau melibatkan perasaan tidak menyukai atau sikap tidak memiliki.

- Teori ketidakseimbangan kognitif (cognitive dissonance theory) dari Festinger.

Teori disonansi kognitif berdasarkan gagasan bahwa individu selalu berusaha memelihara konsistensi keyakinan-keyakinan dan sikap-sikapnya dengan tingkah laku overt-nya (tingkah laku nampak). Kognisi-kognisi individu mengenai dirinya sendiri dan mengenai dunia sekitarnya selalu berelasi satu sama lain dengan tiga kemungkinan relasi, sehingga akan terdapat tiga bentuk keadaan kognitif, yakni disonan (tidak konsisten), tidak relevan, atau konsonan (konsisten). Jika kognisi – kognisi individu berada dalam keadaan disonan, yakni kognisi yang satu tidak konsisten atau tidak sejalan dengan kognisi yang lainnya, maka individu akan mengalami perasaan tidak menyenangkan. Pada gilirannya individu tersebut akan termotivasi untuk melakukan perubahan dengan tujuan agar kognisi-kognisinya itu ada dalam keadaan konsonan atau konsisten satu sama lain.

- Teori persepsi diri (self perception theory) dari Bem

Individu mengamati tingkah lakunya sendiri sebagaimana orang luar atau individu lain melakukannya.

Dalam hubungan penelitian partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan ini , teori motivasi yang digunakan adalah

teori-teori motivasi yang mempunyai pendekatan Behavioristik. Teori-teori ini selain berasumsi bahwa motivasi tingkah laku tergantung atau bersumber pada kebutuhan-kebutuhan fisiologis, juga menerangkan peranan kondisi eksternal atau faktor lingkungan mendapat perhatian khusus, serta proses belajar sebagai determinan-determinan yang utama dalam pembentukan atau kemunculan tingkah laku.

Dari definisi motivasi yang berpendekatan behavioristik, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah “kekuatan-kekuatan yang ada dan bekerja baik pada diri organisme / individu maupun kekuatan yang ada diluar individu sehingga individu tersebut memahami keadaan dirinya untuk menggerakkan dan mengarahkan tingkah lakunya”.

Maka bila dikaitkan dengan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, maka motivasi adalah kekuatan-kekuatan yang ada dan bekerja baik pada diri organisme / individu maupun kekuatan yang ada diluar individu sehingga individu tersebut memahami keadaan dirinya untuk menggerakkan dan mengarahkan tingkah lakunya untuk membayar pajaknya untuk memenuhi kebutuhan dalam hal ini kebutuhan yang mendasari diri seseorang untuk bertindak dan memberikan sumbangannya pada negara pada sasaran pencapaian tujuan.

A.4. STATUS SOSIAL

Di dalam suatu masyarakat akan selalu dijumpai dengan adanya struktur sosial atau stratifikasi sosial. Status tersebut menjadi label dari masing-masing individu dalam suatu masyarakat dan merupakan gejala yang umum. Menurut Soerjono Soekanto (1989 : 216) Status (kedudukan) diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok tersebut atau tempat suatu kelompok sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi.

Dari pengertian di atas dapat dimengerti bahwa status sosial seseorang biasanya menggambarkan kedudukan seseorang di dalam masyarakat dan berhubungan dengan interaksi dan relasi dengan orang lain. Status atau kedudukan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain dapat dilihat dari jabatannya di masyarakat, status sosial ekonominya, status pekerjaannya, serta pendidikannya. Sesuai dengan pernyataan tersebut, Bernard Berber (Taneko, 1983 : 96), menyebutkan bahwa ada 6 dimensi strata sosial. Ke-enam dimensi strata sosial itu adalah :

1. Prestis jabatan atau pekerjaan (*Occupational prestige*).
2. Rangkaing dan kekuasaan (*authority and power ranking*)
3. Pendapatan atau kekayaan (*income or wealth*)

4. Kesucian beragama atau pimpinan keagamaan (*religious or ritual purity*)
5. Pendidikan dan pengetahuan (*education or knowledge*)
6. Kedudukan (dalam) kekerabatan dan kedudukan dalam suku bangsa (*kindship and ethnic group ranking*).

Hal yang senada juga dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1977 : 35) yang menyebutkan status sosial ekonomi dari suatu masyarakat mencakup 3 faktor, yaitu :

- a) Pekerjaan
- b) Pendapatan/penghasilan
- c) Pendidikan

Lebih lanjut menurut Soerjono Soekanto (1989 : 214), ukuran atau kriteria untuk menggolongkan status sosial ekonomi masyarakat adalah :

1. Ukuran kekayaan/kebendaan

Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak, termasuk dalam lapisan teratas.

2. Ukuran kekuasaan

Barang siapa yang memiliki kekuasaan/wewenang terbesar, menempati lapisan tertinggi

3. Ukuran kehormatan

Orang yang disegani dan dihormati mendapat tempat teratas

4. Ukuran ilmu pengetahuan

Masyarakat yang dihargai dilihat dari ilmu pengetahuannya

5. Ukuran pendapatan

Barang siapa yang mempunyai penghasilan yang besar maka termasuk golongan atas.

Dari pendapat-pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa status sosial dapat dipengaruhi oleh :

- a) Pekerjaan
- b) Penghasilan atau pendapatan, serta
- c) Pendidikan

Di dalam masyarakat yang heterogen terdiri dari masyarakat yang berpendapatan / berpenghasilan rendah atau golongan miskin dan masyarakat yang berpendapatan tinggi atau golongan kaya. Untuk mengetahui apakah seseorang tersebut tergolong penduduk miskin atau penghasilan rendah, ada beberapa indikator kemiskinan yaitu :

- ☐ Konsumsi beras per kapita per tahun
- ☐ Tingkat pendapatan
- ☐ Tingkat kecukupan gizi
- ☐ Kebutuhan fisik minimum
- ☐ Tingkat kesejahteraan (Arsyat Lincoln, 1999 : 240)

Sajogyo (1977) menggunakan tingkat konsumsi beras per kapita sebagai indikator kemiskinan. Untuk daerah pedesaan, penduduk pedesaan, penduduk dengan konsumsi beras kurang dari 240 kg per kapita per tahun bisa digolongkan miskin. Sedangkan untuk daerah perkotaan adalah 360 kg per kapita per tahun. (Arsyat Lincolin, 1999 : 240)

Secara lebih terinci Sajogyo membagi lagi indikator kemiskinan tersebut menjadi 3 kelompok, sebagai mana terlihat pada tabel 1.2 :

Tabel II.2
Batas Tingkat pengeluaran (Garis Kemiskinan)
Untuk Penduduk Perkotaan dan Penduduk Pedesaan
Menurut Kategori Kemiskinan

Kategori kemiskinan	Pedesaan	Perkotaan
Melarat	180 kg	270 kg
Sangat miskin	240 kg	360 kg
Miskin	320 kg	480 kg

(Sajogyo Dalam Arsyat Lincolin, 1999 : 240)

Dengan keterangan diatas, maka jika dihubungkan dengan kondisi tahun sekarang ini (2002) dengan harga beras Rp 3.500,00/kg, maka akan diketahui jumlah penghasilan dan pengeluaran yang dibutuhkan oleh tiap keluarga, di mana berdasarkan angka statistik golongan yang berada pada tingkat sosial rendah, memiliki 5 orang anggota keluarga. Contoh perhitungan dapat dilihat dibawah ini :

untuk perkotaan $480 \text{ kg beras} \times \text{Rp. } 3.500,00 = 1.680.000,00 \times 5 \text{ jiwa}$

$= 8.400.000,00/\text{th}$

$= 8.400.000,00/\text{th} : 12 \text{ bln}$

$= 700.000,00 / \text{bulan}$

Untuk pedesaan $320 \text{ kg beras} \times \text{Rp. } 3.500,00 = 1.120.000,00 \times 5 \text{ jiwa}$

$= 5.600.000,00/\text{th}$

$= 5.600.000,00/\text{th} : 12 \text{ bln}$

$= 466.666.67 / \text{bulan}$

Jadi dapat diketahui, untuk kehidupan di kota, sebuah keluarga termasuk dalam kriteria golongan miskin jika penghasilan per bulannya Rp 700.000,00/bulan, sedangkan kriteria golongan miskin sebuah keluarga di pedesaan jika penghasilan per bulannya Rp 466.000,00/bulan

Untuk peghitungan selengkapnya dapat di lihat dalam tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel II.3
Batas Tingkat Pendapatan Untuk Penduduk Perkotaan dan
Penduduk Pedesaan Menurut Pengeluaran Setara Beras

Kategori kemiskinan	Batas tingkat pengeluaran (setara beras perkapita pertahun)	
	Perkotaan	Pedesaan
Miskin	Rp. 700.000,00	Rp. 466.000,00
Sangat Miskin	Rp. 525.000,00	Rp. 350.000,00
Paling miskin	Rp. 393.750,00	Rp. 262.500,00

(Sumber : Sajogja, dalam Arsyat Lincolin, 1999 : 240 dan Perhitungan Penulis)

Penghasilan seseorang dapat diperoleh dari pendapatan pokok, yaitu pendapatan yang diperoleh seseorang dari pekerjaan tetapnya serta pendapatan sampingan, yaitu pendapatan yang diperoleh seseorang dari pekerjaan di luar pekerjaan pokoknya.

Selain pekerjaan dan penghasilan, pendidikan juga berpengaruh pada status seseorang. pendidikan merupakan faktor penting untuk mengembangkan diri seseorang agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman, sehingga dapat mengantisipasi setiap kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan yang tinggi dapat membantu seseorang untuk mengembangkan diri dan dapat menyerap informasi dalam kegiatan – kegiatan sehari-harinya.

Tingkat pendidikan yang memadai akan memberikan kesadaran yang tinggi pada individu untuk melaksanakan tugas maupun aktifitasnya. Pendidikan yang dimaksud adalah usaha atau kegiatan yang secara sadar dilaksanakan secara teratur dan berencana dengan maksud untuk merubah

tingkah laku manusia. Proses pendidikan diharapkan dapat menciptakan manusia terdidik yang mempunyai pola tingkah laku yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

Pendidikan merupakan proses timbal balik dari setiap pribadi manusia dalam menyesuaikan diri dengan alam, teman dan alam semesta. Pendidikan merupakan sesuatu yang terorganisir dan kelengkapan dari semua potensi manusia mengenai moral, intelektual dan jasmani untuk kepribadian individu dan kegunaan masyarakatnya yang diarahkan demi menghimpun semua aktifitas tersebut bagi tujuan akhir, dimana potensi-potensi ini, manusia dipengaruhi kebiasaan, diarahkan untuk disempurnakan oleh kebiasaan yang baik (Brubacher, 1982 :22)

Pendidikan didefinisikan oleh Danny Muslim (1983 :106) sebagai :
Proses penyampaian dari seseorang kepada orang lain tentang cara perseorangan dan sifat untuk dapat hidup sejahtera secara perorangan dan bermasyarakat yang dilakukan dengan sendiri dan terencana.

Dari definisi diatas dapat dimengerti bahwa pendidikan merupakan proses mentrasfer pengetahuan dari orang yang mengetahui, sehingga orang lain akan mengetahui hal yang sebelumnya tidak diketahuinya.

Sedangkan pendidikan menurut Prijono Tjiptohardijanto adalah :
Pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian dan mengikuti kemampuan dalam dan luar sekolah dan berlangsung seumur hidup (Tjiptohardijanto, 1987 : 52)

Dari pengertian pendidikan di atas dapat diartikan bahwa pendidikan adalah mengembangkan diri pada individu dalam menjalankan kehidupannya sehingga dalam kehidupan bermasyarakat seseorang dapat menyesuaikan diri dan dapat berpikir rasional dan dewasa. Peraturan pemerintah RI No. 27 Th 1990 menjelaskan bahwa pendidikan dapat ditempuh dengan melalui dua cara yaitu :

a. Pendidikan sekolah

Yaitu pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan, terdiri atas :

- Pendidikan dasar, yang diselenggarakan untuk mengembangkan sikap, dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.
- Pendidikan menengah, diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya dan alam sekitar serta mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam bidang kerja dalam pendidikan tinggi.
- Pendidikan tinggi, merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang dilaksanakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota

masyarakat yang memiliki kemampuan akademis atau profesional yang menerapkan, dan mengembangkan atau penciptaan ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian.

b. Pendidikan Luar Sekolah

Yaitu pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. Pendidikan tersebut meliputi kursus-kursus, pelatihan, dan satuan pendidikan yang sejenis. (Peraturan Pemerintah RI No. 27, 1990 : 8-10)

Secara potensial pendidikan sangat penting karena :

1. Pendidikan adalah salah satu cara yang mapan untuk memperkenalkan kepada keputusan sosial yang timbul
2. Pendidikan dapat dipakai untuk memperlihatkan peningkatan untuk menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaannya.
3. Pendidikan dapat dicapai untuk menanggulangi masalah tertentu.
4. Pendidikan merupakan cara terbaik yang ditempuh masyarakat untuk membimbing perkembangan manusia. (Harorld G Shane, 1984 : 39-40)

Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, akan mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang dalam melihat dan memahami gejala – gejala baru yang ada di masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo (1974 :228) : “ tingkat pendidikan yang memadai akan memberikan kesadaran yang lebih tinggi dan memudahkan bagi perkembangan identifikasi tujuan pembangunan. Bahkan pendidikan

memberikan prasyarat kemampuan untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang disertai dengan perkembangan nilai ,sikap, dan kualitas hidup sebagai bangsa”.

Pada dasarnya pendidikan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu :

1) Pendidikan informal

Adalah pendidikan yang diperoleh dari pengalaman sehari-hari dengan sadar/tidak sejak seseorang lahir sampai mati dalam keluarga, pekerjaan, atau pergaulan sehari-hai.

2) Pendidikan formal.

Adalah pendidikan yang dilakukan secara teratur, bertingkat, dan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat atau dikenal sebagai pendidikan sekolah.

3) Pendidikan non formal

Adalah pendidikan yang teratur dengan sadar dilakukan tetapi tidak tertib mengikuti peraturan yang tetap (Vembrianto, 1981:21)

Hal senada juga didefinisikan oleh Philip H Coom yang mengklarifikasikan dengan tiga macam pendidikan yaitu :

1. Pendidikan formal : pendidikan diperoleh di sekolah yang teratur, sistematis mempunyai jenjang dan dibagi dalam waktu-waktu tertentu yang berlangsung dari TK sampai perguruan Tinggi.

2. Pendidikan Informal : Proses pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar / tidak sadar pada umumnya tidak teratur, tidak sistematis, sejak lahir sampai mati seperti dalam keluarga.
3. Pendidikan non formal (pendidikan diluar sekolah) adalah semua pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib dan berencana diluar persekolahan (Zaham Idris, 1985)

Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa ada 3 penggolongan tingkat pendidikan yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal serta dengan pendidikan yang dialami seseorang akan mampu mempengaruhi pola pikir seseorang dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Jika dikaitkan dengan partisipasi dan pelaksanaan UU No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, maka seseorang yang berpendidikan tinggi akan lebih mudah menerima, lalu memahaminya, selanjutnya akan menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab dalam membayar PBB, dibanding seseorang yang berpendidikan rendah atau yang sama sekali tidak berpendidikan.

A.5. HUBUNGAN SIKAP DENGAN PARTISIPASI

Pengertian attitude dapat diterjemahkan dengan kata sikap terhadap obyek tertentu, yang dapat merupakan sikap pandangan atau sikap perasaan, tetapi sikap mana disertai oleh kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap obyek tadi itu. Jadi attitude itu lebih tepat diterjemahkan

sebagai sikap dan kesedian beraksi terhadap suatu hal. Attitude itu senantiasa terarahkan terhadap suatu hal, suatu obyek, tidak ada attitude tanpa obyeknya.

Sikap sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari atau dalam situasi sosial. Sikap merupakan keadaan dalam diri manusia yang menggerakkan untuk bertindak, menyertai manusia dengan perasaan-perasaan tertentu di dalam menanggapi obyek dan berbentuk atas dasar pengalaman-pengalaman

Di dalam hubungan dengan orang lain atau obyek-obyek yang lain yang ada di luar dirinya, seseorang akan digerakkan oleh sikapnya itu. Akibat dari menghadapi situasi sosial itu, mungkin sikap yang telah ada pada individu itu akan menjadi bertambah kuat atau makin menjadi kuat, tetapi juga dapat terjadi sebaliknya. Hal ini akan tergantung kepada bagaimana dalam pengalamannya berhasil atau tidaknya di dalam menggunakan sikap yang telah ada itu. Ini berarti bahwa suatu obyek atau stimulus adalah merupakan suatu faktor yang dapat menimbulkan suatu sikap tertentu pada seseorang. Karena itu sikap tidak dapat terlepas dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh seseorang dalam hubungannya dengan orang lain ataupun obyek-obyek yang lain di luar dirinya. Munculnya sikap di dalam suatu situasi, dan nilainya bagi seseorang adalah bersifat subyektif dan berdasarkan atas perasaan orang yang bersangkutan terhadap obyek yang dihadapinya. Karena berdasarkan atas pengalaman-pengalaman maka

terdapat perbedaan antara sikap seseorang dengan orang yang lain, walaupun obyeknya yang dihadapi itu tidak berbeda. Seperti yang dikemukakan oleh Crow and Crow :

" attitude are develop out of the feeling tones that form an affective side of very experience. Attitude are personal and relate to the feelings of a person as he thinks or behaves. For example, a person may be kindly or cross, agreeabel or critical, tolerant or intolerant, friendly or unfriendly, and gay or sad as he needs to people, objects, or situations. (Lester D. Crow and Alice Crow, 1981 : 38).

Dari definisi di atas dapat dimengerti bahwa suatu sikap yang ada pada individu atau manusia itu akan memberi warna atau corak tertentu dari individu yang bersangkutan dan betapa pentingnya masalah sikap di dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam situasi sosial.

Menurut Gerungan (1986 : 151-152), attitude dapat dibeda-bedakan ke dalam attitude individual dan attitude sosial. Attitude individu adalah attitude yang berkenaan dengan obyek-obyek yang bukan merupakan obyek perhatian sosial dan dimiliki seorang saja. Sedangkan attitude sosial dinyatakan oleh cara-cara kegiatan yang sama dan berulang – ulang terhadap obyek sosial. Attitude sosial menyebabkan terjadinya cara-cara tingkah laku yang dinyatakan berulang-ulang terhadap salah satu obyek sosial, dan biasanya attitude sosial itu dinyatakan tidak hanya oleh seorang saja, melainkan juga oleh orang-orang lainnya sekelompok atau semasyarakat.

6. Mungkin terdapat cara pandang yang berbeda di antara orang-orang yang berbeda tanggung jawabnya dalam suatu organisasi.
7. Unit-unit organisasi biasanya menekankan program-program baru yang mereka anggap akan memperkuat atau mengembangkan aspek-aspek penting misi kebijakan mereka. Ini mengakibatkan tawar menawar atau pertentangan interorganisasi.
8. Unit-unit organisasi menentang usaha-usaha pihak lain yang mengambil atau bersama-sama memakai sumber-sumber yang penting untuk melaksanakan tugasnya.
9. Unit-unit birokrat mencoba mempertahankan otonomi dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya.
10. Sikap – sikap individu.
11. Sikap mereka yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari implementasi suatu kebijakan menghalangi mereka untuk memperoleh keuntungan tersebut.

Dalam implementasi UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, masyarakat diharapkan untuk bersikap konsisten pada ketentuan yang berlaku. Artinya, masyarakat harus memahami apa yang mereka lakukan, tidak semata-mata karena adanya paksaan dari luar, tetapi benar-benar merupakan kesadaran dalam diri masyarakat itu sendiri, bahwa membayar PBB merupakan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

Dengan demikian, sikap-sikap yang dapat merugikan implementasi sejauh mungkin dapat dihindari. Dan lebih lanjut, akan terbentuk keyakinan masyarakat akan niat baik pemerintah, bahwa hasil pembayaran tersebut nantinya akan dirasakan oleh masyarakat sendiri, walaupun tidak secara langsung. Sehingga masyarakat akan menunjukkan sikap-sikap positif terhadap keberhasilan pelaksanaan UU tersebut melalui partisipasi dari masyarakat itu dengan pembayaran PBB secara tepat sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

A.6. HUBUNGAN MOTIVASI DENGAN PARTISIPASI

Sebagaimana yang telah penulis sebutkan dimuka, motivasi mengacu pada konsep yang digunakan untuk menerangkan kekuatan-kekuatan yang ada dan bekerja pada diri organisme atau individu yang menjadi penggerak dan mengarah tingkah laku individu tersebut. Selain untuk keperluan menerangkan kekuatan-kekuatan yang menjadi penggerak dan mengarah tingkah laku, teori atau konsep motivasi juga digunakan untuk menerangkan perbedaan-perbedaan intensitas tingkah laku.

Ada 3 pendekatan utama menurut Herbert L. Petri (1986 : 2), tentang teori motivasi yaitu pendekatan biologis, pendekatan behavioristik dan pendekatan kognitif.

Motivasi seseorang tergantung pada kekuatan motivasi itu sendiri. Dorongan-dorongan inilah yang nantinya akan menyebabkan seseorang

melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dan dengan dorongan ini pula seseorang akan berusaha mencapai tujuan.

Demikian pula dalam partisipasi masyarakat dalam membayar PBB, masyarakat yang memiliki motivasi yang kuat, maka akan terdorong olehnya untuk berpartisipasi. Partisipasi dalam hal ini adalah keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam hal ini pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Ditinjau dari segi motivasinya, partisipasi masyarakat terjadi karena :

1. Takut/ terpaksa

Ini akibat adanya perintah yang kaku dari atasan dan petugas yang melaksanakan tugasnya.

2. Ikut-ikutan

Ini hanya didorong oleh rasa solidaritas yang tinggi di antara sesama anggota masyarakat.

3. Kesadaran

Ini timbul karena kehendak dari pribadi anggota masyarakat yang dilandasi oleh dorongan yang timbul dari hati nurani sendiri. Dan partisipasi bentuk inilah yang sesungguhnya sangat diharapkan dapat berkembang di masyarakat (Khairuddin, 1992 : 126)

Motivasi atau keinginan yang terdapat pada seseorang atau individu dikarenakan adanya stimulus-stimulus sehingga timbul suatu rangsangan untuk melakukan tindakan-tindakan, karena setiap manusia mempunyai needs

(kebutuhan, dorongan, faktor-faktor instrinsik maupun ekstrinsik) yang pemunculannya sangat tergantung dari kepentingan individu tersebut, maka motivasi bila dikaitkan dengan partisipasi adalah dorongan untuk membayar pajaknya untuk memenuhi kebutuhan yang mendasari diri seseorang untuk bertindak dan memberikan sumbangannya pada negara pada sasaran pencapaian tujuan.

A.7. HUBUNGAN STATUS SOSIAL DENGAN PARTISIPASI

Status sosial merupakan tingkatan sampai sejauh mana orang atau kelompok dihargai, dikagumi atau disetujui oleh orang atau kelompok lain. Status sesungguhnya adalah tingkat atau kedudukan seseorang dalam hirarki prestise sebuah kelompok atau masyarakat. Hampir semua masyarakat mempunyai sistem status, seperti kelas atau kasta, dan sistem – sistem status secara berarti menentukan lingkungan sosial dan kekuasaan perorangan. Status masyarakat dan kelompok sering di tandai dengan lambang-lambang status seperti Status / kedudukan di masyarakat, pekerjaan, penghasilan atau pendapatan dan tingkat pendidikan.

Status / kedudukan seseorang di masyarakat akan mempengaruhi dirinya lebih, baik itu dari peran dan peran aktivitasnya dibandingkan dengan seseorang yang tidak mempunyai kedudukan di masyarakat. Demikian juga dengan Pekerjaan, dengan pekerjaan yang dimiliki seseorang, akan memudahkannya melakukan perencanaan pendapatan, baik dalam

penggunaan atau menambah pendapatan. Dengan pendapatan yang tinggi akan semakin meningkatkan status sosial ekonomi seseorang. Pekerjaan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

1. Pekerjaan tetap, yaitu pekerjaan yang dilakukan secara rutin oleh seseorang.
2. Pekerjaan sampingan, yaitu pekerjaan diluar pekerjaan tetap.

Penghasilan atau pendapatan yang diperoleh seseorang selalu berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pendapatan didefinisikan oleh Rochmad Soemitro (1986 : 163) yaitu setiap tambahan ekonomis yang diterima/diperoleh dari suatu usaha yang dapat dicapai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dalam bentuk apapun.

Di dalam masyarakat yang heterogen terdiri dari masyarakat yang berpendapatan / berpenghasilan rendah atau golongan miskin dan masyarakat yang berpendapatan tinggi atau golongan kaya. Penghasilan seseorang dapat diperoleh dari pendapatan pokok, yaitu pendapatan yang diperoleh seseorang dari pekerjaan tetapnya serta pendapatan sampingan, yaitu pendapatan yang diperoleh seseorang dari pekerjaan di luar pekerjaan pokoknya.

Selain pekerjaan dan penghasilan, pendidikan juga berpengaruh pada status seseorang. pendidikan merupakan faktor penting untuk mengembangkan diri seseorang agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman, sehingga dapat mengantisipasi setiap kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan yang tinggi dapat

membantu seseorang untuk mengembangkan diri dan dapat menyerap informasi dalam kegiatan – kegiatan sehari-harinya.

Pendidikan yang dialami seseorang akan mampu mempengaruhi pola pikir seseorang dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Jika dikaitkan dengan partisipasi dan pelaksanaan UU No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, maka seseorang yang berpendidikan tinggi akan lebih mudah menerima, lalu memahaminya, selanjutnya akan menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab dalam membayar PBB, dibanding seseorang yang berpendidikan rendah atau yang sama sekali tidak berpendidikan.

Status masyarakat dan kelompok sering ditandai dengan lambang-lambang status, yang merupakan tanda nyata sebagai isyarat yang memungkinkan para anggota kelompok atau organisasi untuk merasakan status anggota lain secara tepat dan karena itu menjadi pedoman untuk tingkah laku yang tepat. Pada waktunya, lambang-lambang status itu jadi dihormati dan dihargai sendiri sebagai lambang-lambang keberhasilan.

Jadi dengan status / kedudukan di masyarakat, pekerjaan yang baik, penghasilan atau pendapatan yang cukup, serta pendidikan tinggi maka tingkat partisipasi masyarakat dalam hal ini kesadaran masyarakat dalam membayar PBB akan cukup baik pula.

B. HIPOTESIS

Dari uraian perumusan masalah dan kerangka teori, maka dalam penelitian ini akan diajukan beberapa hipotesis yang nantinya akan dibuktikan melalui penelitian ini.

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah hipotesis alternatif (H_a) yaitu :

1. Hipotesis Mayor

Ada hubungan positif variabel sikap, variabel motivasi dan variabel status sosial terhadap variabel partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kabupaten Pati .

2. Hipotesis Minor

- a. Ada hubungan positif variabel sikap terhadap variabel partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kabupaten Pati
- b. Ada hubungan positif variabel motivasi terhadap variabel partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kabupaten Pati
- c. Ada hubungan positif variabel status sosial terhadap variabel partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kabupaten Pati

BAB III

METODE PENELITIAN

A. RANCANGAN PENELITIAN

Dalam melaksanakan suatu penelitian, diperlukan cara kerja yang menjadi pedoman dalam penelitian, yaitu dengan metode penelitian yang berguna untuk memahami obyek yang menjadi sasaran penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatori, yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan menjelaskan dan menyoroti hubungan antar variabel dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

B. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Dalam hubungannya dengan ruang lingkup penelitian ini, maka yang menjadi fokus pembahasan akan dibatasi pada variabel sikap, variabel motivasi, variabel status sosial, dan variabel partisipasi masyarakat dalam membayar PBB

C. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kabupaten Pati dengan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat di Kabupaten Pati, terutama kesadaran dalam membayar PBB, dapat dikatakan belum tinggi dengan indikasi yang telah penulis uraikan pada latar belakang masalah
2. Penulis ingin memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Pati dalam hubungannya peningkatan peran serta masyarakat dalam berpartisipasi membayar PBB

D. VARIABEL PENELITIAN

D.1 KLASIFIKASI VARIABEL

Istilah variabel merupakan istilah yang tidak pernah ketinggalan dalam setiap jenis penelitian. Definisi dari variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi obyek pengamatan dari penelitian dan semua faktor yang digambarkan akan menunjukkan variasi, baik variasi menurut jenisnya atau dapat juga variasi menurut besar kecilnya serta merupakan lambang dari segala sesuatu yang dapat dilengkapi atau distandarkan bilangan tertentu. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independent dan variabel dependent.

Variabel independentnya adalah sebagai berikut :

- ☐ Variabel Sikap (X1)
- ☐ Variabel Motivasi (X2)
- ☐ Variabel Status Sosial (X3)

Variabel dependentnya adalah :

- ☐ Variabel Partisipasi masyarakat (Y)

D.2 DEFINISI KONSEPTUAL

Definisi konseptual dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Partisipasi masyarakat

Adalah keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembayaran PBB.

2. Sikap

Adalah reaksi seseorang terhadap suatu objek tertentu yang terbentuk oleh proses kognisi, afeksi, dan perilaku.

3. Motivasi

Adalah kekuatan - kekuatan yang ada dan bekerja baik pada diri organisme / individu maupun kekuatan yang ada di luar individu sehingga individu tersebut memahami keadaan dirinya untuk menggerakkan dan mengarahkan tingkah lakunya.

4. Status sosial

Adalah kedudukan seseorang yang dilihat pekerjaan, penghasilan, dan pendidikannya.

D.3 DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Partisipasi masyarakat (Y), mempunyai indikator sebagai berikut :

- ❖ Tingkat pengetahuan masyarakat tentang PBB

- ❖ Tingkat kesadaran masyarakat
 - ❖ Ketepatan waktu dalam membayar pajak
 - ❖ Tingkat pelanggaran perpajakan
2. Sikap (X1), dengan indikator sebagai berikut :
- a. Komponen kognisi, meliputi :
 - ❖ Pendapat masyarakat terhadap PBB
 - ❖ Pemahaman masyarakat terhadap pencapaian tujuan pemungutan PBB oleh pemerintah
 - ❖ Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pencapaian tujuan pemungutan PBB oleh pemerintah.
 - ❖ Tingkat keyakinan kepastian Hukum masyarakat tentang UU PBB
 - b. Komponen afeksi, meliputi :
 - ❖ Penerimaan masyarakat terhadap pembayaran PBB
 - ❖ Tingkat persetujuan masyarakat terhadap tata cara pemungutan PBB oleh pemerintah.
 - ❖ Evaluasi atau penilaian masyarakat pada pembayaran PBB
 - c. Komponen perilaku, meliputi :
 - ❖ Tingkat keingintahuan masyarakat pada UU PBB
 - ❖ Tingkat usaha masyarakat dalam membayar PBB
 - ❖ Kecenderungan tindakan masyarakat terhadap pembayaran PBB

3. Motivasi (X2) dengan indikator sebagai berikut :

- ❖ Alasan masyarakat membayar PBB
- ❖ Harapan masyarakat membayar PBB
- ❖ Tingkat dorongan self assessment (menghitung, memungut, dan menyeter sendiri) PBBnya.
- ❖ Tingkat keaktifan pemda setempat dalam menangani masalah PBB

4. Status sosial (X3) dengan indikator :

- a. Jenis pekerjaan yang di miliki masyarakat wajib pajak PBB, di lihat dari :
 - ❖ Pekerjaan tetap
 - ❖ Pekerjaan sampingan
- b. Besarnya pendapatan masyarakat wajib pajak PBB, di lihat dari :
 - ❖ Besarnya pendapatan pokok
 - ❖ Besarnya pendapatan sampingan
 - ❖ Besarnya pengeluaran.
- c. Tingkat pendidikan masyarakat wajib pajak PBB, di lihat dari :
 - ❖ Pendidikan formal yang pernah diikuti masyarakat wajib pajak PBB

E. JENIS DAN SUMBER DATA

Sumber data pada penelitian ini adalah :

1. Sumber data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yakni wajib pajak PBB cara membagikan daftar pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden.

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, yakni dari pejabat yang terkait secara langsung dalam hal PBB, monografi, buku-buku penunjang, laporan-laporan, dokumen-dokumen, data-data dari survey pendahulu.

F. INSTRUMEN PENELITIAN

Pada bagian ini berisi tentang penjelasan alat yang digunakan dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

F.1 Kuesioner (daftar pertanyaan)

Dalam penelitian hal yang sangat penting adalah dalam pengumpulan data, karena merupakan unsur pokok metode penelitian, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data.

Baik buruknya hasil suatu penelitian sebagian tergantung kepada teknik-teknik pengumpulan data (Hadi,1997 : 89). Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat pengukurnya

(Suryabrata,1990:84). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode angket.

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara membagikan daftar pertanyaan pada responden lalu responden mengisi atau menjawabnya.

Fungsi dan ciri angket adalah sebagai alat dan teknik pengumpulan data. Ciri khas angket adalah pengumpulan data melalui daftar pertanyaan tertulis yang disusun dan disebarakan untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari sumber data yang berupa orang atau respondent (Sanapiah Faisal 1981 : 02).

Hadi (1986:158) juga mengatakan bahwa angket merupakan daftar dari sejumlah pertanyaan yang ditujukan kepada subyek penelitian dengan harapan akan dipergunakan untuk mengungkapkan suatu kondisi subyek yang hendak diteliti. Kondisi tersebut terlebih yang bersifat pribadi yang dapat berupa harapan, tekanan, prasangka dan sebagainya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pemakaian angket mendasarkan diri pada anggapan bahwa :

1. Subyek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya.
2. Apa yang dinyatakan subyek pada penyelidik adalah benar dan dapat dipercayakan.
3. Intrepretasi subyek tentang pernyataan yang diajukan kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan peneliti (Hadi, 1997 : 157).

Relevan dengan pendapat tersebut di atas Singarimbun (1982:176) mengatakan bahwa kecuali untuk mengungkap kondisi subyektif, angket juga digunakan untuk mendapatkan validitas dan reliabilitas setinggi mungkin. Angket – angket ini bentuknya adalah pertanyaan – pertanyaan. Setiap pertanyaan subyek atau responden diminta memberikan jawaban yang sesuai dengan kondisi atau keadaan dirinya. Skor bergerak dari satu sampai empat. Pedoman untuk pengukuran adalah jika terdapat jawaban dengan bobot rendah maka diberi skor 1 (satu) dan seterusnya sehingga jawaban yang berbobot tinggi diberi skor 4 (empat). Kriteria jawabannya adalah sebagai berikut :

1. Kategori jawaban yang sangat mendukung diberikan skor 4
2. Kategori jawaban yang mendukung diberikan skor 3
3. Kategori jawaban yang kurang mendukung diberi skor 2
4. Kategori jawaban yang tidak mendukung diberi skor 1

Kategori jawaban dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan.

F.1.2 VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Validitas dan reliabilitas merupakan dua hal yang saling berkaitan erat dan sangat berperan dalam menentukan kualitas suatu alat ukur. Kualitas alat ukur tersebut akan sangat menentukan baik tidaknya suatu hasil penelitian.

F.1.2.1 Validitas

Validitas menunjukkan kepada ketepatan dan kecermatan test dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Pertanyaan mengenai validitas test harus dikembalikan kepada fungsi ukur test tersebut. Suatu test dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila test tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud atau tujuan diadakan test tersebut. Suryabrata (1983:24) mengatakan bahwa suatu alat ukur dinyatakan valid bila alat ukur tersebut mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Prinsip validitas ini menurut Hadi (1986: 117) ada dua yaitu ketelitian dan kejituan. Suatu alat dikatakan teliti bila alat tersebut dapat menunjukkan status atau keadaan gejala dan dapat menunjukkan bagi siapa alat tersebut dimaksudkan, sedangkan suatu alat dikatakan jitu bila alat tersebut dapat menunjukkan dengan tepat gejala atau sebagian gejala yang hendak diukur.

Cara seleksi item yang sering dilakukan dalam berbagai bentuk pengukuran adalah dengan menguji antara skor item dengan skor total. Prosedur ini disebut dengan menggunakan kriteria internal sering pula

dikatakan sebagai validasi dengan pendekatan internal consistency. Sebagai kriterianya dapat digunakan skor total komponen tes (sub tes) atau skor total (Azwar,1986 : 151).

Angket yang digunakan dalam penelitian ini validitasnya diukur dengan menggunakan validitas item yaitu dengan mencari korelasi skor item dengan skor total. Teknik korelasi yang dipakai adalah product Moment dari Pearson. Rumus korelasi Product Moment adalah sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{\Sigma XY - \frac{(\Sigma X)(\Sigma Y)}{N}}{\sqrt{\left\{ \Sigma X^2 - \frac{(\Sigma X)^2}{N} \right\} \left\{ \Sigma Y^2 - \frac{(\Sigma Y)^2}{N} \right\}}}$$

Dimana : r_{xy} : Koeifisien korelasi antara item dan skor total

ΣX : Jumlah nilai tiap item

ΣY : Jumlah skor total tes

N : Banyaknya subyek

Perhitungan validitas menggunakan seri program komputer SPSS dengan pembacaan sebagai berikut :

angka korelasi yang diperoleh di konsultasikan dengan harga r . Dengan subyek (N) = 80, harga kritik $r_{95\%}$ adalah 0,220, $r_{1\%} = 0,286$. Jika harga r yang diperoleh lebih besar dari harga kritik, item dinyatakan valid dan jika harga r yang diperoleh lebih kecil dari harga kritik item dinyatakan gugur. Atau dengan pembacaan komputer dengan menggunakan SPSS dengan ketentuan p yang diperoleh dibawah 0,05 dinyatakan valid dan p diatas 0,05 dinyatakan gugur). untuk angket Status sosial ada beberapa item yang tidak dihitung validitasnya karena item tersebut sebagai filter. Perincian selengkapnya dapat dilihat pada daftar lampiran.

F.1.2.2 Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan kepada pengertian konsistensi hasil ukur. Seberapa jauh suatu test dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten menurut keadaan subyek ukurnya, seberapa jauh suatu test dapat memberikan hasil ukur yang sama terhadap ciri perilaku yang tidak berbeda, merupakan indikator reliabilitas test tersebut. Reliabilitas disebut juga sebagai konsistensi atau stabilitas.

Azwar (2000:4) menjelaskan bahwa pada prinsipnya suatu alat dikatakan reliabel bila alat tersebut mampu menunjukkan sejauhmana pengukuran itu dapat memberikan hasil yang relatif sama bila dilakukan pengukuran kembali terhadap subyek yang sama. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan Suryabrata (1983:3) bahwa reliabilitas alat ukur merupakan keajegan hasil pengukuran sekiranya alat tersebut digunakan pada orang yang sama pada waktu yang berbeda.

Teknik pengukuran reliabilitas dengan menggunakan rumus belah dua Spearman – Brown. Dengan teknik belah dua ganjil genap, peneliti mengelompokkan skor butir bernomor ganjil sebagai belahan pertama dan kelompok skor butir bernomor genap sebagai belahan kedua. Langkah selanjutnya adalah mengkorelasikan skor belahan pertama dengan skor belahan kedua dan akan diperoleh harga r_{xy} . Oleh karena indeks korelasi yang diperoleh baru menunjukkan hubungan antara dua belahan instrumen, maka untuk memperoleh indeks reliabilitas soal masih harus menggunakan rumus Spearman – Brown, yaitu :

$$r_{11} = \frac{2 \times r_{\frac{1}{2} \frac{1}{2}}}{(1 + r_{\frac{1}{2} \frac{1}{2}})}$$

Dimana : r_{11} = reliabilitas instrumen

$r_{\frac{1}{2} \frac{1}{2}}$ = r_{xy} yang disebutkan sebagai indeks korelasi antar dua belahan instrumen.

Dari perhitungan Koefisien Korelasi (r_{xy}) dengan program komputer SPSS antara pertanyaan genap dan pertanyaan ganjil masing-masing angket yaitu angket Partisipasi, angket sikap, angket motivasi dan angket status sosial diperoleh sebagai berikut :

□ Angket partisipasi diperoleh r_{xy} : 0,882

Kemudian dimasukkan ke rumus Spearman – Brown, yaitu

$$r_{11} = \frac{2 \times r_{\frac{1}{2} \frac{1}{2}}}{(1 + r_{\frac{1}{2} \frac{1}{2}})}$$

$$r_{11} = \frac{2 \times 0,882}{(1 + 0,882)}$$

$$r_{11} = \frac{1,764}{1,882} = 0,937$$

□ Angket sikap diperoleh $r_{xy} : 0,929$

Kemudian dimasukkan ke rumus Spearman - Brown, yaitu

$$r_{11} = \frac{2 \times r_{\frac{1}{2} \frac{1}{2}}}{(1 + r_{\frac{1}{2} \frac{1}{2}})}$$

$$r_{11} = \frac{2 \times 0,929}{(1 + 0,929)}$$

$$r_{11} = \frac{1,858}{1,929} = 0,963$$

□ Angket motivasi diperoleh $r_{xy} : 0,897$

Kemudian dimasukkan ke rumus Spearman - Brown, yaitu

$$r_{11} = \frac{2 \times r_{\frac{1}{2} \frac{1}{2}}}{(1 + r_{\frac{1}{2} \frac{1}{2}})}$$

$$r_{11} = \frac{2 \times 0,897}{(1 + 0,897)}$$

$$r_{11} = \frac{1,794}{1,897} = 0,946$$

Dalam menerima suatu kebijakan pemerintah, sikap masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Sikap masyarakat yang mendukung atau tidak mendukung kebijakan tersebut akan berpengaruh pada efektivitas kebijakan itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh George C. Edward II (1991 :30), bahwa :

“ Sikap merupakan faktor yang amat penting untuk suksesnya implementasi. Jika pelaksana berpandangan positif terhadap suatu kebijakan, maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan apa yang dikendaki oleh pembuat kebijakan. Tetapi bila sikap atau perspektifnya berbeda, maka proses implementasi menjadi terancam kesuksesannya”.

Adapun sikap-sikap yang menghambat implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (1991: 33), adalah :

1. Pejabat yang bertanggung jawab tidak tertarik untuk menerapkan hukum yang seharusnya berlaku.
2. Persaingan interes kebijakan diantara para pelaksana.
3. Para pelaksana bersikap selektif terhadap instruksi yang tidak sama dengan sikap atau pandangan mereka akan kebijakan tertentu tersebut.
4. Perbedaan pandang orang juga merintanginya kerja sama di antara badan-badan / orang-orang yang seharusnya bekerja sama melaksanakan kebijakan.
5. Perbedaan pandang antar unit-unit organisasi akan melahirkan hal serupa.

□ Angket status sosial diperoleh $r_{xy} : 0,862$

Kemudian dimasukkan ke rumus Spearman – Brown, yaitu

$$r_{11} = \frac{2 \times r_{\frac{1}{2} \frac{1}{2}}}{(1 + r_{\frac{1}{2} \frac{1}{2}})}$$

$$r_{11} = \frac{2 \times 0,862}{(1 + 0,862)}$$

$$r_{11} = \frac{1,724}{1,862} = 0,926$$

sehingga keempat angket yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel

Penghitungan menggunakan SPSS dapat dilihat pada Daftar lampiran.

F.2 Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian.

F.3 Interview (wawancara)

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada pihak yang sekiranya dapat memberikan keterangan yang diperlukan guna melengkapi penelitian.

G. POPULASI DAN TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL

G.1 Populasi

Populasi meliputi seluruh individu, untuk siapa kenyataan yang diperoleh dari subyek penelitian hendak digeneralisasikan (Hadi,1997:72). Yang dimaksud menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi (DR. Suharsimi Arikunto, 1998:117).

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh wajib pajak PBB di Kabupaten Pati yang berjumlah 607.204 Wajib pajak.

G.1.1 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang merupakan hasil dari populasi. Wakil atau sampel inilah yang dikenai perilaku untuk diambil kesimpulan dari sampel terhadap populasi dapat dicapai kalau diperoleh sampel yang representatif, yaitu sampel yang benar-benar mencerminkan populasinya (Suryabrata,1990:82). Sejalan dengan pendapat tersebut, Hadi (1997:74) juga menjelaskan bahwa sampel harus mempunyai paling sedikit sifat yang sama, baik sifat kodrat maupun sifat pengkhususan. Adapun sample penelitian ini adalah :

1. Unsur sampling.

Yaitu unsur yang diambil sebagai sampel. Dalam penelitian ini adalah masyarakat wajib pajak PBB di Kabupaten Pati .

2. Sampling Fraction

Yaitu pecahan dari sampling frame yang menyatakan besarnya sampel yang akan diambil. Sampelnya adalah wajib pajak PBB di Kabupaten Pati. Besarnya sampel dalam penelitian ini adalah 80 orang responden. Dengan dasar jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Pati berjumlah 21 Kecamatan, kemudian diambil 10 %nya sehingga 2 kecamatan yang akan dikenakan dalam penelitian ini. 2 kecamatan tersebut adalah kecamatan yang sering mempunyai masalah dalam pelunasan atau pembayaran PBB di Kabupaten Pati, dan dipilih kecamatan yang tingkat ekonomi masyarakatnya lebih baik dibanding dengan kecamatan-kecamatan lain yang selalu bermasalah dalam pembayaran PBB serta untuk mengetahui masyarakat di dalam kota (PBB Sektor Perkotaan) dan di daerah (PBB Sektor Perkotaan dan Pedesaan) dalam membayar PBB.

3. Sampling size

Yaitu besarnya sampel yang diambil yaitu berjumlah 80 sampel.

G.2 Teknik Pengambilan Sampel.

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive sampling. Purposive sampling yaitu sampel yang diambil berdasarkan keadaan ciri-ciri tertentu yang dipandang ada

sangkut pautnya dengan keadaan populasi yang diketahui sebelumnya. Di Kabupaten Pati terdapat 607.204 wajib pajak yang tersebar di 21 Kecamatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pati, ada beberapa daerah yang sering memiliki rangking atau peringkat terakhir dalam pelunasan PBB setiap tahunnya. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti masyarakat wajib pajak di Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pati yang selalu bermasalah dalam pelunasan atau pembayaran PBB pada 2 tahun terakhir yaitu tahun 1999 dan 2000, dengan purposive sampling di pilih kecamatan Pati kota dan kecamatan Margoyoso. Kecamatan Pati kota terdiri dari 29 kelurahan/desa sedangkan di Kecamatan Margoyoso terdiri dari 22 kelurahan/desa, kemudian diambil 10% kelurahan/desa dari 2 kecamatan tersebut. Sehingga dari pembulatan angka 10% tersebut ada dua kelurahan/desa dari 2 kecamatan tersebut yang akan di kenakan dalam penelitian ini. Dengan purposive sampling juga ditetapkan 2 desa/kelurahan di 2 kecamatan tersebut dengan pertimbangan atau alasan yang sama yaitu kedua kelurahan/desa di masing-masing kecamatan tersebut sering mengalami permasalahan dalam pembayaran PBB. Kedua kelurahan/desa di masing-masing kecamatan yang dipilih tersebut adalah kelurahan Pati Kidul dan Kutoharjo untuk kecamatan Pati Kota dan kelurahan/desa Bulumanis Kidul dan Pohijo untuk kecamatan Margoyoso. Pengambilan sampel dengan menggunakan random sampling. Perinciannya dapat di lihat pada tabel 1.4

Tabel III.1
Besarnya sampel yang akan diambil

Kecamatan	Kelurahan/desa	Jumlah wajib pajak yang dijadikan sampel
PATI	Pati kidul	20
	Kutoharjo	20
MARGOYOSO	Bulu manis kidul	20
	Pohijo	20

Untuk data rangking pemasukan PBB Per – Kecamatan di Kabupaten Pati dari tahun 1999 dan 2000 dapat di lihat pada daftar lampiran.

H TEKNIK PENGOLAHAN DATA

Proses pengolahan data dalam penelitian ini adalah :

a. Editing

Yaitu kegiatan memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara dan daftar pertanyaan, untuk mengetahui apakah data yang sudah cukup atau perlu adanya pembetulan.

b. Koding.

Yaitu melakukan klasifikasi data dari jawaban responden dengan memberikan kode/symbol serta skor menurut kriteria yang ada.

c. Tabulasi.

Yaitu melakukan pengolahan data ke dalam bentuk tabel dengan memproses hitung frekuensi dari masing-masing kategori.

I. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data dilakukan dengan dua cara, yaitu :

I.1 Analisis data kualitatif

Yaitu menganalisis data-data yang telah dikelompokkan berupa data yang dapat diukur secara langsung kualitasnya. Artinya, analisis ini untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh antara variabel bebas secara kualitatif dengan cara menganalisis data yang ada dalam tabel.

I.2 Analisis data kuantitatif

Yaitu analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang berupa angka-angka dalam prosentase. Artinya, analisis ini untuk mengetahui secara statistik pengaruh antara variabel bebas dan terikat, sehingga selanjutnya digunakan untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang digunakan.

Analisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian (Suryabrata, 1983 : 85). Analisis data adalah cara seorang penyelidik dalam mengolah data yang telah terkumpul, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dari penyelidikannya. Karena data yang diperoleh dari suatu penelitian tidak dapat dipergunakan begitu saja.

Agar data tersebut memberikan rangkuman keterangan yang dipakai, tepat dan teliti maka dibutuhkan suatu pengelolaan lebih lanjut pada data tersebut. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa analisis statistik.

Suryabrata (1983:85) menjelaskan bahwa model analisis statistik yang digunakan harus sesuai dengan rancangan penelitiannya. Dalam hal ini ditentukan oleh hipotesis yang akan diuji dan ujian penelitian. Statistik dalam pengertian metodologi berarti cara-cara ilmiah yang dipersiapkan untuk mengumpulkan, menyusun, menyajikan dan menganalisa data penyelidikan yang berupa angka-angka. Lebih jauh dari pada itu statistik diharapkan dapat menyediakan dasar-dasar yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengambil keputusan.

Pertimbangan menggunakan metode statistik tersebut adalah :

1. Metode statistik bersifat obyektif
2. Metode statistik semakin bersifat universal, sebagaimana yang dinyatakan Suryabrata (1983:95) bahwa makin hari kecenderungan melakukan kuantifikasi dalam penelitian makin besar, dengan demikian peran statistik dalam penelitian juga semakin besar.
3. Metode statistik mempunyai kerangka penelitian lengkap dengan metode teoritis, hipotesis, alat pengumpul data, rancangan penelitian, teknik penentuan sampel sehingga analisis data dapat dilakukan (Suryabrata,1983:95-98).

Sesuai dengan hipotesis yang diuji, maka analisis datanya menggunakan rumus :

❖ Koefisiensi Korelasi Rank Kendall.

Tujuan penggunaan koefisien korelasi rank kendall adalah untuk menguji apakah ada pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent.

Rumusnya :

$$\tau = \frac{S}{0.5N(N-1)}$$

τ = Koefisien Rank Kendall

S = Skor kebenarannya, adalah jumlah Rank yang lebih tinggi- jumlah Rank yang lebih rendah di kiri r

Untuk mengetahui tingkat signifikansi dapat menggunakan rumus :

$$Z = \frac{\tau}{\sqrt{\frac{2(2N+5)}{9N(9N-1)}}}$$

- Menerima Hipotesis jika Z hitung $>$ Z tabel pada taraf kepercayaan 99%
- Menerima Hipotesis jika Z hitung $>$ Z tabel pada taraf kepercayaan 95%

❖ Koefisien Konkordasi Kendall (W)

Koefisien ini digunakan untuk mengukur derajat asosiasi antara variabel X_1 , X_2 , X_3 dan Y secara bersama-sama melalui pengukuran terhadap himpunan-himpunan rankingnya masing-masing variabel yang diasosiasikan secara bersama-sama.

Untuk menghitung harga (W) adalah menggunakan formula di bawah ini :

$$W = \frac{S}{1/12 K^2 (N^3 - N)}$$

Dimana :

S = Jumlah kuadrat deviasi observasi dari mean RJ

$$= \frac{\sum [RJ - ERJ]^2}{N}$$

RJ = Jumlah ranking yang diberikan untuk tiap-tiap N obyek

K = Banyak himpunan ranking penjejangan

N = Banyak obyek atau individu yang diberi ranking

$1/12 K^2 (N^3 - N)$ = Jumlah maksimum yang mungkin dicapai deviasi kuadrat yaitu jumlah S yang dapat terjadi dengan adanya kecocokan sempurna diantara K ranking

Dengan uji signifikansi Chi Kuadrat yaitu :

$$X^2 = K (N-1) W$$

Dimana :

X^2 = Tes Chi Square

W = Koefisien konkordasi kendall

Kemudian hasil perhitungan X^2 tersebut dikonsultasikan terhadap harga-harga kritis Chi-Square dengan db = N - 1

Adapun kriterianya adalah :

- Jika X^2 hitung $\geq X^2$ tabel, maka hubungan yang ada dinyatakan signifikan atau berarti dan sebaliknya

- Jika X^2 hitung < X^2 tabel, maka hubungan tersebut dinyatakan tidak signifikan atau tidak berarti

❖ Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui seberapa besar prosentase atau seberapa besar sumbangan variabel bebas secara bersamaan mempengaruhi variabel terikat.

Rumus :

$$KD = (W^2) \cdot 100\%$$

Keterangan

KD = Koefisien Determinasi

W = Koefisien Konkordasi Kendall

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. TINJAUAN UMUM KABUPATEN PATI

A.1 KEADAAN ALAM DAN IKLIM

Kabupaten Pati salah satu dari 35 daerah kabupaten/kotamadya di Jawa Tengah bagian timur, terletak diantara $100^{\circ},50^{\circ} - 111^{\circ},15^{\circ}$ bujur timur dan $25^{\circ} - 7^{\circ},00^{\circ}$ lintang selatan.

Batas wilayah Kabupaten Pati, sebelah utara dibatasi wilayah kabupaten Jepara dan laut Jawa, sebelah barat dibatasi wilayah kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara, sebelah selatan dibatasi wilayah kabupaten Grobogan dan kabupaten Blora sedangkan sebelah timur dibatasi kabupaten Rembang dan Laut Jawa.

Di lihat dari sumber daya alam Kabupaten Pati mempunyai luas wilayah 149.174 yang terdiri dari 58.504 lahan sawah dan 90. 654 lahan bukan sawah sedangkan dilihat dari tanah, bagian utara terdiri dari tanah Red Yellow, Latosol, Aluvial, Hidromer dan Gromosol. Rincian kecamatan sebagai berikut :

- ❑ Batangan, Sukolilo, Gabus dan Jakenan merupakan tanah Aluvial.
- ❑ Cluwak, gunungwungkal dan Gembong merupakan tanah Latosol.
- ❑ Juwana dan Margoyoso merupakan tanah Aluvial dan Red Yellow mediteran.

- Pati dan Margorejo merupakan tanah Red Yellow mediteran, Latosol, Aaluvial dan Hidromer.
- Kayen dan Tambakromo merupakan tanah Aluvial dan Hidromer.
- Pucakwangi dan Winong merupakan tanah Gromosol dan Hidromer
- Wedarijaksa merupakan tanah Red Yellow mediteran, Alatosol dan Regosol.
- Tayu merupakan tanah Aluvial, Red Yellow dan Regosol
- Tlogowungu merupakan tanah Latosol dan Red Yellow mediteran.

Di lihat dari iklim, rata-rata curah hujan kabupaten Pati di tahun 2000 sebanyak 1.849 mm dengan 98 hari hujan, untuk keadaan hujan cukup, sedangkan untuk temperatur terendah 24°C dan tertinggi 39°C . wilayah Kabupaten Pati mempunyai ketinggian 380 meter dpl, sedang rata-ratanya kurang lebih 17 meter dpl.

Hasil pendataan Sensus Penduduk 2000 menunjukkan bahwa desa/kelurahan di Kabupaten Pati berjumlah 400 desa dan 5 kelurahan. Sebagian desa/kelurahan juga ada 5 kawedanan, 21 kecamatan. Tingkat klasifikasi perkembangan desa/kelurahan di kabupaten Pati hanya 1 yaitu swasembada.

A.2 PENDUDUK DAN TENAGA KERJA

A.2.1 Penduduk menurut jenis kelamin

Penduduk kabupaten Pati sebanyak 1.172.562 jiwa.

Pertambahan jumlah penduduk kabupaten Pati dari tahun 1995

s/d tahun 2000 mengalami kenaikan sebanyak 1,84% dari 1.120.432 menjadi 1.172.562. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin baik laki-laki dan perempuan terus mengalami peningkatan dan dari tahun ke tahun jumlah penduduk laki-laki tetap lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk perempuan. Besarnya rasio / perbandingan jenis kelamin pada tahun 1995 adalah 96,76 sedangkan pada pertengahan tahun 2000, angka rasio jenis kelamin mengalami sebanyak 0,23 % karena angka sex rasio pada pertengahan tahun 2000 sebanyak 96,99 %

Secara administratif kabupaten Pati dibagi menjadi 21 Kecamatan, dari 21 kecamatan tersebut kecamatan Pati mempunyai penduduk terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya yaitu sebanyak 99.175 jiwa. Selanjutnya disusul kecamatan Juwana dengan penduduk sebanyak 78.541 jiwa, kecamatan Sukolilo 73.802 jiwa, kecamatan Kayen 69.005

A.2.2 Mutasi penduduk

a. Kepadatan penduduk

Luas wilayah kabupaten Pati adalah 149.174 km². jika dibandingkan dengan jumlah penduduk maka kepadatan penduduk kabupaten Pati adalah 786 jiwa per km². kepadatan penduduk per kecamatan cukup bervariasi sesuai dengan luas masing-masing wilayah. Kecamatan Pati mempunyai

Kepadatan penduduk terbesar yakni mencapai 2,334 jiwa per km²

b. Kelahiran dan Kematian

Data penduduk yang lahir dan meninggal juga dikumpulkan dalam registrasi penduduk walaupun disadari bahwa pencatatan penduduk yang lahir dan yang meninggal masih sangat lemah. Hal ini dikarenakan banyak kejadian kelahiran dan kematian yang tidak dilaporkan oleh masyarakat kepada pemerintahan desa.

Tabel IV.1
Angka Kelahiran dan Kematian Penduduk Kabupaten Pati

Tahun	Kelahiran		Kematian	
	Jumlah	Angka lahir (CBR)	Jumlah	Angka mati (CDR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2000	11.188	9	5.564	5
1999	9.721	8	4.447	5
1998	9.763	8	5.252	5
1997	9.853	9	5.321	5
1996	12.929	11	5.454	5
1995	11.910	11	5.714	5

Keterangan : CBR(Crude Birth Rate)Angka kelahiran kasar
CDR (Crude Death Rate) Angka Kematian Kasar
Sumber : BPS Kabupaten Pati tahun 2000

Dari registrasi pertengahan tahun 2000 di kabupaten Pati penduduk yang lahir adalah 11.188 jiwa, sedangkan yang meninggal adalah sebanyak 5.564 jiwa. Angka kelahiran kasar (Crude Birth Rate) menyatakan jumlah kelahiran per 1000 penduduk dalam satu tahun di daerah sedangkan angka kematian kasar (Crude Death Rate) digunakan untuk menyatakan jumlah kematian penduduk dalam satu tahun

disuatu daerah. Angka kelahiran dan kematian adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya penduduk yang lahir dan mati selama 1 (satu) tahun dari setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun tersebut.

Tabel IV.2
Batasan Tentang Penggolongan
Angka Kelahiran dan Kematian

Angka kelahiran	Angka kematian
75-125 tergolong tinggi	9-13 tergolong rendah
34 – 74 tergolong sedang	14 – 18 tergolong sedang
kurang dari 34 tergolong rendah	19 dan lebih tergolong tinggi

Sumber : BPS Kabupaten Pati tahun 2000

Maka dari tabel angka kelahiran dan kematian penduduk diatas menunjukkan bahwa angka kelahiran dan kematian penduduk kabupaten Pati relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah sangat baik.

A.2.3. Sex Ratio

Sex Ratio adalah angka/ bilangan yang menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki terhadap 1000 penduduk perempuan. Tabel dibawah ini menunjukkan keadaan sex ratio penduduk kabupaten Pati untuk tahun 1995 s/d 2000 menurut jenis kelamin dan menurut dewasa dan anak.

Tabel IV.3
Jumlah Penduduk, Sex Ratio dan Pertumbuhan Penduduk
Menurut Jenis Kelamin Tahun 1995 - 2000

Tahun	Penduduk			Pertumbuhan penduduk	SEX RATIO
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2000	577.968	594.594	1.172.562	1,84	97,20
1999	570.960	589.237	1.160.197	0,70	96,80
1998	566.609	585.758	1.152.367	0,46	96,70
1997	561.931	583.289	1.147.115	0,39	96,70
1996	561.931	580.752	1.142.683	1,99	96,70
1995	548.968	571.464	1.120.432	0,58	96,10

Sumber : BPS Kabupaten Pati tahun 2000

A.2.4 Penduduk Menurut Kewarganegaraan

Di Kabupaten Pati terdapat 107 jiwa warga negara asing, Bila dirinci menurut kecamatan maka dari jumlah WNA tersebut kecamatan Cluwak merupakan daerah dengan WNA terbanyak yakni sebesar 59 jiwa sedangkan daerah WNA yang paling sedikit adalah kecamatan Wedarijaksa yaitu sebanyak 3 jiwa.

A.2.5 Ketenagakerjaan

Profil ketenagakerjaan di Kabupaten Pati selama tahun 1995-2000 diwarnai oleh rendahnya TPAK, yang bahkan mengalami penurunan, turunnya angka pengangguran terbuka, serta masih dominannya sector pertanian sebagai penyerap tenaga kerja. Sampai saat ini sector pertanian masih tetap merupakan penyerap tenaga kerja terbesar.

A.3 SOSIAL

A.3.1 Pendidikan dan Kebudayaan

Selama kurun waktu 1995-2000 rata-rata murid sekolah dasar (SD) mengalami proses naik turun, pada tahun 1995 sebanyak 157, ditahun 1996 dan 1997 mengalami penurunan yaitu 152 di tahun 1996 dan 149 di tahun 1997, tahun 1998 mengalami kenaikan lagi yaitu sebanyak 150, sedangkan di tahun 1999 dan 2000 mengalami penurunan kembali, 145 di tahun 1999 dan 148 di tahun 2000. Sedangkan untuk rata-rata murid SLTP dan SLTA mengalami kenaikan, itu berarti program wajib belajar sudah menampakkan hasilnya.

A.3.2 Kesehatan dan Keluarga Berencana

Persentase wanita (15-44) berstatus kawin yang sedang menggunakan alat KB menurun dari 79,79% di tahun 1996 menjadi 77,66 ditahun 2000. Persentase peserta KB aktif tertinggi adalah kecamatan Pati yaitu mencapai 13,011 %.

A.3.3 Agama

Jumlah Masjid dan langgar di Kabupaten Pati mengalami kenaikan pada tahun 2000 karena pada tahun – tahun sebelumnya jumlahnya relatif sama, sedangkan untuk sarana peribadatan yang lainnya masih tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

A.4 PERTANIAN

Produksi sub sektor tanaman pangan pada tahun 2000 mengalami penurunan. Tanaman padi sawah sebanyak 511.672 ton pada tahun 1999 dan 511.161 ton pada tahun 2000, padi gogo pada tahun 1999 sebanyak 9.419 ton sedangkan pada tahun 2000 sebanyak 7.396 ton. Untuk tanaman jagung, ketela pohon, ketela rambat, kedelai, kacang hijau, buah-buahan serta tanaman sayuran juga mengalami proses penurunan. Sedangkan untuk tanaman kacang tanah mengalami kenaikan dari 4.733 ton pada tahun 1999 menjadi 5.383 ton pada tahun 2000

Dari sub sektor peternakan, populasi ternak sapi juga mengalami penurunan yaitu dari tahun 1999 sebanyak 75.022 ekor menjadi 74.296 ekor pada tahun 2000, sedangkan ternak kerbau mengalami kenaikan sebanyak 500 ekor dari tahun 1999 ke tahun 2000.

Produksi kayu jati di perum perhutani KPH Pati mengalami kenaikan yang sangat pesat. Dari produksi tersebut menghasilkan pal kasar (A10, DK tak bernomor (AII), dk bernomor (AIII). Pal kasar sebanyak 6.089.614 m³ pada tahun 2000, jika dibandingkan dengan tahun 1999 bisa dikatakan mengalami kenaikan yang sangat besar karena di tahun 1999 banyaknya hanya 3.545.000 m³.

A.5 INDUSTRI

Unit usaha industri besar (tenaga kerja 100 orang) sebanyak 19 buah di tahun 2000, itu berarti dari tahun 1998 s/d 2000 tidak

mengalami proses naik dan turun. Sedangkan unit usaha industri sedang (tenaga kerja 20-99 orang) mengalami kenaikan pada tahun 2000 sebanyak 183 buah sedangkan pada tahun 1999 sebanyak 143 buah. Untuk unit usaha industri besar/sedang sebanyak 202 buah pada tahun 2000.

A.6 PERHUBUNGAN

Panjang jalan di kabupaten Pati 691,415 km, terdiri dari jalan negara 48,725 km, jalan propinsi 98,73 km, dan jalan kabupaten 543,96 km. Di lihat dari kondisinya, jalan di Kabupaten Pati sudah mengalami pembaharuan, karena pada tahun yang lalu jalan yang diaspal baru 583,89 km sedangkan sekarang sudah 629,965 km. Jalanan kerikil 54,95 km sedangkan tanah 6,50 km.

A.7 KEUANGAN

Realisasi Penerimaan Asli daerah Sendiri (PADS) kabupaten Pati tahun anggran 2000 dari berbagai sector sebanyak 124.561.567.867,-.

A.8 EKONOMI

Angka pendapatan regional, hingga saat ini masih dipakai, baik oleh negara maju maupun negara berkembang, sebagai satuan ukuran kemakmuran rakyat. Jika pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dengan angka pendapatan regional atas dasar harga konstan itu tinggi,

menurut pengamatan penduduk di wilayah bersangkutan adalah makmur. Tetapi di suatu wilayah yang telah makmur biasanya pertumbuhan ekonominya tidak pernah tinggi, stabil pada peringkat tertentu tetapi penduduk dalam keadaan sejahtera jika dilihat dari kecukupannya di bidang ekonomi mereka. Dilihat dari perhitungan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Pati tahun 1997-1999 atas dasar harga berlaku adalah 8,06 %.

B. HASIL PENELITIAN DALAM TABEL TUNGGAL

B.1. VARIABEL PARTISIPASI MASYARAKAT

Partisipasi merupakan keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan dalam pembangunan. Dengan kata lain, kebijakan-kebijakan pemerintah hanya bisa berjalan sebagaimana mestinya bila ada partisipasi dari masyarakat, dalam hal ini kesadaran dalam membayar PBB

Tabel IV.4
Tingkat Pengetahuan masyarakat tentang PBB

No	Kategori Jawaban	Jumlah Dalam angka	Jumlah Dalam prosentase
01	Sangat mengetahui	14	17,5
02	Mengetahui	61	76,25
03	Kurang mengetahui	4	5
04	Tidak mengetahui	1	1,25
	Jumlah	80	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan no.1

Menurut Soerjono Soekanto (1978:5) tingkat partisipasi dalam membayar PBB dapat dilihat dari tingkat pengetahuan/knowledge masyarakat. Dari tabel IV.7 diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat mengetahui tentang pajak bumi dan bangunan. Dari 80 responden yang menyatakan mengetahui sebanyak 61 atau 76,25% sedangkan yang menyatakan sangat mengetahui tentang PBB sebanyak 14 orang atau 17,5%, Responden yang kurang mengetahui dan tidak mengetahui masing-masing berjumlah 4 orang responden atau 1,25% dan 1 responden atau 1,25%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang PBB cukup tinggi. Adanya responden yang kurang mengetahui dan tidak mengetahui dikarenakan selama ini kurang terlibat langsung dalam hal ini dan karena mereka sekedar mengerti pembayarannya saja.

Sedangkan tingkat pengetahuan tata cara pembayarannya juga cukup tinggi, hal ini ditunjukkan dari 20 responden yang sangat tahu atau sebesar 25 % dan 59 responden atau 73,75% tahu tata cara pembayarannya sedangkan responden yang kurang tahu sebesar 1 orang responden atau 1,25 %.(diolah dari jawaban pertanyaan no.2). Informasi tentang tata cara perpajakan PBB dan mekanisme pembayarannya sebagian besar diperoleh dari kegiatan membaca buku / artikel tentang PBB dan dari media masa. Dan ada yang mengetahui dari petugas saat pendataan objek pajak (pengukuran tanah dan bangunan), bertanya pada petugas dikelurahan atau saat formulir SPPT dibagikan. Di dalam

memahami cara pembayaranpun masyarakat mengalami kemudahan. Hal ini dapat ditunjukkan dari 52 responden atau 65% mudah memahami, 26 responden atau 32,5% sangat mudah memahami dan sebanyak 2 responden atau 2,5% sulit memahaminya (diolah dari jawaban pertanyaan no 4). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mudah dimengerti atau relatif tidak ada kesulitan bagi masyarakat.

Tabel IV.5
Tingkat Kesadaran Masyarakat untuk membayar PBB

No	Kategori Jawaban	Jumlah Dalam angka	Jumlah Dalam prosentase
01	Sangat Sadar	14	17,5
02	Sadar	66	82,5
03	Kurang Sadar	-	-
04	Tidak sadar	-	-
	Jumlah	80	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan no.5

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar PBB sudah cukup tinggi. Dari 80 orang responden, ada 66 orang responden atau 82,5% yang menyatakan sadar akan kewajibannya untuk membayar PBB dan 14 orang responden atau 17,5% menyatakan sangat sadar. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah untuk memungut PBB dapat dipahami oleh masyarakat dan masyarakat dapat mengerti arti penting partisipasinya dalam pembangunan, dan ini sesuai dengan pernyataan Sondang P. Siagian tentang pentingnya partisipasi masyarakat, yakni Partisipasi dari masyarakat luas mutlak diperlukan, oleh karena itulah pada akhirnya

melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, rakyat banyak memegang peranan sekaligus sebagai objek dan subjek pembangunan. (Khairuddin, 1992 :125)

Tabel IV.6
Tingkat Kerelaan
mengeluarkan dana khusus untuk membayar PBB

No	Kategori Jawaban	Jumlah Dalam angka	Jumlah Dalam prosentase
01	Sangat rela	23	28,75
02	Rela	54	67,5
03	Kurang rela	1	1,25
04	Tidak rela	2	2,5
	Jumlah	80	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan no.6

Dalam kerelaan membayar PBB diketahui bahwa sebagian besar masyarakat rela untuk mebayar PBB, dari 80 orang responden menyatakan rela sebanyak 54 orang atau 67,5%, dan 23 orang menyatakan sangat rela atau 28,75% sedangkan yang kurang rela 1 orang responden atau 1,25% dan tidak rela sebanyak 2 responden atau 2,5%. Alasan masyarakat yang menyatakan kurang rela atau tidak rela, dikarenakan pembangunan yang dilaksanakan ini belum merata dan penggunaanya kurang tepat sasaran .

Sedang tingkat kesediaan membayar PBB dari 80 responden menyatakan 21 responden atau 26,25% sangat bersedia dan sebanyak 53 responden atau 66,25% bersedia dan ada 6 responden atau 7,5% yang kurang bersedia. (diolah dari jawaban pertanyaan no 7). Kurang bersedia masyarakat dalam membayar PBB dikarenakan uang atau

pajak yang dibayarnya tidak benar-benar untuk pembangunan dan disalahgunakan oleh aparat, sehingga dalam hal ini perlu adanya peningkatan pemberian informasi, komunikasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh aparat/pemda setempat kepada masyarakat sehingga dengan adanya peningkatan informasi kepada masyarakat diharapkan juga ada peningkatan partisipasi dari masyarakat karena keterlibatan aktif masyarakat berarti keterlibatan dalam proses proses penentuan arah, strategi, dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah (Bintoro Tjokroamidjojo, 1989:207)

Di lihat dari tingkat kesediaan masyarakat untuk mentaati/mematuhi UU tentang PBB, sebagian besar masyarakat mematuhinya dengan 55 responden atau 68,75% menyatakan mentaati, 17 responden atau 21,25% menyatakan sangat mentaati, 6 responden atau 7,5% menyatakan kurang mentaati dan 2 responden atau 2,5% tidak mentaati.(diolah dari jawaban pertanyaan no.8). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden wajib pajak PBB merupakan masyarakat wajib pajak yang taat hukum walaupun ada masyarakat yang melanggar UU PBB, sehingga masih perlu adanya peningkatan peran, khususnya peran aparat baik aparat Desa/Kelurahan dan aparat pemda setempat dalam menindak masyarakat yang melakukan pelanggaran.

Tabel IV.7
Tingkat keterlambatan Masyarakat
Sesudah Tanggal Jatuh Tempo Membayar PBB

No	Kategori Jawaban	Jumlah Dalam angka	Jumlah Dalam prosentase
01	Tidak Pernah	20	25
02	Kadang-kadang	38	47,5
03	Sering	22	27,5
04	Sangat sering	-	-
	Jumlah	80	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan no.9

Dari tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar responden, terkadang terlambat sesudah jatuh tempo pembayaran dalam membayar PBB dengan jumlah 38 responden atau 47,5%, 22 responden atau 27,5 % menyatakan sering terlambat dalam membayar PBB dan 20 responden atau 25 % menyatakan tidak pernah terlambat dalam membayar PBB.

Tabel IV.8
Tingkat Ketepatan Waktu
Sebelum Jatuh Tempo Dalam membayar PBB

No	Kategori Jawaban	Jumlah Dalam angka	Jumlah Dalam prosentase
01	Selalu tepat waktu	21	26,5
02	Tepat waktu	55	68,75
03	Kadang-kadang Tidak tepat waktu	4	5
04	Selalu tidak tepat waktu	-	-
	Jumlah	80	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan no.10

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 21 orang responden atau 26,5% menyatakan selalu tepat waktu dalam melunasi PBB-nya sebelum tanggal jatuh tempo. Dan 55 orang responden atau 68,75% menyatakan tepat waktu sedangkan 4 orang responden atau 5% menyatakan kadang-

kadang tidak tepat waktu. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah cukup disiplin dalam membayar PBB-nya sebagai wujud dari warga negara yang baik. Dengan membayar PBB melaksanakan UU No. 12 Tahun 1985 serta suatu kewajiban masyarakat sebagai bentuk dari partisipasi masyarakat.

Sedangkan mereka yang kadang-kadang terlambat dalam membayar PBB, karena alasan, antara lain keuangan mereka yang tidak memungkinkan saat itu, jumlah nominal PBB yang selalu naik tiap tahun, lupa karena sibuk. Oleh karena itu keringanan jumlah PBB amat diinginkan oleh masyarakat, dan Pemda setempat harus senantiasa persuatif kepada masyarakat untuk segera melunasi PBBnya.

Tabel IV.9
Tingkat Pelanggaran Perpajakan

No	Kategori Jawaban	Jumlah Dalam angka	Jumlah Dalam prosentase
01	Tidak pernah	18	22,5
02	Kadang-kadang	53	66,25
03	Sering	9	11,25
04	Sangat Sering	-	-
	Jumlah	80	100

Sumber : diolah dari jawabn pertanyaan No.11

Dari tabel tersebut dapat dilihat dari tingkat pelanggaran perpajakan menunjukkan bahwa 9 responden atau 11,25% sering melakukan pelanggaran, 52 responden atau 66,25% terkadang melakukan pelanggaran, dan 18 responden atau 22,5% tidak pernah melakukan pelanggaran. Dalam pelanggaran –pelanggaran perpajakan ini banyak disebabkan oleh engganannya masyarakat untuk membayar

pajaknya dikarenakan karena hasil tambak atau tanah pertanian yang dimilikinya tidak menghasilkan panen, bahkan masyarakat mengalami suatu kerugian sedangkan mereka diwajibkan membayar pajak, sedangkan mereka mampu untuk membayar denda administrasi yang dibebankan kepada mereka. Selain itu adanya klasifikasi tanah maupun rumah yang kurang tepat dan itu disamakan dengan daerah atau rumah yang lain, yang lebih produktif serta rumah yang bagus. Hal ini perlu adanya pendataan yang lebih seksama dan sanksi bagi pelanggar UU PBB serta peningkatan peranan aparat, baik aparat kelurahan/ desa maupun pemda setempat untuk meningkatkan perannya agar pelaksanaan UU PBB dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuannya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan agar partisipasi masyarakat benar-benar dapat terwujud, meliputi mengadakan atau melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal dari perubahan sosial, mempersiapkan atau menyerap atau menerima dalam arti keluhan dari masyarakat serta dalam hal pengambilan keputusan (Talizidhuhu Ndraha, 1987:102)

Berdasarkan tabel-tabel diatas, berikut ini disajikan data-data tersebut secara keseluruhan dengan maksud untuk menilai tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar PBB.

Tabel IV.10
Data Keseluruhan Variabel Partisipasi Masyarakat

No.	Variabel partisipasi masyarakat	Kategori Skor				Uraian
		4	3	2	1	
01	Tingkat pengetahuan masyarakat tentang PBB	14	61	4	1	<input type="checkbox"/> Masih ada masyarakat yang kurang mengetahui dan tidak tahu tentang PBB
02	Tingkat Kesadaran Masyarakat untuk membayar PBB	14	66	-	-	<input type="checkbox"/> Sebagian besar masyarakat cukup sadar membayar PBB
03	Tingkat kerelaan mengeluarkan dana khusus	23	54	1	2	<input type="checkbox"/> Sebagian besar masyarakat rela mengeluarkan dana untuk membayar PBB
04	Tingkat keterlambatan sesudah jatuh tanggal tempo membayar	20	38	22	-	<input type="checkbox"/> Sebagian besar masyarakat terkadang terlambat dan sering terlambat dalam membayar PBB
05	Tingkat ketepatan waktu sebelum tanggal jatuh tempo dalam membayar PBB	21	55	4	-	<input type="checkbox"/> Sebagian besar masyarakat tepat waktu dalam membayar PBB walaupun ada yang terkadang tidak tepat waktu dalam pembayaran nya
06.	Tingkat pelanggaran perpajakan mentaati UU PBB	18	53	9	-	<input type="checkbox"/> sebagian besar masyarakat terkadang melakukan pelanggaran dan sering melakukan pelanggaran

Sumber : Di olah dari jawaban pertanyaan no. 1-13

Dari data di atas dapat dinyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kabupaten Pati dapat dilihat dari tingkat pengetahuan masyarakat tentang PBB dan mekanisme pembayarannya yang cukup baik. Kesadaran masyarakat untuk membayar PBBpun cukup baik yang sebagian besar merupakan kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik, yang taat pada peraturan pemerintah, sehingga mereka merasa rela, bersedia untuk mengeluarkan dana khusus untuk melunasinya, walaupun sebagian besar masyarakat terkadang terlambat dalam membayar PBB dan masih ada masyarakat yang tidak tepat waktu dalam membayar selain itu juga masih ada beberapa masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga dibutuhkan peran aktif dari pada penda setempat untuk menindak masyarakat yang melanggar UU PBB.

Kalau dilihat menurut pendapatnya Sondang P. Siagian yang membagi partisipasi dalam dua bentuk yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif, dari penjelasan diatas dapat ketahu bahwa masyarakat di Kabupaten Pati dalam berpartisipasi membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat dikatakan dalam kategori demikian.

Partisipasi pasif : berarti bahwa dalam sikap, perilaku, dan tindakannya, rakyat melakukan hal-hal yang tidak dapat menghalangi kelancaran roda pembangunan nasional, sedangkan partisipasi aktif, dapat terwujud dalam berbagai hal bentuk, antara lain :

- a. Turut memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan lembaga-lembaga sosial dan politik yang ada di masyarakat sebagai saluran aspirasinya.
 - b. Menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi dengan tidak menyerahkan penentuan nasibnya kepada orang lain, seperti kepada pimpinan dan tokoh masyarakat yang ada, baik bersifat formal maupun informal.
 - c. Memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab, seperti membayar pajak secara jujur serta kewajiban lainnya.
 - d. Ketaatan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan demi kepentingan bersama yang lebih luas dan lebih matang.
- (Sondang P. Siagian, 1984 : 32-33)

Berdasarkan data-data yang disampaikan diatas, berikut akan dilihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kabupaten Pati dari 80 responden. Untuk menilai tinggi rendahnya variabel tersebut, maka digunakan tingkat pengukuran interval. Pada variabel partisipasi masyarakat terdapat 13 pertanyaan. Jawaban dalam setiap pertanyaan memiliki jenjang skor 1 sampai 4, dengan kategori jawaban : sangat tinggi, tinggi, kurang tinggi, rendah. Lalu, skor dari masih-masing pertanyaan dijumlahkan untuk mendapatkan akumulasi skor. Kemudian dicari nilai tertinggi dan nilai terendah, dengan hasil sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 R &= \text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah} \\
 &= 52 - 33 \\
 &= 19
 \end{aligned}$$

Untuk menentukan lebar interval kelas pada tiap kategori, digunakan rumus sebagai berikut :

$$I = \frac{R}{K}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{19}{4} \\
 &= 4,75
 \end{aligned}$$

Keterangan :

R = Range (jarak pengukuran)

I = Lebar Interval

K = Kelas Interval

Dari perhitungan tersebut, dapat ditentukan lebar interval kelas dengan 4 kelas interval yang menghasilkan distribusi frekuensi sebagai berikut :

Tabel IV.11
Klasifikasi Skor
Berdasarkan Nilai Terendah dan Nilai Tertinggi
Variabel Partisipasi Masyarakat

No.	Kategori Jawaban	Notasi	Lebar Interval Kelas
1	Sangat tinggi	ST	47,26 - 52
2	Tinggi	T	42,5 - 47,25
3	Kurang Tinggi	KT	37,76 - 42,5
4	Rendah	R	33 - 37,75

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dihitung rekapitulasi data variabel partisipasi masyarakat yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel IV.12
Rekapitulasi Data Variabel Partisipasi Masyarakat

No.	Kategori jawaban	Jumlah	
		Angka	Prosentase
1	Sangat tinggi	10	12,5
2	Tinggi	13	16,2
3	Kurang Tinggi	47	58,8
4	Rendah	10	12,5
Jumlah		80	100

Sumber : Diolah dari jawaban pertanyaan no. 1-13

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari hasil penelitian pada variabel partisipasi masyarakat adalah sebanyak 47 atau 58,8% responden termasuk dalam kategori kurang tinggi, 10 atau 12,5% responden dalam kategori rendah, 13 atau 16,3% responden termasuk kategori tinggi, dan 10 atau 12,5 responden termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan kondisi yang kurang tinggi untuk variabel partisipasi masyarakat dalam membayar PBB, dengan pembuktian antara lain :

1. Masih ada masyarakat yang kurang mengetahui dan tidak mengetahui tentang PBB dan cara pembayarannya.
2. Masih ada masyarakat yang kurang rela dan tidak rela mengeluarkan dana untuk membayar PBB
3. Sebagian besar masyarakat terkadang terlambat / tidak tepat waktu dalam membayar PBB
4. Sebagian besar masyarakat terkadang dan sering melakukan pelanggaran perpajakan.

Demikianlah hal-hal yang membuktikan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di kabupaten Pati kurang baik.

B.3 HASIL PENELITIAN DALAM TABEL TUNGGAL VARIABEL SIKAP

Sikap berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Masyarakat yang memiliki sikap yang positif atau mendukung akan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dengan membayar PBB tepat pada waktunya dan masyarakat yang memiliki sikap negatif atau tidak mendukung, maka mereka enggan membayar PBB atau terlambat melunasinya.

David O. Sears dkk menyatakan bahwa sikap terhadap obyek, gagasan atau orang tertentu merupakan orientasi yang bersifat menetap dengan komponen-komponen kognitif, afektif, dan perilaku. Komponen kognitif terdiri dari seluruh kognisi yang dimiliki seseorang mengenai objek sikap tertentu, fakta, pengetahuan, dan keyakinan tentang obyek.

Komponen afektif terdiri dari seluruh perasaan atau emosi seseorang terhadap objek terutama penilaian. Komponen perilaku terdiri dari kesiapan seseorang untuk bereaksi atau kecenderungan untuk bertindak terhadap objek (1999 :138)

Dari pendapat David O. Sears dkk tersebut, sikap masyarakat terhadap UU PBB dapat ditunjukkan pada tabel-tabel dibawah ini :

Tabel IV.13
Pendapat Masyarakat Terhadap Pemungutan PBB

No	Kategori Jawaban	Jumlah Dalam angka	Jumlah Dalam prosentase
01	Sangat Baik	20	25
02	Baik	59	73,75
03	Kurang baik	1	1,25
04	Tidak baik	-	-
	Jumlah	80	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan No.14

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 59 responden atau 73,75% menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap pemungutan PBB yang dilakukan oleh pemerintah oleh pemerintah dipersepsikan baik, 20 responden atau 25% menyatakan sangat baik, dan 1 responden atau 1,25% menyatakan kurang baik.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan kesamaan pendapatnya terhadap pemungutan PBB. Sedangkan pendapat masyarakat terhadap prosedur atau cara pembayaran PBB yang menyatakan setuju sebanyak 52 atau 65% , yang menyatakan sangat setuju sebanyak 25 responden atau 31,25% dan yang menyatakan kurang setuju sebanyak 3 responden atau 3,75%. (Diolah dari jawaban pertanyaan No.

15). Responden yang menyatakan kurang baik dikarenakan pengetahuan dan pengalaman responden selama ini yang sering terjadi ketidaksesuaian antara UU tentang PBB dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

Tabel IV.14
Tingkat Kemudahan Masyarakat memahami Prosedur
Pembayaran PBB

No	Kategori Jawaban	Jumlah Dalam angka	Jumlah Dalam prosentase
01	Sangat merasakan	23	28,75
02	Merasakan	55	68,75
03	Kurang merasakan	2	2,5
04	Tidak merasakan	-	-
	Jumlah	80	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan No.16

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 55 responden atau 68,75 % menyatakan merasakan kemudahan dalam memahami prosedur pelaksanaan pembayaran PBB, 23 responden atau 30% menyatakan sanagt merasakan kemudahan dan 2 responden atau 2,5% menyatakan kurang merasakan atau mengalami kesulitan. Masyarakat yang merasakan kesulitan antara lain karena ada beberapa prosedur yang berubah dari UU PBB yang sekarang dengan lama dan kurangnya informasi yang mereka dapatkan berkenaan dengan masalah tersebut.

Tabel IV.15
Tingkat Persetujuan Masyarakat
Terhadap Tata Cara Pemungutan PBB Oleh Pemerintah

No	Kategori Jawaban	Jumlah Dalam angka	Jumlah Dalam prosentase
01	Sangat setuju	25	31,25
02	Setuju	49	61,25
03	Kurang setuju	6	7,5
04	Tidak setuju	-	-
	Jumlah	80	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan No.17

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden / masyarakat selama ini setuju dengan tata cara pemungutan PBB yang dilakukan oleh pemerintah, dari 80 responden menyatakan setuju sebanyak 49 responden atau 61,25%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 25 responden atau 31,25% sedangkan yang kurang setuju sebanyak 6 responden atau 7,5%. Masyarakat merasa setuju dengan tata cara pemungutan PBB yang berjalan selama ini sebab dianggap cukup sederhana, sedangkan masyarakat yang kurang setuju dengan tata cara tersebut karena menurut mereka akan lebih mudah dan murah lagi bila ada petugas pemungut PBB yang bertugas memungut PBB dari rumah ke rumah.

Tabel IV.16
Tingkat Pemahaman Tujuan / Pentingnya
Pemungutan PBB Yang Dilakukan Pemerintah

No	Kategori Jawaban	Jumlah Dalam angka	Jumlah Dalam prosentase
01	Sangat paham	18	22,5
02	Paham	49	61,25
03	Kurang Paham	11	13,75
04	Tidak Paham	2	2,5
	Jumlah	80	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan No.19

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 49 responden atau 61, 25 menyatakan paham akan tujuan pemungutan PBB, 18 responden atau 22,5 % menyatakan sangat paham , 11 responden atau 13,75% menyatakan kurang paham dan 2 responden atau 2,5% menyatakan tidak paham. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memahami untuk apa mereka membayar PBB, sedangkan yang kurang paham atau tidak

memahami karena mereka tidak banyak mengetahui informasi tentang PBB, antara lain karena kurangnya masyarakat membaca artikel/ buku, kurangnya keinginan masyarakat untuk mengetahui informasi tentang PBB, kurangnya media yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang PBB, dan lain sebagainya.

Tabel IV.17
Tingkat Kepercayaan/Keyakinan Masyarakat Terhadap
Pencapaian Tujuan Pemungutan PBB oleh Pemerintah

No	Kategori Jawaban	Jumlah Dalam angka	Jumlah Dalam prosentase
01	Sangat percaya	24	30
02	Percaya	50	62,5
03	Kurang percaya	5	6,25
04	Tidak percaya	1	1,25
	Jumlah	80	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan No.20

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 50 responden atau 62,5% menyatakan percaya / yakin bahwa tujuan pemungutan PBB dapat tercapai, 24 responden atau 30% menyatakan sangat percaya, sedangkan 5 responden atau 6,25 % dan 1 responden atau 1,25 % menyatakan kurang percaya dan tidak percaya.

Masyarakat yang merasa kurang atau tidak percaya/yakin memberi alasan antara lain karena pemerintah selama ini belum memperlihatkan hasil seperti yang diharapkan, seperti masih terjadinya penyalahgunaan uang negara sehingga penggunaan hasil pajak akan digunakan tidak pada sasarannya.

Tabel IV.18
Tingkat Keyakinan Masyarakat
Tentang UU PBB Yang Dapat Memberikan Kepastian Hukum

No	Kategori Jawaban	Jumlah Dalam angka	Jumlah Dalam prosentase
01	Sangat Yakin	15	18,75
02	Yakin	61	76,25
03	Kurang Yakin	4	5
04	Tidak Yakin	-	-
	Jumlah	80	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan No.21

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 61 responden atau 76, 25 % menyatakan yakin bahwa UU PBB yang ada sekarang ini dapat memberikan kepastian hukum dan 15 responden atau 18,75 % menyatakan sangat yakin.

Hal ini menunjukkan bahwa UU PBB yang ada sekarang ini telah dapat diterima keberadaannya oleh masyarakat dan masyarakat percaya betul akan kebenarannya walaupun ada sebagian kecil masyarakat yang kurang yakin atau kurang percaya.

Tabel IV.19
Tingkat Merasakan Keuntungan atas Pemungutan PBB

No	Kategori Jawaban	Jumlah Dalam angka	Jumlah Dalam prosentase
01	Sangat merasakan	24	32,5
02	Merasakan	37	46,25
03	Kurang merasakan	12	15
04	Tidak merasakan	5	6,25
	Jumlah	80	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan No.24

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa 37 responden atau 46,25 % merasakan keuntungan atas pemungutan PBB, 26 responden atau 32,5 % sangat merasakan, 12 responden atau 15% menyatakan kurang merasakan dan 5 responden atau 6,25 tidak merasakan keuntungan. Responden yang menyatakan kurang atau tidak merasakan keuntungan atas pemungutan PBB dikarenakan hasil pembangunan yang selama ini apakah memang hanya berasal dari pajak dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak merata padahal daerah tertentu yang sekiranya masyarakat sangat membutuhkan sarana dan prasaran tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah.

Tabel IV.20
Tingkat Kepuasan Masyarakat
Atas Hasil pembangunan dari Pemungutan Pajak

No	Kategori Jawaban	Jumlah Dalam angka	Jumlah Dalam prosentase
01	Sangat puas	28	35
02	Puas	33	41,25
03	Kurang puas	14	17,5
04	Tidak puas	5	6,25
	Jumlah	80	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan No.25

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 33 responden atau 41,25 % menyatakan puas atas hasil pembangunan dari pemungutan pajak, 28 responden atau 35 % menyatakan sangat puas, 14 responden atau 17,5 % menyatakan kurang puas dan 5 responden atau 6,25 % menyatakan tidak puas dengan hasil pembangunan yang berasal dari pajak.

Mereka yang kurang puas atau tidak puas memberikan alasan bahwa tidak begitu banyak perubahan yang terjadi di wilayahnya yang

telah dilakukan oleh pemda setempat dan hasil pembangunan yang ada belum seperti yang mereka harapkan. Sedangkan yang mengatakan sangat merasakan puas memberi alasan karena hasil pajak yang ada selama ini akhirnya masyarakat sendiri yang akan menikmatinya, apakah diwujudkan dengan pembangunan di daerahnya ataupun untuk pembiayaan-pembiayaan yang lainnya.

Tabel IV.21
Ada / Tidaknya Perasaan
Bahwa Pemungutan PBB membebani Masyarakat

No	Kategori Jawaban	Jumlah Dalam angka	Jumlah Dalam prosentase
01	Sangat Tidak membebani	20	25
02	Tidak membebani	54	67,5
03	Membebani	6	7,5
04	Sangat membebani	-	-
	Jumlah	80	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan No.27

Dari tabel diatas menunjukan bahwa 54 responden atau 25% menyatakan tidak membebani, 20 responden atau 25 menyatakan sangat tidak membebani dan 6 responden atau 3,75% menyatakan membebani. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan PBB selama ini dapat diterima oleh masyarakat dan sebagian besar masyarakat tidak merasa terbebani dengan pemungutan pajak. Masyarakat yang merasa membebani karena penghasilan mereka yang sangat pas-pasan.

Tabel IV.22
Tingkat Keadilan Yang Dirasakan Masyarakat Atas Pemungutan PBB

No	Kategori Jawaban	Jumlah Dalam angka	Jumlah Dalam prosentase
01	Sangat adil	27	33
02	Adil	52	65
03	Kurang adil	1	1,25
04	Tidak adil	-	-
	Jumlah	80	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan No.30

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 52 responden atau 65% menyatakan bahwa pemungutan PBB selama ini telah mencerminkan keadilan, 27 responden atau 33% menyatakan sangat adil dan 1 responden menyatakan kurang adil. Alasan masyarakat yang menyatakan kurang adil karena pendataan obyek pajak tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan diperlakukan dengan sama, hal ini perlu dilakukan pendataan ulang yang harus dilakukan oleh aparat memberikan penjelasan serta memberikan informasi tentang UU PBB.

Tabel IV.23
Ada / Tidaknya Usaha Masyarakat
Untuk Mengetahui Informasi Tentang Tata Cara Perpajakan

No	Kategori Jawaban	Jumlah Dalam angka	Jumlah Dalam prosentase
01	Sangat berusaha	20	25
02	Berusaha	54	67,5
03	Kurang berusaha	6	7,5
04	Tidak berusaha	-	-
	Jumlah	80	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan No.32

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 20 responden atau 25% menyatakan berusaha, 54 responden atau 67,5% menyatakan berusaha dan 6 responden atau 7,5% menyatakan kurang berusaha. Alasan

masyarakat yang menyatakan kurang berusaha karena malas, tidak merasa membutuhkan, karena pada saat itu mereka tidak menemui kesulitan, dan kurangnya sarana yang mempermudah bagi masyarakat untuk mencari informasi tentang PBB itu sendiri.

Tabel IV.24
Tingkat Keinginan Masyarakat
Akan perubahan Tata Cara Pembayaran PBB

No	Kategori Jawaban	Jumlah Dalam angka	Jumlah Dalam prosentase
01	Sangat menginginkan	28	35
02	Menginginkan	48	60
03	Kurang menginginkan	4	5
04	Tidak tidak menginginkan	-	-
	Jumlah	80	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan No.35

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 28 responden atau 35% menyatakan sangat menginginkan perubahan tata cara pembayaran PBB , 48 responden atau 60% menyatakan menginginkan, dan yang menyatakan kurang menginginkan sebanyak 4 responden atau 5%. Masyarakat yang kurang menginginkan perubahan tersebut memberikan alasan bahwa mereka sudah menerima keadaan yang ada sekarang ini atau dengan kata lain mengikuti keputusan pemerintah. Sedangkan masyarakat yang sangat menginginkan atau ingin perubahan tersebut terutama pada jumlah pungutan PBB yang sebaiknya dapat diperingan lagi, lebih dipermudah prosedur pengurangan PBB, dan besarnya NJOP disesuaikan dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

Berdasarkan tabel diatas, berikut ini disajikan data secara keseluruhan dengan maksud untuk menilai tinggi rendahnya sikap masyarakat dalam membayar PBB.

Tabel IV.25
Data Keseluruhan Variabel Sikap

No.	Variabel sikap	Kategori skor				Uraian
		4	3	2	1	
1	Pendapat masyarakat terhadap pemungutan PBB	20	59	1	-	Sebagian besar masyarakat mempunyai persepsi yang baik terhadap pemungutan PBB Sebagian besar
2	Tingkat kemudahan masyarakat memahami prosedur pembayaran PBB	23	55	2	-	Sebagian besar masyarakat merasa mudah dalam memahami prosedur pelaksanaan pembayaran PBB
3	Tingkat persetujuan masyarakat terhadap tata cara pemungutan PBB oleh pemerintah	25	49	9	-	Sebagian besar masyarakat cukup setuju akan tata cara pemungutan PBB yang dilakukan oleh pemerintah, di samping ada yang kurang setuju Sebagian besar
4	Tingkat pemahaman tujuan / pentingnya pemungutan PBB yang dilakukan pemerintah	18	49	11	2	Sebagian besar masyarakat cukup paham akan tujuan / pentingnya pemungutan PBB yang dilakukan oleh pemerintah, disamping ada masyarakat yang kurang / tidak paham
5	Tingkat kepercayaan / keyakinan masyarakat terhadap pencapaian tujuan pemungutan PBB oleh pemerintah	24	50	5	1	Sebagian besar masyarakat percaya akan tercapainya tujuan pemungutan PBB yang dilakukan oleh pemerintah disamping ada sebagian kecil yang kurang percaya dan tidak percaya
6	Tingkat Keyakinan Masyarakat Tentang UU PBB Yang Dapat Memberikan Kepastian Hukum	15	61	4	-	sebagian masyarakat merasa yakin bahwa UU PBB sekarang ini memberikan kepastian hukum walaupun ada yang kurang yakin
7	Tingkat Merasakan Keuntungan atas Pemungutan PBB	26	37	12	5	Sebagian besar masyarakat merasakan keuntungan atas pemungutan PBB disamping ada yang kurang merasakan
8	Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Hasil pembangunan dari Pemungutan Pajak	28	33	14	5	Sebagian besar masyarakat merasakan puas atas hasil pembangunan dari pemungutan pajak walaupun ada yang kurang puas dan tidak puas
9	Ada / Tidaknya Perasaan Bahwa Pemungutan PBB membebani Masyarakat	20	54	6	-	Sebagian besar masyarakat tidak merasa terbebani atas pemungutan PBB walaupun ada yang merasa terbebani
10	Tingkat Keadilan Yang Dirasakan Masyarakat Atas Pemungutan PBB	27	52	1	-	Sebagian besar masyarakat merasakan keadilan dengan pemungutan PBB
11	Ada / Tidaknya Usaha Masyarakat Untuk Mengetahui Informasi Tentang Tata Cara Perpajakan	25	54	1	-	Sebagian besar masyarakat berusaha untuk mengetahui informasi tentang tatacara perpajakan PBB
12	Tingkat Keinginan Masyarakat Akan perubahan Tata Cara Pembayaran PBB	28	48	4	-	Sebagian besar masyarakat ada keinginan merubah tata cara pembayaran PBB

Sumber : Diolah dari jawaban pertanyaan no. 14 – 36

Dari data diatas dapat dinyatakan bahwa sikap masyarakat dapat dilihat dari tingkat persepsi atau pendapat masyarakat terhadap pemungutan PBB cukup baik serta pemahaman prosedur pembayaranpun masyarakat mudah untuk memahaminya. Dilihat dari tata cara pemungutannya PBB, sebagian besar masyarakat setuju akan tata cara pemungutan PBB yang dilakukan oleh pemerintah, di samping ada juga masyarakat yang menyatakan kurang setuju. Dalam tujuan atau pentingnya pemungutan PBB, sebagian besar masyarakat cukup paham dan percaya akan tujuan / pentingnya pemungutan PBB yang dilakukan oleh pemerintah, walaupun ada masyarakat yang kurang /tidak paham dan percaya akan tujuan pemungutan PBB. Dalam keyakinan tentang UU PBB sekarang ini yang memberikan kepastian hukum, sebagian besar masyarakat merasa yakin bahwa, UU PBB sekarang ini memberikan kepastian hukum walaupun ada masyarakat yang kurang yakin. Sebagian besar masyarakat merasakan keuntungan atas pemungutan PBB disamping ada masyarakat yang kurang merasakan. Serta sebagian besar masyarakat merasakan puas atas hasil pembangunan dari pemungutan pajak disamping itu masih ada masyarakat yang kurang puas dan tidak puas. Sebagian besar masyarakat menyatakan tidak merasa terbebani atas pemungutan PBB walaupun ada yang terbebani. Sebagian besar masyarakat merasakan keadilan dengan pemungutan PBB, Sebagian besar masyarakat berusaha untuk mengetahui informasi tentang tatacara perpajakan PBB dan sebagian besar masyarakat ada keinginan merubah tata cara pembayaran PBB

. Karena sikap masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam menjalankan roda pembangunan untuk itu diharapkan sikap-sikap yang positif dari masyarakat. Sikap masyarakat yang mendukung maupun yang tidak mendukung suatu kebijakan dari pemerintah akan berpengaruh pada efektivitas kebijakan itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh George C. Edward III (1991 :30), bahwa :

“Sikap merupakan faktor yang amat penting untuk suksesnya implementasi. Jika pelaksana berpandangan positif terhadap suatu kebijakan, maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan apa yang dikendaki oleh pembuat kebijakan. Tetapi bila sikap atau perspektifnya berbeda, maka proses implementasi menjadi terancam kesuksesannya”.

Berdasarkan data-data yang disampaikan diatas, berikut ini akan dilihat bagaimana sikap masyarakat dalam membayar PBB di kabupaten Pati dari 80 responden . Untuk menilai tinggi rendahnya variabel tersebut, maka digunakan tingkat pengukuran interval. Pada variabel sikap masyarakat terdapat 23 pertanyaan. Jawaban dalam setiap pertanyaan memiliki jenjang skor 1 sampai 4, dengan kategori jawaban : sangat tinggi, tinggi, kurang tinggi, rendah. Lalu, skor dari masih-masing pertanyaan dijumlahkan untuk mendapatkan akumulasi skor. Kemudian dicari nilai tertinggi dan nilai terendah, dengan hasil sebagai berikut :

$R = \text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}$

$$= 92 - 59$$

$$= 33$$

untuk menentukan lebar interval kelas pada tiap kategori, digunakan rumus sebagai berikut :

$$I = \frac{R}{K}$$
$$= \frac{33}{4}$$
$$= 8,25$$

Keterangan :

R = Range (jarak pengukuran)

I = Lebar Interval

K = Kelas Interval

Dari perhitungan tersebut, dapat ditentukan lebar interval kelas dengan 4 kelas interval yang menghasilkan distribusi frekuensi sebagai berikut :

Tabel IV.26
Klasifikasi Skor Berdasarkan
Nilai Terendah dan Nilai Tertinggi Variabel sikap

No.	Kategori Jawaban	Notasi	Lebar Interval Kelas
1	Sangat tinggi	ST	83,76 – 92
2	Tinggi	T	75,51 - 83,75
3	Kurang Tinggi	KT	67,26-75,50
4	Rendah	R	59 - 67,25

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dihitung rekapitulasi data variabel sikap yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel IV.27
Rekapitulasi Data Variabel Partisipasi Masyarakat

No.	Kategori jawaban	Jumlah	
		Angka	Prosentase
1	Sangat tinggi	13	16,3
2	Tinggi	14	17,5
3	Kurang Tinggi	38	47,5
4	Rendah	15	18,8
Jumlah		80	100

Sumber : Diolah dari jawaban pertanyaan no. 14-36

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari hasil penelitian pada variabel sikap adalah sebanyak 38 atau 47,5% responden termasuk dalam kategori kurang tinggi, 15 atau 18,8% responden dalam kategori rendah, 14 atau 17,5% responden termasuk kategori tinggi, dan 13 atau 16,3% responden termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan kondisi yang kurang tinggi untuk variabel sikap, dengan pembuktian antara lain :

1. Masih ada masyarakat yang menyatakan kurang setuju tentang pemungutan PBB yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Masih ada masyarakat yang kurang /tidak paham akan tujuan / pentingnya pemungutan PBB yang dilakukan oleh pemerintah.
3. Masih ada masyarakat kurang / tidak percaya akan tujuan pemungutan PBB.
4. Masih ada masyarakat yang kurang yakin bahwa UU PBB memberikan kepastian hukum.

5. Masih ada masyarakat yang kurang merasakan keuntungan atas pemungutan PBB
6. Masih ada masyarakat yang kurang puas dan tidak puas atas hasil pembangunan dari pemungutan pajak.
7. Masih ada masyarakat yang merasa terbebani atas pemungutan PBB.

Demikianlah hal-hal yang membuktikan sikap masyarakat dalam membayar PBB di kabupaten Pati kurang tinggi.

B.4 HASIL PENELITIAN DALAM TABEL TUNGGAL VARIABEL MOTIVASI

Pada dasarnya motivasi mengacu pada konsep yang digunakan untuk menerangkan kekuatan-kekuatan yang ada dan bekerja pada diri organisme atau individu yang menjadi penggerak dan mengarah tingkah laku individu tersebut. Selain untuk keperluan menerangkan kekuatan-kekuatan yang menjadi penggerak dan mengarah tingkah laku, motivasi juga digunakan untuk menerangkan perbedaan-perbedaan intensitas tingkah laku.

Bila dikaitkan dengan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, maka motivasi adalah kekuatan-kekuatan yang ada dan bekerja baik pada diri organisme / individu maupun kekuatan yang ada diluar individu sehingga individu tersebut memahami keadaan dirinya untuk menggerakkan dan mengarahkan tingkah lakunya untuk membayar pajaknya untuk memenuhi kebutuhan dalam hal ini kebutuhan yang

mendasari diri seseorang untuk bertindak dan memberikan sumbangannya pada negara pada sasaran pencapaian tujuan.

Tabel IV.28
Dorongan Masyarakat Untuk Membayar PBB

No	Kategori Jawaban	Jumlah Dalam angka	Jumlah Dalam prosentase
01	Sadar atas kemauan sendiri	12	15
02	Melaksanakan kewajiban dari pemerintah	60	75
03	Ikut – ikutan	7	8,75
04	Terpaksa	1	1,25
	Jumlah	80	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan No.37

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 80 responden menyatakan bahwa yang memotivasi untuk berperan dalam membayar PBB, 60 responden atau 75 % menyatakan bahwa membayar PBB sebagai melaksanakan kewajiban dari peraturan pemerintah, 12 responden atau 15 % menyatakan sadar atas kemauan sendiri dan 7 responden atau 8,75 % menyatakan ikut-ikutan dan 1 atau 1,25 responden menyatakan takut /terpaksa.(diolah dari jawaban pertanyaan No..37). dari data ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian masyarakat dalam membayar PBB dikarenakan bukan dorongan dari dirinya tetapi karena terpaksa atau hanya ikut-ikutan.

Sedangkan yang mendorong atau membuat masyarakat untuk selalu membayar atau melunasi PBB dengan tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo dari 23 responden atau 28,75 % menyatakan membayar PBB dengan tepat waktu merupakan sifat kegotongroyongan rakyat dalam membiayai pembangunan. Dari 41 responden atau 51,25 % menyatakan ikut-ikutan

dalam membayar PBB, 6 responden atau 7,5% menyatakan takut atau terpaksa dan sebanyak 10 responden atau 12,5 % menyatakan supaya tidak dikenakan denda 2 % setiap bulannya. (diolah dari jawaban pertanyaan No..38)

Tabel IV.29
Tingkat Kebutuhan dan Harapan membayar PBB

No	Kategori Jawaban	Jumlah Dalam angka	Jumlah Dalam prosentase
01	Sangat ada sekali	19	23,75
02	Ada	53	66,25
03	Tidak ada	8	10
04	Tidak ada sekali	-	-
	Jumlah	80	100

Sumber : diolah dri jawaban pertanyaan No.39

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa 53 responden atau 66,25 % menyatakan bahwa ada kebutuhan dan harapan dalam membayar PBB.19 responden atau 23,75 % menyatakan sangat ada sekali dan 8 responden atau 10 % menyatakan tidak ada kebutuhan dan harapan dalam membayar PBB. Alasan masyarakat yang menyatakan ada kebutuhan dan harapan dalam membayar PBB antara lain, dengan membayar PBB nantinya pembangunan dapat lancar dan adanya perubahan, kemajuan, dan kemakmuran bagi rakyat. Sedangkan masyarakat yang tidak ada kebutuhan atau harapan menyatakan bahwa mereka membayar PBB karena sebagai warga negara yang harus mentaati peraturan dari pemerintah.

Tabel IV.30
Tingkat Dorongan/keinginan
Self Assesment (menghitung, memunggut, dan menyeter) PBB sendiri

No	Kategori Jawaban	Jumlah Dalam angka	Jumlah Dalam prosentase
01	Sangat menginginkan	17	21,25
02	Menginginkan	55	68,75
03	Kurang menginginkan	8	10
04	Tidak menginginkan	-	-
	Jumlah	80	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan No.40

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa 55 responden atau 68,75 menyatakan keinginannya untuk menghitung, memunggut dan menyeter PBBnya sendiri, 17 responden atau 21,25 % menyatakan sangat menginginkan, dan 8 responden atau 10 % menyatakan kurang menginginkan.

Tabel IV. 31
Tingkat Dorongan/keinginan
Akan Kemudahan Pelayanan Pembayaran PBB

No	Kategori Jawaban	Jumlah Dalam angka	Jumlah Dalam prosentase
01	Sangat menginginkan	17	21,25
02	Menginginkan	54	67,5
03	Kurang menginginkan	9	11,25
04	Tidak menginginkan	-	-
	Jumlah	80	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan No.41

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, keinginan dari masyarakat dalam kemudahan pelayanan membayar PBBnya dapat dilihat dari 54 responden atau 67,5 % menyatakan ada keinginan, 17 responden atau 21,25 % menyatakan sangat menginginkan dan 9 responden atau 11,25 % kurang menginginkan. Adapun keinginan masyarakat dalam kemudahan pelayanan membayar PBB, karena dalam pembayarannya sedikit ada

kesulitan dalam tempat membayar pajaknya, karena seperti biasanya masyarakat membayar di BRI kemudian dipindahkan ke BKK, kurangnya informasi, perubahan tempat pembayaran inilah yang membuat masyarakat menginginkan petugas / aparat desa untuk aktif menginformasikan (untuk kecamatan Margoyoso), masyarakat mengharapkan ada petugas dikantor desa / kelurahan dan petugas mendatangi dari rumah ke rumah untuk memungut pajaknya.

Seperti yang penulis kemukakan diatas, bahwa motivasi kekuatan-kekuatan yang ada dan bekerja baik pada diri organisme / individu maupun kekuatan yang ada diluar individu sehingga individu tersebut memahami keadaan dirinya untuk menggerakkan dan mengarahkan tingkah lakunya untuk membayar pajaknya untuk memenuhi kebutuhan dalam hal ini kebutuhan yang mendasari diri seseorang untuk bertindak dan memberikan sumbangannya pada negara pada sasaran pencapaian tujuan. Karena dalam masalah pemungutan pajak melibatkan dua pihak yaitu pihak administrasi negara (pajak) dan pihak wajib pajak. Kekuatan – kekuatan yang diluar diri individu tersebutlah yang membuat terdorongnya atau termotivasi untuk membayar pajak.

Tabel IV.32
Tingkat Keaktifan Pemda Setempat
Dalam Memberikan Sanksi Pelanggar UU PBB

No	Kategori Jawaban	Jumlah Dalam angka	Jumlah Dalam prosentase
01	Sangat sering	16	20
02	Sering	48	60
03	Kadang-kadang	14	17,5
04	Tidak Pernah	2	2,5
	Jumlah	80	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan No.47

Dari tabel diatas diatas menunjukkan bahwa pemda setempat dalam memberikan sanksi pelanggar UU PBB dari 2 responden atau 2,5% menyatakan tidak pernah, 14 responden atau 17,5% menyatakan kadang-kadang dan 48 responden atau 60% menyatakan sering, dan 16 responden atau 20 %menyatakan sangat sering. Sedangkan tingkat keaktifan pemda setempat dalam memberikan himbauan kepada masyarakat untuk membayar PBB, dari 24 responden atau 30 % menyatakan sangat sering , 48 responden atau 60 % menyatakan seringdan 8 responden menyatakan kadang-kadang.

Dalam pelayanan yang diberikan oleh petugas dalam penarikan pajak atau pembayaran pajak dari 11 responden atau 13, 75% menyatakan kurang memuaskan , 1 responden atau 1,25% menyatakan tidak memuaskan dan 52 responden atau 65% menyatakan memuaskan serta 16 responden atau 20% menyatakan sangat memuaskan. Sedangkan intensitas aparat dalam memberikan penyuluhan tata cara pembayaran PBB dapat diketahui dari 10 responden atau 12,5% menyatakan kadang-

kadang, 48 responden atau 60% menyatakan sering dan 22 responden atau 27,5% menyatakan sangat sering.

Dalam intensitas pemberian informasi atau penyuluhan kegunaan membayar PBB yang dilakukan oleh pemda setempat kepada masyarakat menunjukkan, dari 16 responden atau 20% menyatakan sangat sering, 51 responden atau 63,75% menyatakan sering, serta 11 responden atau 13,75% menyatakan kadang-kadang dan 2 responden atau 2,5% menyatakan tidak pernah (diolah dari jawaban pertanyaan no. 42-50).

Dengan demikian, peranan pemda setempat atau kelurahan pada khususnya sebagai motivator dalam membayar PBB aparat secara langsung sudah dilakukan namun perlu peningkatan agar tujuan kebijakan pemerintah ini benar-benar mengenai sasaran.

Berdasarkan tabel-tabel di atas, berikut ini disajikan data tabel tersebut tersebut secara keseluruhan dengan maksud untuk menilai tinggi-rendahnya motivasi dalam membayar PBB :

Tabel IV.33
Data Keseluruhan Variabel Motivasi

No.	Variabel motivasi	Kategori skor				Uraian
		4	3	2	1	
1	Dorongan Masyarakat Untuk Membayar PBB	12	60	7	1	Masih ada masyarakat yang membayar PBB karena ikut-ikutan dan karena keterpaksaan.
2	Tingkat Kebutuhan dan Harapan membayar PBB	19	53	8	-	Sebagian besar masyarakat ada kebutuhan dan harapan dalam membayar PBB dan juga ada masyarakat yang kurang mengharapkan
3	Tingkat Dorongan/keinginan self assesment (menghitung, memunggut, dan menyeter) PBB sendiri	17	55	8	-	Sebagian besar masyarakat ada keinginan untuk menghitung, memunggut dan menyeter PBBnya meskipun ada masyarakat yang tidak menginginkan
4	Tingkat Dorongan/keinginan Akan Kemudahan Pelayanan pembayaran PBB	17	54	9	-	Sebagian besar masyarakat menginginkan akan kemudahan pelayanan pembayaran PBB meskipun ada masyarakat yang kurang meningkatkannya.
5	Tingkat Keaktifan Pemda Setempat Dalam Memberikan Sanksi Pelanggar UU PBB	16	48	14	2	Sebagian masyarakat menyatakan pemda setempat sering memberikan sanksi , meskipun ada masyarakat yang menyatakan terkadang dan tidak pernah memberikan sanksi kepada pelanggar UU PBB

Sumber : Di olah dari jawaban pertanyaan no. 37-50

Dari data diatas dapat dinyatakan bahwa motivasi masyarakat dapat dilihat dari dorongan masyarakat untuk membayar PBB sebagian besar motivasi masyarakatnya adalah melaksanakan kewajiban dari peraturan pemerintah dan sadar atas kemauannya sendiri, meskipun ada masyarakat yang hanya ikut-ikutan ,takut atau terpaksa. Sebagian besar masyarakat ada kebutuhan dan harapan dalam membayar PBB dan juga

ada masyarakat yang kurang mengharapkan. Sedangkan dilihat dari dorongan self assessment, sebagian besar masyarakat ada keinginan untuk menghitung, memungut dan menyetorkan PBBnya meskipun ada masyarakat yang tidak menginginkan serta sebagian besar masyarakat menginginkan akan kemudahan pelayanan pembayaran PBB meskipun ada masyarakat yang kurang menginginkannya.

Dilihat dari motivasi eksternalnya, Sebagian masyarakat menyatakan pemda setempat sering memberikan sanksi, meskipun ada masyarakat yang menyatakan terkadang dan tidak pernah memberikan sanksi kepada pelanggar UU PBB

Berdasarkan data-data yang disampaikan diatas, berikut ini akan dilihat bagaimana motivasi masyarakat dalam membayar PBB di kabupaten Pati dari 80 responden. Untuk menilai tinggi rendahnya variabel tersebut, maka digunakan tingkat pengukuran interval. Pada variabel motivasi masyarakat terdapat 24 pertanyaan. Jawaban dalam setiap pertanyaan memiliki jenjang skor 1 sampai 4, dengan kategori jawaban : sangat tinggi, tinggi, kurang tinggi, rendah. Lalu, skor dari masing-masing pertanyaan dijumlahkan untuk mendapatkan akumulasi skor. Kemudian dicari nilai tertinggi dan nilai terendah, dengan hasil sebagai berikut :

$$R = \text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}$$

$$= 56 - 31$$

$$= 25$$

Untuk menentukan lebar interval kelas pada tiap kategori, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 I &= \frac{R}{K} \\
 &= \frac{25}{4} \\
 &= 6,25
 \end{aligned}$$

Keterangan :

R = Range (jarak pengukuran)

I = Lebar Interval

K = Kelas Interval

Dari perhitungan tersebut, dapat ditentukan lebar interval kelas dengan 4 kelas interval yang menghasilkan distribusi frekuensi sebagai berikut :

Tabel IV.34
Klasifikasi Skor Berdasarkan
Nilai Terendah dan Nilai Tertinggi Variabel Motivasi

No.	Kategori Jawaban	Notasi	Lebar Interval Kelas
1	Sangat tinggi	ST	49,76 - 56
2	Tinggi	T	43,51- 49,75
3	Kurang Tinggi	KT	37,26 - 43,50
4	Rendah	R	31 - 37,25

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dihitung rekapitulasi data variabel motivasi yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel IV.35
Rekapitulasi Data Variabel Motivasi

No.	Kategori jawaban	Jumlah	
		Angka	Prosentase
1	Sangat tinggi	12	15
2	Tinggi	12	15
3	Kurang Tinggi	45	56,25
4	Rendah	11	13,75
Jumlah		80	100

Sumber : Diolah dari jawaban pertanyaan no. 37-50

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari hasil penelitian pada variabel motivasi, sebanyak 45 atau 56,25 % responden termasuk dalam kategori kurang tinggi, 11 atau 13,75 % responden dalam kategori rendah, 12 atau 15 % responden termasuk kategori tinggi, dan 12 atau 15 % responden termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan kondisi yang kurang tinggi untuk variabel motivasi, dengan pembuktian antara lain :

1. Masih ada dorongan atau motivasi masyarakat dalam membayar PBB karena terpaksa atau takut dan hanya ikut-ikutan.
2. Masih ada masyarakat yang kurang menginginkan adanya ada kebutuhan dan harapan dalam membayar PBB

3. Masih ada masyarakat yang kurang menginginkan dan tidak menginginkan untuk menghitung, memungut dan menyetorkan PBBnya sendiri.
4. Masih ada masyarakat yang kurang menginginkan akan kemudahan pelayanan pembayaran PBB

Demikianlah hal-hal yang membuktikan sikap masyarakat dalam membayar PBB di kabupaten Pati kurang tinggi.

B. 3 STATUS SOSIAL

Status sosial merupakan suatu keadaan atau kondisi yang dimiliki seseorang dalam hidup bermasyarakat yang meliputi pekerjaan, penghasilan, pendidikan dan lain sebagainya yang dapat mencerminkan kualitas hidupnya.

Tabel IV.36
Pekerjaan Tetap Responden

No	Kategori Jawaban	Jumlah Dalam angka	Jumlah Dalam prosentase
01	PNS/TNI/ karyawan Swasta	17	21,25
02	Wiraswasta	55	68,75
03	Pedagang	6	7,5
04	Buruh	2	2,5
	Jumlah	80	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan No.53

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 17 responden atau 21,25 berprofesi sebagai PNS/TNI/pegawai swasta, 55 responden atau 68,75% berprofesi sebagai wiraswasta, 6 responden atau 7,5% pekerjaannya tetapnya sebagai pedagang dan 2 responden atau 2,5% pekerjaan tetapnya sebagai buruh.

Tabel IV.37
Jumlah Anggota Keluarga yang Memiliki Pekerjaan Pokok

No	Kategori Jawaban	Jumlah Dalam angka	Jumlah Dalam prosentase
01	Lebih dari empat orang	-	
02	Tiga orang	-	
03	Dua orang	3	3,75
04	Satu orang	16	20
05	Yang tidak mempunyai pekerjaan sampingan	61	76,25
	Jumlah	80	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan No.55

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa ada 61 responden atau 76,25% yang tidak memiliki pekerjaan sampingan, 16 orang responden atau 20% menyatakan ada satu anggota keluarga yang yang memiliki pekerjaan sampingan dan hanya 3 orang responden atau 37,5% yang dalam keluarganya ada 2 orang yang memiliki pekerjaan sampingan.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden banyak yang tidak memiliki pekerjaan sampingan, sehingga tidak ada tambahan pendapatan untuk membantu perekonomian keluarga.

Tabel IV.38
Besar Pendapatan Dari Pekerjaan Pokok Responden

No	Kategori Jawaban	Jumlah Dalam angka	Jumlah Dalam prosentase
01	Lebih dari Rp.467.000,00	17	21,25
02	Rp.350.000,00-Rp.467.000,00	52	65
03	Rp.262.500,00-Rp.349.000,00	9	11,25
04	Kurang dari Rp. 262.000,00	2	2,5
	Jumlah	80	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan No.56

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 52 responden atau 65% berpendapatan pokok antara Rp.350.000,00-Rp.467.000,00, 9 responden atau 11, 25% berpendapatan pokok antara Rp.262.500,00-Rp.349.000,00

paling miskin , 2 responden atau 2,5% berpendapatan pokok kurang dari Rp. 262.000,00 serta 17 responden atau 21,25% berpendapatan pokok diatas Rp. 467.000,00. hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden termasuk dalam kategori miskin (lihat kategori kemiskinan Sagiogyo – BAB II).

Tabel IV.39
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Hidup Sehari-hari
Dari Pendapatan Pokok

No	Kategori Jawaban	Jumlah Dalam angka	Jumlah Dalam prosentase
01	Sangat mencukupi	18	22,5
02	Mencukupi	57	71,25
03	Kurang mencukupi	5	6,25
04	Tidak mencukupi	-	-
	Jumlah	80	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan No.57

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 57 responden atau 71,25% menyatakan pendapatan pokok yang diperoleh, menyatakan mencukupi, 5 responden atau 6,25% menyatakan kurang mencukupi dan 18 responden atau 22,5% menyatakan sangat tercukupi.

Tabel IV.40
Besar Pendapatan Sampingan Responden

No	Kategori Jawaban	Jumlah Dalam angka	Jumlah Dalam prosentase
01	Lebih dari Rp.467.000,00		
02	Rp.350.000,00- Rp.467.000,00		
03	Rp.262.500,00- Rp.349.000,00		
04	Kurang dari Rp. 262.000,00	19	23,75
05	Tidak memiliki pendapatan sampingan	61	76,25
	Jumlah	80	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan No.58

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 61 responden atau 76,25% menyatakan tidak memiliki pendapatan sampingan dan 19 responden atau 23,75 % menyatakan memiliki pendapatan sampingan kurang dari Rp. 262.000,00/ bulan.

Tabel IV.41
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Hidup Sehari-hari
Dari Pendapatan Sampingan

No	Kategori Jawaban	Jumlah Dalam angka	Jumlah Dalam prosentase
01	Sangat membantu	16	20
02	Membantu	3	3,75
03	Kurang membantu	-	-
04	Tidak membantu	-	-
05	Tidak memiliki pendapatan sampingan	61	76,25
	Jumlah	80	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan No.59

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa 16 responden atau 20% menyatakan pendapatan sampinganya sangat membantu dalam pemenuhi kebutuhan sehari – hari, 3 responden atau 3,75% menyatakan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan 61 responden atau 76,25% menyatakan tidak memiliki pendapatan sampingan berarti tidak ada tambahan penghasilan untuk membantu perekonomian keluarga.

Tabel IV.42
Besar Pengeluaran Keluarga Per Bulan

No	Kategori Jawaban	Jumlah Dalam angka	Jumlah Dalam prosentase
01	Lebih dari Rp.467.000,00	25	31,25
02	Rp.350.000,00-Rp.467.000,00	52	65
03	Rp.262.500,00-Rp.349.000,00	3	3,75
04	Kurang dari Rp. 262.000,00	-	-
	Jumlah	80	100

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan No.60

Tabel IV.44
Hubungan Antara
Tingkat Pendidikan dengan Partisipasi Masyarakat

Variabel dan item pertanyaan no. 61	Tingkat Pendidikan					Jumlah
	Kategori	Akademi/PT	SMA	SMP	SD	
Partisipasi	ST	-	6 11%	3 100%	1 50%	10 12,5%
	T	1 5%	12 21,8%	-		13 16,25
	KT	17 85%	29 52,7%	-	1 50%	47 58,75%
	R	2 10%	8 14,5	-		10 12,5%
Jumlah		20 100%	55 100%	3 100%	2 100%	80 100%

Diolah dari jawaban pertanyaan No. 1-13 dan No. 61

Dari tabel IV. 47 diatas dapat diketahui bahwa terdapat 55 responden (100%) yang tingkat pendidikannya SMA menyatakan kurang tinggi partisipasinya sebanyak 29 responden (52,7%). Sementara itu dari 20 responden (100%) yang tingkat pendidikannya akademi/Perguruan Tinggi menyatakan kurang tinggi partisipasinya sebanyak 17 responden (85%). 3 responden (100%) yang tingkat pendidikannya SMP menyatakan sangat tinggi partisipasinya sebanyak 3 responden (100%), sedangkan 2 responden (100%) yang tingkat pendidikannya SD menyatakan sangat tinggi partisipasinya sebanyak 1 responden (50%) dan menyatakan kurang tinggi partisipasinya sebanyak 1 responden (50%).

Kurang tingginya partisipasi responden yang berpendidikan akademi/Perguruan Tinggi serta responden yang berpendidikan SMA dikarenakan kesibukan mereka dalam bekerja sehingga dengan aktifitas kesibukannya mereka dalam bekerja, mereka lupa akan jatuh tempo

pembayaran PBB atau mengalami keterlambatan dalam membayar PBB dibandingkan dengan responden yang berpendidikan SMP.

Tabel IV.45
Hubungan Antara
Pekerjaan Tetap dengan Partisipasi Masyarakat

Variabel dengan pertanyaan item no.53	Pekerjaan Tetap					Jumlah
	Kategori	PNS/TNI/Karyawan Swasta	Wirasasta	Pedagang	Buruh	
Partisipasi	ST	9 52,9%	1 1,8%			10 12,5%
	T	6 35,3%	7 12,7%			13 16,2%
	KT	2 11,8%	45 81,8%			47 58,7%
	R	-	2 3,6%	6 100%	2 100%	18 22,5%
	Jumlah	17 100%	55 100%	6 100%	2 100%	80 100%

Diolah dari jawaban pertanyaan No. 1-13 dan No. 53

Dari tabel IV. 48 diatas dapat diketahui bahwa terdapat 55 responden (100%) yang pekerjaan tetapnya sebagai wiraswasta menyatakan kurang tinggi partisipasinya sebanyak 45 responden (81,8%). Sementara itu dari 17 responden (100%) yang pekerjaan tetapnya sebagai PNS/TNI/Karyawan Swasta menyatakan sangat tinggi partisipasinya ada 9 responden (52,9%). 6 responden (100%) yang pekerjaan tetapnya sebagai pedagang menyatakan rendah partisipasinya sebanyak 6 responden (100 %) sedangkan 2 responden (100%) yang pekerjaan tetapnya sebagai buruh menyatakan rendah partisipasinya sebanyak 2 responden (100%).

Dari penjelasan tabel diatas dapat di sampaikan bahwa status pekerjaan dari responden sangat mempengaruhi dalam hal partisipasinya

dalam membayar PBB. Semakin tinggi atau baik seseorang dalam status pekerjaannya maka akan semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar PBB begitu juga sebaliknya..

Tabel IV.46
Hubungan Antara Responden Yang Memiliki Pekerjaan sampingan dengan Partisipasi Masyarakat

Variabel dan item pertanyaan No.54			Pekerjaan tetap dan pekerjaan sampingannya				Jumlah	
			PNS/TNI/Karyawan Swasta		Wirasasta			Tidak mempunyai pekerjaan sampingan
P A R T I S I P A S I	Pekerjaan sampingannya		Pengacara	Wiraswasta/ Swasta	Mengajar	Aparat desa		
	K A T E G O R I	ST	1 100%	4 50%	2 100%	3 42,8%	1 1,64%	12 15%
		T	-	3 37,5%	-	4 57,2%	6 9,84%	13 16,25%
		KT	-	1 12,5%	-	-	41 67,21%	42 52,5%
		R	-	-	-	-	13 21,31%	13 16,25%
	Jumlah		1 100%	8 100%	2 100%	7 100%	61 100%	80 100%

Diolah dari jawaban pertanyaan No. 1-13 dan No. 54

Dari tabel IV. 49 diatas dapat diketahui bahwa terdapat 8 responden (100%) yang pekerjaan tetapnya PNS/TNI/Karyawan Swasta mempunyai pekerjaan sampingan sebagai wiraswasta sebanyak 4 responden (50%) menyatakan sangat tinggi partisipasinya dan sebanyak 3 responden (37,5%) yang pekerjaan tetapnya PNS/TNI/Karyawan Swasta mempunyai pekerjaan sampingan sebagai wiraswasta menyatakan tinggi partisipasinya dan 1 responden (12,5%) yang pekerjaan tetapnya PNS/TNI/Karyawan swasta mempunyai pekerjaan sampingan sebagai wiraswasta menyatakan kurang tinggi partisipasinya serta 1 responden (100%) yang pekerjaan tetapnya PNS/TNI/Karyawan swasta mempunyai pekerjaan sampingan sebagai pengacara menyatakan sangat tinggi

partisipasinya. Sementara itu dari 7 responden (100%) yang berada di kecamatan margoyoso yang pekerjaan tetapnya wiraswasta mempunyai pekerjaan sampingan sebagai aparat desa sebanyak 3 responden (42,8%) menyatakan sangat tinggi partisipasinya dan 4 responden (57,2%) menyatakan tinggi partisipasinya serta 2 responden (100%) yang pekerjaan tetapnya wiraswasta mempunyai pekerjaan sampingan mengajar menyatakan sangat tinggi partisipasinya

Dari penjelasan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang memiliki pekerjaan sampingan atau ada tambahan penghasilan, tingkat partisipasi dalam membayar PBB tinggi. Dibandingkan dengan responden yang tidak memiliki pekerjaan sampingan sebanyak 61 responden (100%) yang menyatakan kurang tinggi partisipasinya sebanyak 41 responden (67,21%) dan sebanyak 13 responden (21,31%) menyatakan rendah partisipasinya dalam membayar PBB.

Berdasarkan tabel-tabel diatas, berikut ini disajikan data –data secara menyeluruh dengan maksud menilai tinggi rendahnya status sosial masyarakat :

Tabel IV.47
Data Keseluruhan Variabel Status Sosial

No.	Variabel status social	Kategori Skor				Keterangan	Uraian
		4	3	2	1		
1	Jenis pekerjaan						
	Pekerjaan tetap	17	55	6	2		Sebagian besar dari anggota keluarga responden hanya mempunyai 1 orang yang memiliki pekerjaan tetap
	Pekerjaan sampingan				19	61 responden tidak memiliki pekerjaan sampingan	Sebagian besar dari anggota keluarga responden tidak memiliki pekerjaan sampingan
2	Besar pendapatan						
	Pendapatan pokok	17	52	9	2		Sebagian responden berpenghasilan pokok antara Rp. 350.000,00- Rp. 467.000,00
	Tingkat pemenuhan kebutuhan dari pendapatan pokok	18	57	5			Sebagian besar responden merasa tercukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga
	Pendapatan sampingan	19				61 responden tidak memiliki pendapatan sampingan	Sebagian besar responden tidak memiliki pendapatan sampingan.
	Tingkat pemenuhan kebutuhan dari pendapatan sampingan	3		16	61	61 responden tidak memiliki pendapatan sampingan	Sebagian besar responden tidak memiliki pendapatan sampingan sudah barang tentu tidak ada tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
	Besar pengeluaran	25	52	3			Sebagian besar responden mengeluarkan Rp. 350.000,00- Rp. 467.000,00
3	Tingkat pendidikan	20	55	3	2		Sebagian besar responden berpendidikan SLTA

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan no. 51-61

Dari data diatas dapat dinyatakan bahwa status sosial masyarakat dilihat dari jenis pekerjaan, sebagian besar dari anggota keluarga responden hanya mempunyai 1 orang yang memiliki pekerjaan tetap dan sebagian besar dari anggota keluarga responden tidak memiliki pekerjaan

sampingan, yang kedua dilihat dari besarnya pendapatan, sebagian responden berpenghasilan pokok antara Rp. Rp.350.000,00-Rp.467.000,00 dan dilihat dari tingkat dari pemenuhan kebutuhan dari pendapatan pokok sebagian besar responden merasa tercukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta sebagian besar responden tidak memiliki pendapatan sampingan, sudah barang tentu tidak ada tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan besarnya pengeluaran setiap bulannya sebagian responden mengeluarkan Rp.350.000,00-Rp.467.000,00, yang ketiga dilihat dari tingkat pendidikan sebagian besar responden berpendidikan SLTA

Berdasarkan data-data yang disampaikan diatas, berikut ini akan dilihat bagaimana status sosial masyarakat di kabupaten Pati dari 80 responden . Untuk menilai tinggi rendahnya variabel tersebut, maka digunakan tingkat pengukuran interval. Pada variabel status sosial terdapat 10 pertanyaan . pertanyaan ada yang berjenjang dan ada juga sebagai filter. Jawaban dalam pertanyaan memiliki jenjang skor 1 sampai 4, dengan kategori jawaban : sangat tinggi, tinggi, kurang tinggi, rendah. Lalu, skor dari masih-masing pertanyaan dijumlahkan untuk mendapatkan akumulasi skor. Kemudian dicari nilai tertinggi dan nilai terendah, dengan hasil sebagai berikut :

$R = \text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}$

$$= 36 - 21$$

$$= 15$$

untuk menentukan lebar interval kelas pada tiap kategori, digunakan rumus sebagai berikut :

$$I = \frac{R}{K}$$

$$= \frac{15}{4}$$

$$= 3,75$$

Keterangan :

R = Range (jarak pengukuran)

I = Lebar Interval

K = Kelas Interval

Dari perhitungan tersebut, dapat ditentukan lebar interval kelas dengan 4 kelas interval yang menghasilkan distribusi frekuensi sebagai berikut :

Tabel IV.48
Klasifikasi Skor Berdasarkan
Nilai Terendah dan Nilai Tertinggi Variabel Status Sosial

No.	Kategori Jawaban	Notasi	Lebar Interval Kelas
1	Sangat tinggi	ST	32,26 - 36
2	Tinggi	T	28,50 - 32,25
3	Kurang Tinggi	KT	24,76 - 28,50
4	Rendah	R	21 - 24,75

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dihitung rekapitulasi data variabel status sosial yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel IV.49
Rekapitulasi Data Variabel Status Sosial

No.	Kategori jawaban	Jumlah	
		Angka	Prosentase
1	Sangat tinggi	14	17,5
2	Tinggi	16	20,0
3	Kurang Tinggi	42	52,5
4	Rendah	8	10,0
Jumlah		80	100

Sumber : Diolah dari jawaban pertanyaan no. 51-61

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari hasil penelitian pada variabel motivasi, sebanyak 42 atau 52,5 % responden termasuk dalam kategori kurang tinggi, 8 atau 10 % responden dalam kategori rendah, 16 atau 20 % responden termasuk kategori tinggi, dan 14 atau 17,5 % responden termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan kondisi yang kurang tinggi untuk status sosial, dengan pembuktian antara lain :

1. Sebagian besar dari anggota keluarga responden tidak memiliki pekerjaan sampingan
2. Sebagian besar responden dalam satu keluarga yang mempunyai pekerjaan tetap hanya satu orang
3. Sebagian besar responden tidak memiliki pendapatan sampingan sehingga tidak ada tambahan pendapatan
4. Masih ada responden yang berpendidikan formal rendah

Demikianlah hal-hal yang membuktikan status sosial di kabupaten Pati kurang tinggi.

C. ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bagian ini akan disajikan data-data dalam bentuk tabel silang antara variabel yang mempengaruhi (sikap, motivasi, dan status sosial) dengan variabel yang terpengaruh, yaitu partisipasi masyarakat. Analisis ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan secara kualitatif dengan menggunakan rumus statistik.

Adapun hipotesis yang di ajukan adalah sebagai berikut :

1. Ada hubungan positif antara sikap dengan partisipasi masyarakat
2. Ada hubungan positif antara motivasi dengan partisipasi masyarakat
3. Ada hubungan positif antara status sosial dengan partisipasi masyarakat
4. Ada hubungan positif antara sikap, motivasi, status sosial dengan partisipasi masyarakat.

C.1 ANALISIS TABEL HUBUNGAN VARIABEL

C.1.1 HUBUNGAN VARIABEL ANTARA VARIABEL SIKAP DAN VARIABEL PARTISIPASI MASYARKAT DALAM MEMBAYAR PBB.

Berdasarkan data-data yang telah dikemukakan pad BAB sebelumnya, maka untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari sikap terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar

PBB, maka berikut akan disajikan tabel silang yang menggambarkan hubungan antara kedua variabel tersebut.

Tabel IV.50
Hubungan Antara Sikap dan Partisipasi Masyarakat

Variabel	Sikap					Jumlah
	Kategori	ST	T	KT	R	
Partisipasi	ST	9 69,2%	1 7,14%	-	-	10 12,5%
	T	3 23,1%	6 42,8%	2 5,3%	2 13,3%	13 16,3%
	KT	1 7,7%	7 50%	32 84,21%	7 46,7%	47 58,8%
	R	-	-	4 10,5%	6 40%	10 12,5%
	Jumlah	13 100%	14 100%	38 100%	15 100%	80 100%

Diolah dari jawaban pertanyaan No. 1-13 dan No. 14-36

Dari tabel IV. 50 diatas dapat diketahui bahwa terdapat 38 responden (100%) yang menyatakan kurang tinggi sikapnya sebanyak 32 responden (84,21%) dikarenakan partisipasinya kurang tinggi. Sementara itu dari 15 responden (100%) yang menyatakan sikap yang rendah ada 6 responden (40%) dikarenakan partisipasinya yang rendah pula, sedangkan 14 responden (100%) menyatakan sikap yang tinggi sebanyak 6 responden (42,8%) dikarenakan partisipasinya yang tinggi pula. 13 responden (100%) yang menyatakan sikap yang sangat tinggi sebanyak 9 responden (69,2 %) dikarenakan partisipasinya sangat tinggi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi sikap maka akan semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar PBB dan sebaliknya semakin rendah sikap

maka semakin rendah pula partisipasi masyarakat dalam membayar PBB.

Jadi dengan sikap yang positif (semakin tinggi) akan melakukan pembayaran PBBnya atau mendukung dan melaksanakan peraturan dari pemerintah, seperti yang dikatakan oleh George C. Edward III Sikap merupakan faktor yang amat penting untuk suksesnya implementasi. Jika pelaksana berpandangan positif terhadap suatu kebijakan, maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan apa yang dikendaki oleh pembuat kebijakan. Tetapi bila sikap atau perspektifnya berbeda, maka proses implementasi menjadi terancam kesuksesannya.(George C. Edward III 1991:30)

Selanjutnya, untuk membuktikan kebenaran adanya pengaruh antara sikap dengan partisipasi masyarakat, maka akan dianalisis dengan menggunakan uji statistik dengan menggunakan rumus Korelasi Rank Kendall (τ), dari perhitungan diperoleh nilai Koefisien korelasi Kendall (τ) sebesar 0,534 dengan P value 0,000. karena nilai P value tersebut kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang nyata antara partisipasi masyarakat dengan variabel sikap, atau pembacaan uji signifikansinya dengan harga koefisien Korelasi Rank Kendall yang diperoleh

dimasukkan dalam perhitungan untuk mendapatkan harga Z dengan rumus sebagai berikut :

$$Z = \frac{\tau}{\sqrt{\frac{2(2N+5)}{9N(N-1)}}}$$

$$Z = \frac{0,534}{\sqrt{\frac{2(2.80+5)}{9 \cdot 80(80-1)}}}$$

$$Z = 7,001$$

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh Z hitung sebesar 7,001 apabila dengan Z tabel yang sebesar 1,96 (angka mutlak untuk 5 %) dan Z tabel yang besarnya 2,58 (angka mutlak untuk 1 %) maka diperoleh kesimpulan bahwa Z hitung lebih besar dari Z tabel baik dengan taraf signifikan 1 % ataupun 5 %.

$$Z \text{ hitung} = 7,001 > Z \text{ tabel } \% = 1,96$$

$$Z \text{ hitung} = 7,001 > Z \text{ tabel } \% = 2,58$$

Z hitung yang diperoleh yaitu 7,001 dapat dilihat kemungkinan yang berkaitan dengan harga-harga seekstrem harga-harga z observasi dalam distribusi normal. Jadi, p satu sisi untu $z \geq 7,001$ atau $z \leq - 7,001$ adalah $p = 0,5000$ (dapat dilihat pada tabel A. Tabel kemungkinan yang berkaitan

dengan harga-harga seektrem harga-harga z observasi dalam distribusi normal)

Ini berarti hipotesis yang diajukan, diterima, yaitu ada pengaruh yang signifikan antara variabel sikap (X1) dan variabel partisipasi masyarakat (Y) dalam membayar PBB

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel sikap (X1) dan variabel partisipasi masyarakat (Y) alam membayar PBB, dipergunakan rumus Koefisien Determinan

$$\begin{aligned}KD &= (\tau)^2 \times 100 \% \\&= 0,534^2 \times 100 \% \\&= 28,51 \%\end{aligned}$$

Besar (KD) Koefisien Determinan tersebut menunjukkan bahwa pada variabel partisipasi masyarakat (Y) terjadi perubahan sebesar 28,51 % yang disebabkan oleh variabel sikap (X1), yang berarti pula bahwa terjadi perubahan sebesar 71,49 pada variabel partisipasi masyarkat (Y) yang disebabkan oleh variabel lainnya. Perhitungan statistik (manual dan software komputer) bisa dilihat pada daftar lampiran.

C.2 HUBUNGAN VARIABEL MOTIVASI DAN VARIABEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PBB

Berdasarkan data-data yang telah dikemukakan, maka untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari motivasi terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB, maka berikut ini akan disajikan tabel silang yang menggambarkan hubungan antara kedua variabel tersebut.

Tabel IV.51
Hubungan Antara Motivasi dan Partisipasi Masyarakat

Variabel	Motivasi					Jumlah
	Kategori	ST	T	KT	R	
Partisipasi	ST	8 66,7%	2 16,7%	-	-	10 12,5%
	T	3 25%	6 50%	4 8,99%	-	13 16,3%
	KT	1 8,3%	4 33,3%	35 78,88%	7 63,63%	47 58,8%
	R	-	-	4 8,99%	6 54,54%	10 12,5%
	Jumlah	12 100%	12 100%	45 100%	11 100%	80 100%

Diolah dari jawaban pertanyaan No. 1-13 dan No. 37-50

Dari tabel IV.51 diatas dapat diketahui bahwa terdapat diatas dapat diketahui bahwa terdapat 45 responden (100%) yang menyatakan kurang tinggi motivasinya sebanyak 35 responden (43,5%) dikarenakan partisipasinya kurang tinggi. Sementara itu dari 12 responden (100%) yang menyatakan tinggi motivasinya sebanyak 6 responden (50%) dikarenakan partisipasinya tinggi. Sedangkan 12 responden (100%) menyatakan motivasi yang

sangat tinggi sebanyak 8 responden (66,7%) dikarenakan partisipasinya sangat tinggi pula. 11 responden (100%) yang menyatakan motivasi sangat rendah sebanyak 6 responden (54,54%) dikarenakan partisipasinya sangat rendah pula.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi motivasi maka akan semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar PBB sebaliknya semakin rendah motivasi maka semakin rendah pula partisipasi masyarakat dalam membayar PBB.

Motivasi atau dorongan yang timbul dari diri sendiri/ hati nurani akan membentuk suatu dorongan pula untuk berpartisipasi hal ini sesuai dengan pernyataan Khairuddin yang meninjau dari segi motivasinya, partisipasi masyarakat terjadi karena :

1. Takut/ terpaksa

Ini akibat adanya perintah yang kaku dari atasan dan petugas yang melaksanakan tugasnya.

2. Ikut-ikutan

Ini hanya didorong oleh rasa solidaritas yang tinggi di antara sesama anggota masyarakat.

3. Kesadaran

Ini timbul karena kehendak dari pribadi anggota masyarakat yang dilandasi oleh dorongan yang timbul dari hati nurani sendiri. Dan partisipasi bentuk inilah yang

sesungguhnya sangat diharapkan dapat berkembang di masyarakat (1992:126)

Kemudian untuk membuktikan kebenaran adanya pengaruh antara motivasi dengan partisipasi masyarakat, maka akan dianalisis dengan menggunakan uji statistik dengan menggunakan rumus Korelasi Rank Kendall (τ), dari perhitungan diperoleh nilai Koefisien korelasi Kendall (τ) sebesar 0,492 dengan P value 0,000. karena nilai P value tersebut kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang nyata antara partisipasi masyarakat dengan variabel motivasi, atau pembacaan uji signifikansinya dengan harga koefisien Korelasi Rank Kendall yang diperoleh dimasukkan dalam perhitungan untuk mendapatkan harga Z dengan rumus sebagai berikut :

$$Z = \frac{\tau}{\sqrt{\frac{2(2N+5)}{9N(N-1)}}}$$
$$Z = \frac{0,492}{\sqrt{\frac{2(2.80+5)}{9 \cdot 80(80-1)}}}$$
$$Z = 6,45$$

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh Z hitung sebesar 6,45 apabila dengan Z tabel yang sebesar 1,96 (angka mutlak untuk 5 %) dan Z tabel yang besarnya 2,58 (angka mutlak untuk

1 %) maka diperoleh kesimpulan bahwa Z hitung lebih besar dari Z tabel baik dengan taraf signifikan 1 % ataupun 5 %.

$$Z \text{ hitung} = 6,45 > Z \text{ tabel } \% = 1,96$$

$$Z \text{ hitung} = 6,45 > Z \text{ tabel } \% = 2,58$$

Z hitung yang diperoleh yaitu 6,45 dapat dilihat kemungkinan yang berkaitan dengan harga-harga seekstrem harga-harga z observasi dalam distribusi normal. Jadi, p satu sisi untuk $z \geq 6,45$ atau $z \leq -6,45$ adalah $p = 0,3264$ (dapat dilihat pada tabel A. Tabel kemungkinan yang berkaitan dengan harga-harga seekstrem harga-harga z observasi dalam distribusi normal)

Ini berarti hipotesis yang diajukan, diterima, yaitu ada pengaruh yang signifikan antara variabel motivasi (X2) dan variabel partisipasi masyarakat (Y) dalam membayar PBB

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel motivasi (X2) dan variabel partisipasi masyarakat (Y) dalam membayar PBB, digunakan rumus Koefisien Determinan (KD)

$$\begin{aligned} KD &= (\tau)^2 \times 100 \% \\ &= 0,492^2 \times 100 \% \\ &= 24,20 \% \end{aligned}$$

Besar (KD) Koefisien Determinan tersebut menunjukkan bahwa pada variabel partisipasi masyarakat (Y) terjadi perubahan

sebesar 24,20 % yang disebabkan oleh variabel sikap (X1), yang berarti pula bahwa terjadi perubahan sebesar 72,8 % pada variabel partisipasi masyarakat (Y) yang disebabkan oleh variabel lainnya. Perhitungan statistik (manual dan software komputer) bisa dilihat pada Daftar lampiran.

C.3 HUBUNGAN VARIABEL STATUS SOSIAL DAN VARIABEL VARIABEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PBB .

Berdasarkan data-data yang telah dikemukakan, maka untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari status sosial terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB, maka berikut ini akan disajikan tabel silang yang menggambarkan hubungan antara kedua variabel tersebut.

Tabel IV.52
Hubungan Antara Status Sosial
dan Partisipasi Masyarakat

Variabel	Status Sosial					Jumlah
	Kategori	ST	T	KT	R	
Partisipasi	ST	9 64,3%	1 6,25%	-	-	10 12,5%
	T	5 35,7%	8 50%	-	-	13 16,3%
	KT	-	7 43,75%	38 90,5%	2 25%	47 58,8%
	R	-	-	4 9,5%	6 75%	10 12,5%
	Jumlah	14 100%	16 100%	42 100%	8 100%	80 100%

Diolah dari jawaban pertanyaan No. 1-13 dan 51-61

Dari tabel IV.52 diatas dapat disampaikan bahwa terdapat 42 responden (100%) yang menyatakan kurang tinggi status sosialnya sebanyak 38 responden (90,5%) dikarenakan partisipasinya kurang tinggi. Sementara itu dari 16 responden (100%) yang menyatakan tinggi status sosialnya sebanyak 8 responden (50%) dikarenakan partisipasinya tinggi. Sedangkan 14 responden (100%) yang menyatakan sangat tinggi status sosialnya sebanyak 9 responden (64,3%) dikarenakan partisipasinya sangat tinggi. 8 responden (100%) yang menyatakan status sosialnya rendah ada 6 responden (75%) dikarenakan partisipasinya rendah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi status sosial maka akan semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar PBB sebaliknya semakin rendah status sosial maka semakin rendah pula partisipasi masyarakat dalam membayar PBB.

Kemudian untuk membuktikan kebenaran adanya pengaruh antara motivasi dengan partisipasi masyarakat, maka akan dianalisis dengan menggunakan uji statistik dengan menggunakan rumus Korelasi Rank Kendall (τ), dari perhitungan diperoleh nilai Koefisien korelasi Kendall (τ) sebesar 0,799 dengan P value 0,000. karena nilai P value tersebut kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa

terjadi hubungan yang nyata antara partisipasi masyarakat dengan variabel status sosial, atau pembacaan uji signifikansinya dengan harga koefisien Korelasi Rank Kendall yang diperoleh dimasukkan dalam perhitungan untuk mendapatkan harga Z dengan rumus sebagai berikut :

$$Z = \frac{\tau}{\sqrt{\frac{2(2N+5)}{9N(N-1)}}}$$

$$Z = \frac{0,799}{\sqrt{\frac{2(2.80+5)}{9 \cdot 80(80-1)}}}$$

$$Z = 10,48$$

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh Z hitung sebesar 10,48 apabila dengan Z tabel yang sebesar 1,96 (angka mutlak untuk 5 %) dan Z tabel yang besarnya 2,58 (angka mutlak untuk 1 %) maka diperoleh kesimpulan bahwa Z hitung lebih besar dari Z tabel baik dengan taraf signifikan 1 % ataupun 5 %.

$$Z \text{ hitung} = 10,48 > Z \text{ tabel } \% = 1,96$$

$$Z \text{ hitung} = 10,48 > Z \text{ tabel } \% = 2,58$$

Z hitung yang diperoleh yaitu 10,48 dapat dilihat kemungkinan yang berkaitan dengan harga-harga seekstrem harga-harga z observasi dalam distribusi normal. Jadi, p satu

sisi untu $z \geq 10,48$ atau $z \leq - 10,48$ adalah $p = 0,3156$ (dapat dilihat pada tabel A. Tabel kemungkinan yang berkaitan dengan harga-harga seektrem harga-harga z observasi dalam distribusi normal)

Ini berarti hipotesis yang diajukan, diterima, yaitu ada pengaruh yang signifikan antara variabel status sosial (X3) dan variabel partisipasi masyarakat (Y) dalam membayar PBB

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel status sosial (X3) dan variabel partisipasi masyarakat (Y) alam membayar PBB, dipergunakan rumus Koefisien Determinan (KD)

$$\begin{aligned} \text{KD} &= (\tau)^2 \times 100 \% \\ &= 0,799^2 \times 100 \% \\ &= 63,84 \% \end{aligned}$$

Besar (KD) Koefisien Determinan tersebut menunjukkan bahwa pada variabel partisipasi masyarakat (Y) terjadi perubahan sebesar 63,84 % yang disebabkan oleh variabel status sosial (X3), yang berarti pula bahwa terjadi perubahan sebesar 36,16 % pada variabel partisipasi masyarkat (Y) yang disebabkan oleh variabel lainnya. Perhitungan statistik (manual dan software komputer) bisa dilihat pada Daftar lampiran.

C.4 HUBUNGAN ANTARA VARIABEL SIKAP, MOTIVASI DAN STATUS SOSIAL TERHADAP VARIABEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PBB

Berdasarkan uraian pada, dimana untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh positif dari sikap, motivasi, dan status sosial terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB, maka harus dengan menggunakan rumus Koefisien Konkordasi Kendall (W). Dari perhitungan uji konkordasi kendall antara variabel sikap, variabel motivasi, dan variabel status sosial dengan variabel partisipasi masyarakat menghasilkan nilai konkordasi kendall sebesar 0,922.

Untuk menguji signifikansi W, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} X^2 &= K (N-1) \cdot W \\ &= 4 (80-1) 0,922 \\ &= 291,35 \end{aligned}$$

Harga X^2 sebesar 291,35 tersebut kemudian dikonsultasikan dengan harga kritik X^2 pada tabel, dimana :

- pada taraf signifikansi 5% harga kritik tabel X^2 sebesar 101,88
- Pada taraf signifikansi 1% harga kritik X^2 tabel sebesar 112,33

Karena harga kritik hitung sebesar 291,35 lebih besar dari harga kritik X^2 pada taraf signifikansi 5% maupun 1%. Dengan demikian diketahui ada korelasi yang signifikansi antara keempat variabel tersebut.

Kesimpulan yang di dapat adalah hipotesis yang menyatakan variabel sikap, variabel motivasi, variabel status sosial mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel partisipasi masyarakat dalam membayar PBB, dapat diterima.

Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa besar sumbangan variabel sikap, variabel motivasi dan variabel status sosial bersama-sama dalam mempengaruhi variabel partisipasi masyarakat, digunakan rumus Koefisiensi Determinan (KD) sebagai berikut :

$$\begin{aligned} KD &= (W)^2 \cdot 100 \% \\ &= (0,922)^2 \cdot 100 \% \\ &= 85,01 \% \end{aligned}$$

besarnya KD tersebut menunjukkan bahwa pada variabel partisipasi masyarakat terjadi perubahan sebesar 85,01% yang disebabkan oleh variabel sikap, variabel motivasi dan variabel status sosial. Ini berarti pula bahwa terdapat perubahan sebesar 14,99% pada variabel partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh variabel lainnya. Perhitungan statistik (manual dan software komputer) bisa dilihat pada daftar lampiran.

D. DISKUSI

Berdasarkan analisis kuantitatif, maka dapat diketahui sebagai berikut :

- a. Hipotesis yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara sikap dan partisipasi masyarakat dapat diterima.

Hal ini dapat diketahui dari hasil perhitungan melalui pengujian statistik dengan menggunakan Koefisien Korelasi Rank Kendall (τ), dimana diperoleh Koefisien Korelasi Rank Kendall (τ) sebesar 0,534 dengan P value 0,000 atau harga Z hitung sebesar 7,001. Bila harga Z hitung tersebut dikonsultasikan harga Z tabel pada taraf signifikansi 5 % yang sebesar 1,96 dan taraf signifikansi 1 % yang sebesar 2,58. Dengan demikian Z hitung lebih besar dari pada Z tabel.

- b. Hipotesis yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara motivasi dan partisipasi masyarakat dapat diterima.

Hal ini dapat diketahui dari hasil perhitungan melalui pengujian statistik menggunakan Koefisien Korelasi Rank Kendall (τ), dimana diperoleh Koefisien Korelasi Rank Kendall (τ) sebesar 0,492 dengan P value 0,000 atau harga Z hitung sebesar 6,45. Bila harga Z Hitung tersebut dikonsultasikan harga Z tabel pada taraf signifikansi 5 % yang sebesar 1,96 dan taraf signifikansi 1 % yang sebesar 2,58. Maka Z hitung lebih besar dari pada Z tabel.

- c. Hipotesis yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara status sosial dan partisipasi masyarakat dapat diterima.

Hal ini dapat diketahui dari hasil perhitungan melalui pengujian statistik menggunakan Koefisien Korelasi Rank Kendall (τ) dimana diperoleh Koefisien Korelasi Rank Kendall (τ) sebesar 0.799 dengan P value 0,000 atau harga Z hitung sebesar 10,48. Bila harga Z hitung tersebut dikonsultasikan harga Z tabel pada taraf signifikansi 5 % yang sebesar 1,96 dan taraf signifikansi 1 % yang sebesar 2,58. Maka Z hitung lebih besar dari pada Z tabel.

- d. Hipotesis yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara sikap, motivasi, status sosial dan partisipasi masyarakat dapat diterima.

Hal ini dapat diketahui dari hasil perhitungan melalui pengujian statistik menggunakan Koefisien Konkordansi Rank Kendall (W) dimana diperoleh harga W sebesar 0,922 sehingga diperoleh harga X^2 hitung sebesar 291,35 kemudian harga tersebut dikonsultasikan dengan harga X^2 pada taraf signifikansi 5 % yang sebesar 101,88 dan taraf signifikansi 1 % yang sebesar 112,33. Maka X^2 hitung lebih besar dari pada X^2 tabel.

- d. Berdasarkan pengujian dengan menggunakan koefisiensi determinan (KD), dimana diperoleh harga KD sebesar 85,01 %. Hal ini menunjukkan bahwa pada variabel partisipasi masyarakat terjadi perubahan sebesar 85,01 % yang disebabkan oleh variabel sikap, variabel motivasi dan variabel status sosial. Ini berarti pula bahwa terdapat perubahan sebesar 14,99 %

pada variabel partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh variabel lainnya.

Dilihat dari ketiga variabel bebas, ternyata variabel yang terkecil pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB adalah variabel motivasi. Dari variabel motivasi dalam membayar PBB ini, penulis belum ada masukan atau pembandingan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Seperti yang dikemukakan oleh penulis tentang motivasi, dalam hal ini dengan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB, motivasi adalah kekuatan-kekuatan yang ada dan bekerja baik pada diri organisme / individu maupun kekuatan yang ada diluar individu sehingga individu tersebut memahami keadaan dirinya untuk menggerakkan dan mengarahkan tingkah lakunya untuk membayar pajaknya untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan yang mendasari diri seseorang untuk bertindak dan memberikan sumbangannya pada negara pada sasaran pencapaian tujuan. Dari ketiga variabel yang memengaruhi partisipasi yaitu variabel sikap, variabel motivasi dan variabel status sosial dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar PBB dapat dilihat dari pengetahuan, sikap dan perilaku dari masyarakat itu sendiri. Dan dari pengamatan dan observasi yang dilakukan oleh penulis partisipasi masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi faktor eksternal juga sangat menentukan dalam berpartisipasi. Faktor-faktor eksternal yang penulis maksud adalah administrasi pajak dan efektifitas pelayanan aparat (petugas pajak).

Hal-hal yang penting dalam administrasi pajak dapat diketahui dari sistem pemungutan pajak, sistem pembayaran pajak, dan sanksi terhadap pelanggaran

membayar pajak. Pelaksanaan administrasi pajak diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat. Sesuai dengan pernyataan tersebut menurut UU No. 6 tahun 1983 menyatakan administrasi pajak berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan dan penerapan administrasi. Lebih lanjut Undang-Undang RI No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak di Indonesia. Ciri dan corak itu adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan Nasional.
- b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai penerimaan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terhutang, sehingga

melalui sistem ini pelaksanaan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak

Disamping itu untuk terpenuhinya pajak ideal atau *ideale Besteuerung*, oleh Adolf Wagner mengemukakan 4 (empat) asas, yaitu :

a. Asas politik finansial yang meliputi :

1. Perpajakan hendaknya menghasilkan jumlah yang memadai
2. Pajak hendaknya bersifat dinamis.

b. Asas ekonomis :

1. Pemilihan mengenai perpajakan yang tepat
2. Pemilihan mengenai macam – macam pajak berhubung dengan adanya berbagai macam pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dan penyelidikan tentang kemungkinan penggeseran pajak.

c. Asas keadilan :

1. Pajak hendaknya bersifat umum atau universal
2. kesamaan beban

d. Asas Administrasi :

1. Kepastian perpajakan
2. Keluwesan dalam penagihan (pemungutan)
3. Ongkos pemungutan hendaknya diusahakan sekecil-kecilnya

e. Asas yuridis atau asas hukum

Kejelasan Undang-Undang Perpajakan

Kata-kata dalam Undang-Undang hendaknya jangan mempunyai arti ganda sehingga sering menimbulkan interpretasi yang salah (Modul U.T, Keuangan Negara, 1986 : 4)

Berkaitan dengan masalah administrasi pajak, salah satu asas yang disebutkan oleh Adolf Wagner, adalah asas administrasi. Asas pertama dalam asas administrasi ialah kepastian perpajakan, yang mengandung makna, bahwa pajak hendaknya bersifat pasti dalam arti jelas disebutkan siapa atau apa yang dikenai pajak, berapa besar pajak tersebut, bagaimana cara membayarnya dan kapan harus dibayar. Bagaimana bentuk bukti pembayarannya, apa sanksinya jika terlambat membayar atau malahan tidak membayar dan sebagainya. Karena kebijaksanaan fiskal yang tidak disertai dengan kepastian, tidak akan terlaksana dengan efektif. Asas kedua dalam asas administrasi, adalah keluwesan yang mengandung makna, maka harus melihat kondisi si pembayar pajak. Asas ketiga dalam asas ini menyatakan bahwa ongkos pemungutan lebih besar dari pemasukkan pajak.

Seperti yang disebutkan diatas, faktor lain yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak adalah faktor administrasi perpajakan yaitu, kemudahan bagi wajib pajak di dalam membayar pajak, untuk itu diperlukan kesederhanaan administrasi perpajakan ini merupakan salah satu kebijaksanaan dalam pembaharuan sistem perpajakan nasional. Kesederhanaan yang dimaksud disini meliputi kesederhanaan dalam jumlah dan jenis, tarif, serta sistem pemungutannya. (Salamun A.T, 1991 :98)

Selain administrasi pajak yang perlu diperhatikan adalah efektifitas pelayanan petugas pajak. Konsep efektifitas yang dijadikan dasar mengukur

keberhasilan suatu organisasi, oleh Chester I. Barnard dinyatakan bahwa efektifitas organisasi adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama, tingkat pencapaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas. Sedangkan Steers memberikan pengertian efektifitas organisasi adalah sejauhmana organisasi melaksanakan tugas pokoknya atau mencapai sasarannya (1985:21). Hal senada juga diutarakan oleh Stephen P Robbins (1994:85) yang mendefinisikan efektifitas organisasi sebagai tingkatan pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan efektifitas adalah suatu keadaan organisasi yang harus mencapai tujuannya sehingga ada efeknya dan dapat membawa hasil (tentang usaha atau tindakan)

Sehubungan dengan pertimbangan pendapat-pendapat diatas, maka efektifitas pelayananan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat diartikan sebagai perwujudan sampai sejauhmana pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh setiap aparat atau petugas pajak dalam mencapai sasarannya. Jadi yang menjadi ukuran objektif tentang pelaksanaan tugas, efektif, harus melihat kepada tugas aparatur pajak. Adapun tugas-tugas pelayanan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan terhadap wajib pajak adalah :

1. Memberikan informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Memberikan penjelasan dalam pembayaran PBB yang telah masuk
3. Mengarsipkan data pembayaran PBB yang telah masuk
4. menyusun laporan hasil dari pembayaran PBB kepada pejabat yang berwenang atas pekerjaan ini.

Sebagai upaya untuk memenuhi sasaran serta meningkatkan pelayanan yang semestinya, yakni menyajikan pelayanan yang lebih meningkatkan dan lebih baik kepada para pemakai jasa sistem pemerintahan dapat dilihat ciri-ciri pelayanan yang lebih baik dari segi : sikap yang responsif, kadar objektivitas dan ketepatan waktu. Pelayanan bukan hanya berarti peningkatan output secara kuantitatif melainkan mencakup juga peningkatan kualitatif dalam arti mutu yang dapat dilihat. Pelayanan diartikan service yang diberikan petugas, karena semua hal yang saling berhubungan antara masyarakat atau wajib pajak dan petugas dalam upaya menciptakan kepuasan bersama. Pelayanan dapat diartikan kegiatan dari organisasi yang dilakukan untuk mengamalkan dan mengabdikan diri kepada masyarakat (Ibnu Syamsi, 1983 :10).

Masalah pelayanan di dalam masyarakat, dapat mengandung dua aspek pelayanan, disamping pelayanan operatif juga pelayanan administratif. Pelayanan merupakan hasil yang timbul dari proses pelaksanaan organisasi dan pengawasan yang secara kontinyu dilaksanakan dalam mencapai tujuan. Pelayanan dapat ditandai oleh makin naiknya tanggapan positif serta tingkat partisipasi masyarakat.

Menurut Rosenbloom, masyarakat berinteraksi dengan administrator / manajer publik dalam berbagai Konteks yaitu sebagai :

1. *Client*
2. *Regulates*
3. *Participants*
4. *Street Level Encounters*

Sebagai Clients adalah manakala masyarakat datang menemui administrator untuk memperoleh pelayanan publik (*Public Service*). Dalam kesempatan lain pertemuan tersebut bisa dalam konteks lain, yaitu sebagai *regulates*, yaitu diatur, misalnya dalam soal perpajakan, lalu lintas, perijinan, imigrasi dan sebagainya. Sebagai participants misalnya dalam pelaksanaan program KB, pertanian, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Yang sering dirasa tidak enak oleh administrator, yaitu jika publik datang sebagai *litigant* (penuntut, penggugat) berupa keluhan-keluhan karena pelayanan yang kurang memuaskan, respon langsung karena publik merasa dirugikan. Terakhir *street level encounters* ; disini ditonjolkan peran masyarakat dalam pengaturan-pengaturan oleh administrator. (Forum No.73,1994)

Berdasarkan Konteks yang telah dikemukakan oleh Rosenbloom tersebut, maka hubungan antara administrator dan publik dalam bidang perpajakan bersifat *regulatees* , karena hak dan kewajiban kedua pihak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang.

Membayar pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan, yang berarti mengikatkan diri terhadap pembangunan negara, karena itu perlu diberikan kebanggaan dan pelayanan kepada para pembayar pajak, perlu diberikan kemudahan-kemudahan membayar pajak dapat terpelihara bahkan bila mungkin di tingkatkan secara konsepsional. Fasilitas ini tidak hanya dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan, tetapi juga dalam berbagai corak kebijaksanaan administratif, prosedural dan operasional perpajakan. Fasilitas inipun selalu

ditingkatkan mutunya sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemampuan pemerintah.

Berbagai fasilitas pelayanan diatas antara lain :

1. Percepatan pemberian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan pengukuhan PKP (Penghasilan Kena Pajak).
2. Percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) dan penyelesaian keberatan pajak.
3. Kemudahan prosedur pembayaran pajak.
4. Pendidikan wajib pajak dan aparatur pajak
5. pelayanan langsung di kantor-kantor Dirjen Pajak (Salamun A.T, 1991:210)

Demikianlah hal-hal faktor-faktor yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menilai partisipasi masyarakat dalam membayar PBB.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Hasil penelitian tentang pengaruh sikap, motivasi dan status sosial terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kabupaten Pati Jawa Tengah menunjukkan bahwa :

1. Sebagian besar responden menyatakan kondisi yang kurang tinggi untuk variabel partisipasi masyarakat dalam membayar PBB dengan pembuktian antara lain :
 - ❑ Masih ada masyarakat yang kurang mengetahui dan tidak mengetahui tentang PBB dan cara pembayarannya.
 - ❑ Masih ada masyarakat yang kurang rela dan tidak rela mengeluarkan dana untuk membayar PBB
 - ❑ Sebagian besar masyarakat terkadang terlambat / tidak tepat waktu dalam membayar PBB
 - ❑ Sebagian besar masyarakat terkadang dan sering melakukan pelanggaran perpajakan.
2. Sebagian besar responden menyatakan kondisi yang kurang tinggi untuk variabel sikap dengan pembuktian antara lain :
 - ❑ Masih ada masyarakat yang menyatakan kurang setuju tentang pemungutan PBB yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam tujuan atau pentingnya pemungutan PBB, sebagian besar masyarakat cukup paham dan percaya walaupun

- ❑ Masih ada masyarakat yang kurang /tidak paham akan tujuan / pentingnya pemungutan PBB yang dilakukan oleh pemerintah.
 - ❑ Masih ada masyarakat kurang / tidak percaya akan tujuan pemungutan PBB.
 - ❑ Masih ada masyarakat yang kurang yakin bahwa UU PBB memberikan kepastian hukum.
 - ❑ Masih ada masyarakat yang kurang merasakan keuntungan atas pemungutan PBB
 - ❑ Masih ada masyarakat yang kurang puas dan tidak puas atas hasil pembangunan dari pemungutan pajak.
 - ❑ Masih ada masyarakat yang merasa terbebani atas pemungutan PBB.
3. Sebagian besar responden menyatakan kondisi yang kurang tinggi untuk variabel motivasi dengan pembuktian antara lain :
- ❑ Masih ada dorongan atau motivasi masyarakat dalam membayar PBB karena terpaksa atau takut dan hanya ikut-ikutan.
 - ❑ Masih ada masyarakat yang kurang menginginkan adanya ada kebutuhan dan harapan dalam membayar PBB
 - ❑ Masih ada masyarakat yang kurang menginginkan dan tidak menginginkan untuk menghitung, memungut dan menyetorkan PBBnya sendiri.
 - ❑ Masih ada masyarakat yang kurang menginginkan akan kemudahan pelayanan pembayaran PBB

4. Sebagian besar responden menyatakan kondisi yang kurang tinggi untuk variabel status sosial dengan pembuktian antara lain :

- ❑ Sebagian besar dari anggota keluarga responden tidak memiliki pekerjaan sampingan
- ❑ Sebagian besar responden dalam satu keluarga yang mempunyai pekerjaan tetap hanya satu orang
- ❑ Sebagian besar responden tidak memiliki pendapatan sampingan sehingga tidak ada tambahan pendapatan
- ❑ Masih ada responden yang berpendidikan formal rendah

Hasil perhitungan melalui pengujian statistik menggunakan koefisien Konkordansi Rank kendall (W) diperoleh harga W sebesar 0,922 sehingga diperoleh harga X^2 hitung sebesar 291,35 kemudian harga tersebut dikonsultasikan dengan harga X^2 pada taraf signifikansi 5 % yang sebesar 101,88 dan taraf signifikansi 1 % yang sebesar 112,33. Maka X^2 hitung lebih besar dari pada X^2 tabel. Dengan demikian ada pengaruh antara sikap, motivasi status sosial dan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB.

Dengan analisis kuantitatif diperoleh koefisiensi determinan (KD), sebesar 85,01 %. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh sikap, motivasi, dan status sosial pada partisipasi masyarakat sebesar 85,01 %. Dengan analisis statistik, juga menjawab hipotesis yang diajukan, yang mana hipotesis tersebut diterima pada taraf signifikan 5 % dan 1 %

Kesadaran masyarakat membayar pajak terwujud jika mereka tahu maksud dan fungsi pajak serta tahu tentang manfaat secara tidak langsung yang mereka

rasakan dari hasil pemungutan pajak. Jika dalam diri mereka telah timbul suatu kesadaran pajak, maka pada akhirnya akan timbul partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Selain dipengaruhi oleh faktor internal juga faktor eksternal sangat menentukan partisipasi masyarakat dalam pemungutan pajak misalnya kesederhanaan administrasi pajak, pelayanan aparat / petugas pajak dan lain sebagainya. Faktor administrasi pajak, baik dilihat dari sisi pemungutan pajak, sisi pembayaran pajak maupun sanksi terhadap pelanggaran, bertujuan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu diperlukan kesederhanaan administrasi.

Selain administrasi perpajakan, pelayanan aparat khususnya aparat pemungut pajak juga sangat penting dalam partisipasi masyarakat, karena aparat pemungut pajak berhadapan langsung dengan masyarakat wajib pajak. pelayanan aparat dapat diartikan sebagai service yang diberikan kepada petugas karena semua hal yang saling berhubungan antara masyarakat / wajib pajak dan petugas dalam upaya menciptakan kepuasan bersama. Pelayanan dapat ditandai oleh makin naiknya tanggapan positif serta makin tingginya tingkat partisipasi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, penulis kurang memperhatikan kedua hal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut yaitu administrasi perpajakan dan efektifitas pelayanan aparat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian , maka penulis mencoba mengajukan saran-saran yang ditujukan kepada :

1. Saran Pada Masyarakat

Diharapkan masyarakat senantiasa meningkatkan dan mengembangkan pendidikannya semaksimal mungkin, sehingga taraf hidupnya meningkat dan karena keberhasilan pembangunan merupakan tanggung jawab kita semua dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat, diharapkan dalam melaksanakan kewajiban dari peraturan pemerintah masyarakat melaksanakannya dengan baik.

2. Petugas pemungut Pajak

Saran – saran yang mungkin dapat diberikan kepada petugas atau pemungut pajak adalah memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat akan pentingnya/kegunaan dan manfaat PBB dan diharapkan intensitas penyuluhan atau pertemuan lebih ditingkatkan atau lebih intensif dan kontinue di daerah setempat yang khususnya membicarakan masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan PBB serta perlunya menindak bagi pelanggar UU PBB, selain itu juga dalam pendataan yang berhubungan dengan besarnya PBB harus disesuaikan dengan letak tanah atau bangunan, harga jual tanah/ bangunan dan juga status sosial dari masyarakat.

3. Saran Pada Peneliti Lain

Peneliti lain diharapkan menambah atau memfokuskan pada variabel administrasi perpajakan dan variabel efektifitas pelayanan petugas jika melakukan penelitian yang sama.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Rangking Pemasukan PBB Per-Kecamatan Di Kabupaten Pati Tahun 1999

No.	Nama Kecamatan	Target Th.1999	Realisasi	Kurang	Prosentase
01.	Jakenan	92.714.242	92.923.639	0	100,23
02.	Jaken	87.521.858	87.549.998	0	100,00
03.	Winong	125.971.764	125.971.764	0	100,00
04.	Pucakwangi	96.519.533	96.519.533	0	100,00
05.	Tambakromo	94.008.436	94.014.941	0	100,00
06.	Gembong	78.161.134	78.161.134	0	100,00
07.	Wedarijaksa	202.753.714	202.754.283	0	100,00
08.	Gabus	164.654.905	164.756.218	0	100,06
09.	Kayen	161.749.437	161.791.181	0	100,03
10.	Juwana	233.033.353	233.036.792	0	100,00
11.	Batangan	70.902.696	71.033.838	0	100,18
12.	Gunungwungkal	96.502.880	96.827.763	0	100,34
13.	Trangkil	159.536.855	156.364.373	3.172.482	98,01
14.	Tayu	236.027.444	231.257.412	4.770.032	97,98
15.	Tlogowungu	115.634.131	113.253.031	2.381.100	97,94
16.	Margorejo	260.522.082	248.724.425	11.797.657	95,47
17.	Pati	460.976.400	439.173.906	21.802.494	95,27
18.	Margoyoso	327.499.085	308.768.570	18.730.515	94,28
19.	Dukuhseti	165.293.164	151.032.621	14.260.543	91,37
20.	Sukolilo	225.457.335	205.593.059	19.864.276	91,19
21.	Cluwak	116.307.815	105.859.028	10.448.787	91,02
	Jumlah	3.571.743.553	3.465.367.509	107.227.886	97,02

Sumber : Pemerintah Kabupaten Pati
Dinas pendapatan Daerah

**Rangking Pemasukan PBB Per-Kecamatan
Di Kabupaten Pati tahun 2000**

No.	Nama Kecamatan	Target Th.2000	Realisasi	Kurang	Prosentase
01.	Jakenan	92.492.029	92.492.029	0	100,00
02.	Winong	125.915.710	125.915.710	0	100,00
03.	Jaken	87.479.165	87.479.165	0	100,00
04.	Gembong	77.909.143	77.912.173	0	100,00
05.	Gabus	164.225.598	164.228.598	0	100,00
06.	Wedarijaksa	201.287.435	201.291.115	0	100,00
07.	Tambakromo	93.996.321	93.996.321	0	100,00
08.	Kayen	161.884.364	161.924.364	0	100,02
09.	Pucakwangi	96.297.056	96.456.740	0	100,17
10.	Juwana	286.706.583	286.747.675	0	100,01
11.	Sukolilo	225.458.084	226.560.350	0	100,49
12.	Tlogowungu	115.418.955	113.844.086	1.574.869	98,64
13.	Trangkil	157.553.502	153.949.911	3.603.591	97,71
14.	Margorejo	256.116.242	245.000.941	11.115.301	95,66
15.	Cluwak	115.418.955	109.371.770	6.493.603	94,40
16.	Pati	542.264.074	501.337.401	40.926.673	92,45
17.	Tayu	263.935.667	235.793.933	28.141.734	89,34
18.	Dukuhseti	163.743.190	144.877.614	18.865.576	88,48
19.	Margoyoso	322.117.817	273.648.952	48.468.865	84,95
20.	Batangan	168.648.609	133.543.009	35.105.600	79,18
21.	Gunungwungkal	195.838.322	142.284.884	53.553.438	72,65
	Jumlah	3.915.153.239	3.668.656.741	247.849.250	93,70

Sumber : Pemerintah Kabupaten Pati
Dinas Pendapatan Daerah

**Data realisasi PBB Per-Kecamatan
Bulan Oktober tahun 2001
Tanggal jatuh tempo pembayaran**

No.	Nama Kecamatan	Baku ketetapan Th.2001	Realisasi	Kurang	%	Keterangan
01.	Jakenan	138.020.564	138.037.970	0	100,01	L 30-07-2001
02.	Winong	184.347.674	184.566.944	0	100,12	L 02-08-2001
03.	Jaken	125.523.224	125.586.578	0	100,05	L 31-08 2001
04.	Trangkil	174.423.194	175.174.178	0	100,43	L 22-10-2001
05.	Gembong	118.478.828	118.491.152	0	100,01	L 23-10-2001
06.	Wedarijaksa	220.712.922	220.722.164	0	100,00	L 24-10-2001
07.	Gabus	263.380.024	263.380.024	0	100,00	L 31-10-2001
08.	Tlogowungu	176.679.636	176.737.474	0	100,03	L 05-10-2001
09.	Tambakromo	141.468.764	141.108.807	359.957	99,75	
10.	Juwana	378.261.088	375.698.461	2.562.627	99,32	
11.	Kayen	233.633.607	231.407.486	2.226.121	99,05	
12.	Pucakwangi	140.879.500	131.322.590	9.556.910	93,22	
13.	Margorejo	298.249.747	251.798.232	46.451.515	84,43	
14.	Dukuhseti	179.268.368	148.513.242	30.755.126	82,84	
15.	Pati	694.006.701	561.077.704	132.928.997	80,85	
16.	Cluwak	164.415.050	124.278.853	45.136.197	73,36	
17.	Batangan	194.140.589	130.497.645	63.642.944	67,22	
18.	Tayu	347.908.621	220.669.406	127.239.215	63,43	
19.	Margoyoso	355.687.674	216.020.130	139.667.544	60,73	
20.	Sukolilo	332.511.351	188.133.196	144.378.155	56,58	
21.	Gunungwungkal	213.433.884	116.692.453	96.741.431	54,67	
	Jumlah	5.080.431.010	4.239.914.689	841.646.739	83,46	

Sumber : Pemerintah Kabupaten Pati
Dinas Pendapatan Daerah

**Realisasi PBB Tahun 2001
S/d Tanggal 25 Januari 2002**

No.	Nama Kecamatan	Baku ketetapan Th.2001	Realisasi + Denda	Kurang	%	Keterangan
01.	Jakenan	138.016.047	138.043.820	0	100,02	L 30-07-2001
02.	Winong	184.340.674	184.566.944	0	100,12	L 02-08-2001
03.	Jaken	125.506.941	125.586.558	0	100,06	L 31-08 2001
04.	Trangkil	174.400.094	175.174.178	0	100,44	L 22-10-2001
05.	Gembong	118.469.828	118.491.152	0	100,02	L 23-10-2001
06.	Wedarijaksa	220.722.162	220.722.164	0	100,00	L 24-10-2001
07.	Gabus	263.380.473	263.380.024	0	100,00	L 31-10-2001
08.	Tlogowungu	176.663.975	176.737.474	0	100,04	L 05-10-2001
09.	Kayen	233.633.607	233.749.696	0	100,05	L 13-11-2001
10.	Pucakwangi	140.874.678	141.106.443	0	100,16	L 15-11-2001
11.	Juwana	379.319.774	376.727.343	2.592.431	99,32	
12.	Tambakromo	146.773.504	141.108.807	5.664.697	96,14	
13.	Pati	691.157.665	643.393.595	47.764.070	93,09	
14.	Margorejo	298.211.803	276.494.652	21.717.151	92,72	
15.	Cluwak	169.515.917	148.812.545	20.703.372	87,79	
16.	Dukuhseti	179.227.363	155.272.073	23.955.290	86,63	
17.	Batangan	191.043.713	162.554.571	28.489.142	85,09	
18.	Gunungwungkal	213..485.149	165.082.035	48.403.114	77,33	
19.	Tayu	322.695.382	243.874.908	78.820.474	75,57	
20.	Margoyoso	352.998.143	254.081.156	98.916.987	71,98	
21.	Sukolilo	328.876.857	230.612.428	98.264.429	70,12	
	Jumlah	5.049.341.013	4.575.572.566	473.741.447	90,62	

Sumber : Pemerintah Kabupaten Pati

Dinas Pendapatan Daerah

LAMPIRAN II

Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat

Correlations

		Partisipasi Masyarakat
Pearson Correlation	Pertanyaan 1	,605**
	Pertanyaan 2	,733**
	Pertanyaan 3	,537**
	Pertanyaan 4	,731**
	Pertanyaan 5	,554**
	Pertanyaan 6	,770**
	Pertanyaan 7	,523**
	Pertanyaan 8	,768**
	Pertanyaan 9	,576**
	Pertanyaan 10	,731**
	Pertanyaan 11	,747**
	Pertanyaan 12	,547**
	Pertanyaan 13	,696**
Sig. (2-tailed)	Pertanyaan 1	,000
	Pertanyaan 2	,000
	Pertanyaan 3	,000
	Pertanyaan 4	,000
	Pertanyaan 5	,000
	Pertanyaan 6	,000
	Pertanyaan 7	,000
	Pertanyaan 8	,000
	Pertanyaan 9	,000
	Pertanyaan 10	,000
	Pertanyaan 11	,000
	Pertanyaan 12	,000
	Pertanyaan 13	,000

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Variabel Partisipasi Masyarakat

Pertanyaan	r	P value	Status
Pertanyaan 1	0,605	0,000	Valid
Pertanyaan 2	0,733	0,000	Valid
Pertanyaan 3	0,537	0,000	Valid
Pertanyaan 4	0,731	0,000	Valid
Pertanyaan 5	0,554	0,000	Valid
Pertanyaan 6	0,770	0,000	Valid
Pertanyaan 7	0,523	0,000	Valid
Pertanyaan 8	0,768	0,000	Valid
Pertanyaan 9	0,576	0,000	Valid
Pertanyaan 10	0,731	0,000	Valid
Pertanyaan 11	0,747	0,000	Valid
Pertanyaan 12	0,547	0,000	Valid
Pertanyaan 13	0,696	0,000	Valid

Uji Reliabilitas Variabel Partisipasi Masyarakat

Correlations

		Partisipasi Ganjil	Partisipasi Genap
Pearson	Partisipasi Ganjil	1,000	,882**
Correlation	Partisipasi Genap	,882**	1,000
Sig. (2-tailed)	Partisipasi Ganjil	,	,000
	Partisipasi Genap	,000	,
N	Partisipasi Ganjil	80	80
	Partisipasi Genap	80	80

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Nilai Koefisien korelasi (r) antara pertanyaan genap dan pertanyaan ganjil adalah sebesar **0,882** Maka Reliabilitas dari 13 pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 r_{tt} &= \frac{2 \cdot r \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}{(1 + r \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2})} \\
 &= \frac{2 \times 0,882}{(1 + 0,882)} \\
 &= \frac{1,764}{1,882} = 0,937
 \end{aligned}$$

Karena nilai Reliabilitas pertanyaan tersebut melebihi angka 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan variabel Partisipasi Masyarakat dalam kuesioner tersebut adalah **Reliabel**.

Variabel Sikap Masyarakat

Pertanyaan	r	P value	Status
Pertanyaan 14	0,767	0,000	Valid
Pertanyaan 15	0,673	0,000	Valid
Pertanyaan 16	0,739	0,000	Valid
Pertanyaan 17	0,781	0,000	Valid
Pertanyaan 18	0,657	0,000	Valid
Pertanyaan 19	0,616	0,000	Valid
Pertanyaan 20	0,598	0,000	Valid
Pertanyaan 21	0,656	0,000	Valid
Pertanyaan 22	0,617	0,000	Valid
Pertanyaan 23	0,651	0,000	Valid
Pertanyaan 24	0,469	0,000	Valid
Pertanyaan 25	0,611	0,000	Valid
Pertanyaan 26	0,649	0,000	Valid
Pertanyaan 27	0,748	0,000	Valid
Pertanyaan 28	0,673	0,000	Valid
Pertanyaan 29	0,635	0,000	Valid
Pertanyaan 30	0,744	0,000	Valid
Pertanyaan 31	0,690	0,000	Valid
Pertanyaan 32	0,795	0,000	Valid
Pertanyaan 33	0,701	0,000	Valid
Pertanyaan 34	0,558	0,000	Valid
Pertanyaan 35	0,620	0,000	Valid
Pertanyaan 36	0,690	0,000	Valid

Uji Reliabilitas Variabel Sikap Masyarakat

Correlations

		Sikap Ganjil	Sikap Genap
Pearson	Sikap Ganjil	1,000	,929**
Correlation	Sikap Genap	,929**	1,000
Sig. (2-tailed)	Sikap Ganjil	,	,000
	Sikap Genap	,000	,
N	Sikap Ganjil	80	80
	Sikap Genap	80	80

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Nilai Koefisien korelasi (r) antara pertanyaan genap dan pertanyaan ganjil adalah sebesar **0,929**. Maka Reliabilitas dari 23 pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 r_{tt} &= \frac{2 \cdot r \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}{(1 + r \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2})} \\
 &= \frac{2 \times 0,929}{(1 + 0,929)} \\
 &= \frac{1,858}{1,929} = 0,963
 \end{aligned}$$

Karena nilai Reliabilitas pertanyaan tersebut melebihi angka 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan variabel Sikap Masyarakat dalam kuesioner tersebut adalah **Reliabel**.

Uji Validitas Variabel Sikap Masyarakat

Correlations

		Sikap
Pearson Correlation	Pertanyaan 14	,767**
	Pertanyaan 15	,673**
	Pertanyaan 16	,739**
	Pertanyaan 17	,781**
	Pertanyaan 18	,657**
	Pertanyaan 19	,616**
	Pertanyaan 20	,598**
	Pertanyaan 21	,656**
	Pertanyaan 22	,617**
	Pertanyaan 23	,651**
	Pertanyaan 24	,469**
	Pertanyaan 25	,611**
	Pertanyaan 26	,649**
	Pertanyaan 27	,748**
	Pertanyaan 28	,673**
	Pertanyaan 29	,635**
	Pertanyaan 30	,744**
	Pertanyaan 31	,690**
	Pertanyaan 32	,795**
	Pertanyaan 33	,701**
	Pertanyaan 34	,558**
	Pertanyaan 35	,620**
	Pertanyaan 36	,690**
Sig. (2-tailed)	Pertanyaan 14	,000
	Pertanyaan 15	,000
	Pertanyaan 16	,000
	Pertanyaan 17	,000
	Pertanyaan 18	,000
	Pertanyaan 19	,000
	Pertanyaan 20	,000
	Pertanyaan 21	,000
	Pertanyaan 22	,000
	Pertanyaan 23	,000
	Pertanyaan 24	,000
	Pertanyaan 25	,000
	Pertanyaan 26	,000
	Pertanyaan 27	,000
	Pertanyaan 28	,000
	Pertanyaan 29	,000
	Pertanyaan 30	,000
	Pertanyaan 31	,000
	Pertanyaan 32	,000
	Pertanyaan 33	,000
	Pertanyaan 34	,000
	Pertanyaan 35	,000
	Pertanyaan 36	,000

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Validitas Variabel Motivasi Masyarakat

Correlations

		Motivasi
Pearson Correlation	Pertanyaan 37	,705**
	Pertanyaan 38	,501**
	Pertanyaan 39	,691**
	Pertanyaan 40	,614**
	Pertanyaan 41	,784**
	Pertanyaan 42	,656**
	Pertanyaan 43	,638**
	Pertanyaan 44	,660**
	Pertanyaan 45	,723**
	Pertanyaan 46	,671**
	Pertanyaan 47	,616**
	Pertanyaan 48	,715**
	Pertanyaan 49	,647**
	Pertanyaan 50	,692**
Sig. (2-tailed)	Pertanyaan 37	,000
	Pertanyaan 38	,000
	Pertanyaan 39	,000
	Pertanyaan 40	,000
	Pertanyaan 41	,000
	Pertanyaan 42	,000
	Pertanyaan 43	,000
	Pertanyaan 44	,000
	Pertanyaan 45	,000
	Pertanyaan 46	,000
	Pertanyaan 47	,000
	Pertanyaan 48	,000
	Pertanyaan 49	,000
	Pertanyaan 50	,000

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Variabel Motivasi Masyarakat

Pertanyaan	r	P value	Status
Pertanyaan 37	0,705	0,000	Valid
Pertanyaan 38	0,501	0,000	Valid
Pertanyaan 39	0,691	0,000	Valid
Pertanyaan 40	0,614	0,000	Valid
Pertanyaan 41	0,784	0,000	Valid
Pertanyaan 42	0,656	0,000	Valid
Pertanyaan 43	0,638	0,000	Valid
Pertanyaan 44	0,660	0,000	Valid
Pertanyaan 45	0,723	0,000	Valid
Pertanyaan 46	0,671	0,000	Valid
Pertanyaan 47	0,616	0,000	Valid
Pertanyaan 48	0,715	0,000	Valid
Pertanyaan 49	0,647	0,000	Valid
Pertanyaan 50	0,692	0,000	Valid

Uji Reliabilitas Variabel Motivasi Masyarakat

Correlations

		Motivasi Ganjil	Motivasi Genap
Pearson	Motivasi Ganjil	1,000	,897**
Correlation	Motivasi Genap	,897**	1,000
Sig. (2-tailed)	Motivasi Ganjil	,000	,000
	Motivasi Genap	,000	,000
N	Motivasi Ganjil	80	80
	Motivasi Genap	80	80

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Nilai Koefisien korelasi (r) antara pertanyaan genap dan pertanyaan ganjil adalah sebesar **0,897**. Maka Reliabilitas dari 14 pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 r_{tt} &= \frac{2 \cdot r \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}{(1 + r \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2})} \\
 &= \frac{2 \times 0,897}{(1 + 0,897)} \\
 &= \frac{1,794}{1,897} = 0,946
 \end{aligned}$$

Karena nilai Reliabilitas pertanyaan tersebut melebihi angka 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan variabel Motivasi Masyarakat dalam kuesioner tersebut adalah **Reliabel**.

Uji Validitas Variabel Status Sosial Masyarakat

Correlations

		Status Sosial
Pearson Correlation	Pertanyaan 51	,698**
	Pertanyaan 52	,555**
	Pertanyaan 53	,754**
	Pertanyaan 56	,764**
	Pertanyaan 57	,711**
	Pertanyaan 58	,706**
	Pertanyaan 59	,769**
	Pertanyaan 60	,712**
	Pertanyaan 61	,642**
Sig. (2-tailed)	Pertanyaan 51	,000
	Pertanyaan 52	,000
	Pertanyaan 53	,000
	Pertanyaan 56	,000
	Pertanyaan 57	,000
	Pertanyaan 58	,000
	Pertanyaan 59	,000
	Pertanyaan 60	,000
	Pertanyaan 61	,000

**. Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

Variabel Status Sosial

Pertanyaan	r	P value	Status
Pertanyaan 51	0,698	0,000	Valid
Pertanyaan 52	0,555	0,000	Valid
Pertanyaan 53	0,754	0,000	Valid
Pertanyaan 56	0,764	0,000	Valid
Pertanyaan 57	0,711	0,000	Valid
Pertanyaan 58	0,706	0,000	Valid
Pertanyaan 59	0,769	0,000	Valid
Pertanyaan 60	0,712	0,000	Valid
Pertanyaan 61	0,642	0,000	Valid

Uji Reliabilitas Variabel Status Sosial

Correlations

		Status Ganjil	Status Genap
Pearson Correlation	Status Ganjil	1,000	,862**
	Status Genap	,862**	1,000
Sig. (2-tailed)	Status Ganjil	,	,000
	Status Genap	,000	,
N	Status Ganjil	80	80
	Status Genap	80	80

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Nilai Koefisien korelasi (r) antara pertanyaan genap dan pertanyaan ganjil adalah sebesar **0,862**. Maka Reliabilitas dari 9 pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 r_{tt} &= \frac{2 \cdot r \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}{(1 + r \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2})} \\
 &= \frac{2 \times 0,862}{(1 + 0,862)} \\
 &= \frac{1,724}{1,862} = 0,926
 \end{aligned}$$

Karena nilai Reliabilitas pertanyaan tersebut melebihi angka 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan variabel Status Sosial dalam kuesioner tersebut adalah **Reliabel**.

LAMPIRAN III

KLASIFIKASI PENILAIAN PARTISIPASI MASYARKAT (Y)

No. resp	Item	Skor	Kategori	No. resp	Item	Skor	Kategori
1	13	35	R	41	13	43	T
2	13	39	KT	42	13	40	KT
3	13	46	T	43	13	44	T
4	13	41	KT	44	13	42	KT
5	13	39	KT	45	13	42	KT
6	13	40	KT	46	13	45	T
7	13	46	T	47	13	42	KT
8	13	38	KT	48	13	36	R
9	13	39	KT	49	13	49	ST
10	13	50	ST	50	13	40	KT
11	13	37	R	51	13	35	R
12	13	36	R	52	13	39	KT
13	13	38	KT	53	13	46	T
14	13	39	KT	54	13	41	KT
15	13	39	KT	55	13	39	KT
16	13	43	T	56	13	41	KT
17	13	38	KT	57	13	46	T
18	13	51	ST	58	13	38	KT
19	13	38	KT	59	13	39	KT
20	13	40	KT	60	13	50	ST
21	13	38	KT	61	13	37	R
22	13	50	ST	62	13	36	R
23	13	38	KT	63	13	38	KT
24	13	38	KT	64	13	39	KT
25	13	39	KT	65	13	39	KT
26	13	45	T	66	13	43	T
27	13	38	KT	67	13	38	KT
28	13	38	KT	68	13	51	ST
29	13	38	KT	69	13	38	KT
30	13	38	KT	70	13	40	KT
31	13	33	R	71	13	38	KT
32	13	33	R	72	13	50	ST
33	13	41	KT	73	13	38	KT
34	13	47	T	74	13	38	KT
35	13	52	ST	75	13	39	KT
36	13	40	KT	76	13	45	T
37	13	33	R	77	13	38	KT
38	13	45	T	78	13	38	KT
39	13	42	KT	79	13	51	ST
40	13	52	ST	80	13	38	KT

FREKUENSI

KATEGORI	FREKUNSI	PROSENTASE
SANGAT TINGGI	10	12,5
TINGGI	13	16,3
KURANG TINGGI	47	58,8
RENDAH	10	12,5

KLASIFIKASI PENILAIAN SIKAP MASYARKAT (X1)

No. resp	Item	Skor	Kategori	No. resp	Item	Skor	Kategori
1	23	75	KT	41	23	75	KT
2	23	69	KT	42	23	67	R
3	23	77	T	43	23	86	ST
4	23	79	T	44	23	76	T
5	23	69	KT	45	23	86	ST
6	23	71	KT	46	23	77	T
7	23	86	ST	47	23	77	T
8	23	64	R	48	23	73	KT
9	23	69	KT	49	23	79	T
10	23	92	ST	50	23	68	KT
11	23	63	R	51	23	75	KT
12	23	65	R	52	23	69	KT
13	23	66	R	53	23	77	T
14	23	69	KT	54	23	79	T
15	23	69	KT	55	23	69	KT
16	23	65	R	56	23	71	KT
17	23	69	KT	57	23	86	ST
18	23	91	ST	58	23	64	R
19	23	75	KT	59	23	69	KT
20	23	68	KT	60	23	92	ST
21	23	68	KT	61	23	63	R
22	23	88	ST	62	23	65	R
23	23	69	KT	63	23	66	R
24	23	69	KT	64	23	69	KT
25	23	59	R	65	23	69	KT
26	23	80	T	66	23	65	R
27	23	76	T	67	23	69	KT
28	23	70	KT	68	23	91	ST
29	23	69	KT	69	23	75	KT
30	23	69	KT	70	23	68	KT
31	23	68	KT	71	23	68	KT
32	23	64	R	72	23	88	ST
33	23	80	T	73	23	69	KT
34	23	74	KT	74	23	69	KT
35	23	88	ST	75	23	59	R
36	23	69	KT	76	23	80	T
37	23	60	R	77	23	76	T
38	23	78	T	78	23	70	KT
39	23	71	KT	79	23	91	ST
40	23	92	ST	80	23	75	KT

FREKUENSI

KATEGORI	FREKUNSI	PROSENTASE
SANGAT TINGGI	13	16,3
TINGGI	14	17,5
KURANG TINGGI	38	47,5
RENDAH	15	18,8

KLASIFIKASI PENILAIAN MOTIVASI (X2)

No. resp	Item	Skor	Kategori	No. resp	Item	Skor	Kategori
1	14	39	KT	41	14	49	T
2	14	41	KT	42	14	35	R
3	14	40	KT	43	14	54	ST
4	14	45	T	44	14	47	T
5	14	39	KT	45	14	51	ST
6	14	42	KT	46	14	45	T
7	14	46	T	47	14	42	KT
8	14	35	R	48	14	38	KT
9	14	38	KT	49	14	44	T
10	14	56	ST	50	14	35	R
11	14	32	R	51	14	38	KT
12	14	39	KT	52	14	41	KT
13	14	41	KT	53	14	41	KT
14	14	41	KT	54	14	46	T
15	14	40	KT	55	14	39	KT
16	14	50	ST	56	14	41	KT
17	14	42	KT	57	14	45	T
18	14	50	ST	58	14	35	R
19	14	41	KT	59	14	38	KT
20	14	43	KT	60	14	56	ST
21	14	43	KT	61	14	32	R
22	14	50	ST	62	14	39	KT
23	14	43	KT	63	14	41	KT
24	14	39	KT	64	14	41	KT
25	14	31	R	65	14	40	KT
26	14	40	KT	66	14	50	ST
27	14	41	KT	67	14	42	KT
28	14	43	KT	68	14	50	ST
29	14	38	KT	69	14	41	KT
30	14	42	KT	70	14	43	KT
31	14	32	R	71	14	43	KT
32	14	42	KT	72	14	50	ST
33	14	42	KT	73	14	43	KT
34	14	45	T	74	14	39	KT
35	14	54	ST	75	14	31	R
36	14	36	R	76	14	40	KT
37	14	35	R	77	14	43	KT
38	14	49	T	78	14	39	KT
39	14	42	KT	79	14	49	T
40	14	56	ST	80	14	45	T

FREKUENSI

KATEGORI	FREKUNSI	PROSENTASE
SANGAT TINGGI	12	15
TINGGI	12	15
KURANG TINGGI	45	56,3
RENDAH	11	13,8

KLASIFIKASI PENILAIAN STATUS SOSIAL (X3)

No. resp	Item	Skor	Kategori	No. resp	Item	Skor	Kategori
1	11	25	KT	41	11	29	T
2	11	27	KT	42	11	28	KT
3	11	34	ST	43	11	33	ST
4	11	31	T	44	11	30	T
5	11	27	KT	45	11	29	T
6	11	27	KT	46	11	31	T
7	11	33	ST	47	11	28	KT
8	11	27	KT	48	11	26	KT
9	11	27	KT	49	11	32	T
10	11	34	ST	50	11	27	KT
11	11	24	R	51	11	25	KT
12	11	24	R	52	11	27	KT
13	11	26	KT	53	11	34	ST
14	11	27	KT	54	11	31	T
15	11	27	KT	55	11	27	KT
16	11	30	T	56	11	27	KT
17	11	27	KT	57	11	33	ST
18	11	36	ST	58	11	27	KT
19	11	27	KT	59	11	27	KT
20	11	27	KT	60	11	34	ST
21	11	26	KT	61	11	24	R
22	11	34	ST	62	11	24	R
23	11	27	KT	63	11	26	KT
24	11	27	KT	64	11	27	KT
25	11	24	R	65	11	27	KT
26	11	32	T	66	11	30	T
27	11	29	T	67	11	27	KT
28	11	26	KT	68	11	36	ST
29	11	27	KT	69	11	27	KT
30	11	27	KT	70	11	27	KT
31	11	25	KT	71	11	26	KT
32	11	21	R	72	11	34	ST
33	11	29	T	73	11	27	KT
34	11	29	T	74	11	27	KT
35	11	36	ST	75	11	24	R
36	11	28	KT	76	11	32	T
37	11	23	R	77	11	29	T
38	11	30	T	78	11	26	KT
39	11	27	KT	79	11	36	ST
40	11	36	ST	80	11	27	KT

FREKUENSI

KATEGORI	FREKUNSI	PROSENTASE
SANGAT TINGGI	14	17,5
TINGGI	16	20,0
KURANG TINGGI	42	52,5
RENDAH	8	10,0

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum
Partisipasi Masyarakat	80	33,00	52,00
Sikap Masyarakat	80	59,00	92,00
Motivasi Masyarakat	80	31,00	56,00
Status Sosial	80	21,00	36,00
Valid N (listwise)	80		

Frequencies

Statistics

	N		Mean
	Valid	Missing	
Partisipasi Masyarakat	80	0	2,7125
Sikap Masyarakat	80	0	2,6875
Motivasi Masyarakat	80	0	2,6875
Status Sosial	80	0	2,5500

Partisipasi Masyarakat

	Frequency	Percent
Valid Sangat Tinggi	10	12,5
Tinggi	13	16,3
Kurang Tinggi	47	58,8
Rendah	10	12,5
Total	80	100,0

Sikap Masyarakat

	Frequency	Percent
Valid Sangat Tinggi	13	16,3
Tinggi	14	17,5
Kurang Tinggi	38	47,5
Rendah	15	18,8
Total	80	100,0

Motivasi Masyarakat

		Frequency	Percent
Valid	Sangat Tinggi	12	15,0
	Tinggi	12	15,0
	Kurang Tinggi	45	56,3
	Rendah	11	13,8
	Total	80	100,0

Status Sosial

		Frequency	Percent
Valid	Sangat Tinggi	14	17,5
	Tinggi	16	20,0
	Kurang Tinggi	42	52,5
	Rendah	8	10,0
	Total	80	100,0

Crosstabs

Partisipasi Masyarakat * Sikap Masyarakat Crosstabulation

			Sikap Masyarakat				Total
			Sangat Tinggi	Tinggi	Kurang Tinggi	Rendah	
Partisipasi Masyarakat	Sangat Tinggi	Count	9	1			10
		% of Total	11,3%	1,3%			12,5%
	Tinggi	Count	3	6	2	2	13
		% of Total	3,8%	7,5%	2,5%	2,5%	16,3%
	Kurang Tinggi	Count	1	7	32	7	47
		% of Total	1,3%	8,8%	40,0%	8,8%	58,8%
	Rendah	Count			4	6	10
		% of Total			5,0%	7,5%	12,5%
Total		Count	13	14	38	15	80
		% of Total	16,3%	17,5%	47,5%	18,8%	100,0%

Crosstabs

Partisipasi Masyarakat * Motivasi Masyarakat Crosstabulation

			Motivasi Masyarakat				Total
			Sangat Tinggi	Tinggi	Kurang Tinggi	Rendah	
Partisipasi Masyarakat	Sangat Tinggi	Count	8	2			10
		% of Total	10,0%	2,5%			12,5%
	Tinggi	Count	3	6	4		13
		% of Total	3,8%	7,5%	5,0%		16,3%
	Kurang Tinggi	Count	1	4	35	7	47
		% of Total	1,3%	5,0%	43,8%	8,8%	58,8%
	Rendah	Count			6	4	10
		% of Total			7,5%	5,0%	12,5%
Total		Count	12	12	45	11	80
		% of Total	15,0%	15,0%	56,3%	13,8%	100%

Crosstabs

Partisipasi Masyarakat * Status Sosial Crosstabulation

			Status Sosial				Total
			Sangat Tinggi	Tinggi	Kurang Tinggi	Rendah	
Partisipasi Masyarakat	Sangat Tinggi	Count	9	1			10
		% of Total	11,3%	1,3%			12,5%
	Tinggi	Count	5	8			13
		% of Total	6,3%	10,0%			16,3%
	Kurang Tinggi	Count		7	38	2	47
		% of Total		8,8%	47,5%	2,5%	58,8%
	Rendah	Count			4	6	10
		% of Total			5,0%	7,5%	12,5%
Total		Count	14	16	42	8	80
		% of Total	17,5%	20,0%	52,5%	10,0%	100,0%

LAMPIRAN IV

Uji Korelasi Kendall Tau

Correlations

			Partisipasi Masyarakat	Motivasi	Sikap	Status Sosial
Kendall's tau_b	Correlation Coefficient	Partisipasi Masyarakat	1,000	,492**	,534**	,799**
		Motivasi	,492**	1,000	,524**	,545**
		Sikap	,534**	,524**	1,000	,678**
		Status Sosial	,799**	,545**	,678**	1,000
	Sig. (2-tailed)	Partisipasi Masyarakat	,	,000	,000	,000
		Motivasi	,000	,	,000	,000
		Sikap	,000	,000	,	,000
		Status Sosial	,000	,000	,000	,
	N	Partisipasi Masyarakat	80	80	80	80
		Motivasi	80	80	80	80
		Sikap	80	80	80	80
		Status Sosial	80	80	80	80

** Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).

Uji Konkordansi Kendall

Ranks

	Mean Rank
Partisipasi Masyarakat	2,34
Motivasi	2,66
Sikap	4,00
Status Sosial	1,00

Test Statistics

N	80
Kendall's W ^a	,922
Chi-Square	221,301
df	3
Asymp. Sig.	,000

a. Kendall's Coefficient of Concordance

Uji Korelasi Kendall Tau

Correlations

			Partisipasi Masyarakat	Motivasi	Sikap	Status Sosial
Kendall's tau_b	Correlation Coefficient	Partisipasi Masyarakat	1,000	,492**	,534**	,799**
		Motivasi	,492**	1,000	,524**	,545**
		Sikap	,534**	,524**	1,000	,678**
		Status Sosial	,799**	,545**	,678**	1,000
	Sig. (2-tailed)	Partisipasi Masyarakat	,	,000	,000	,000
		Motivasi	,000	,	,000	,000
		Sikap	,000	,000	,	,000
		Status Sosial	,000	,000	,000	,
	N	Partisipasi Masyarakat	80	80	80	80
		Motivasi	80	80	80	80
		Sikap	80	80	80	80
		Status Sosial	80	80	80	80

** Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa :

1. Uji korelasi Kendall antara variabel partisipasi masyarakat dengan variabel motivasi masyarakat menghasilkan nilai koefisien korelasi kendall (τ) yaitu sebesar 0,492 dengan nilai P value 0,000. Karena nilai P value tersebut kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang nyata (signifikan) antara partisipasi masyarakat dengan variabel motivasi masyarakat adalah signifikan.
2. Uji korelasi Kendall antara variabel partisipasi masyarakat dengan variabel sikap masyarakat menghasilkan nilai koefisien korelasi kendall (τ) yaitu sebesar 0,534 dengan nilai P value 0,000. Karena nilai P value tersebut kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang nyata (signifikan) antara partisipasi masyarakat dengan variabel sikap masyarakat adalah signifikan.
3. Uji korelasi Kendall antara variabel partisipasi masyarakat dengan variabel status sosial menghasilkan nilai koefisien korelasi kendall (τ) yaitu sebesar 0,799 dengan nilai P value 0,000. Karena nilai P value tersebut kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang nyata (signifikan) antara partisipasi masyarakat dengan variabel status sosial adalah signifikan.

Uji Konkordasi Kendall

Test Statistics

N	80
Kendall's W ^a	,922
Chi-Square	221,301
df	3
Asymp. Sig.	,000

a. Kendall's Coefficient of
Concordance

Sedangkan pada uji konkordasi kendall antara variabel Sikap masyarakat, motivasi masyarakat, dan status sosial dengan variabel partisipasi masyarakat menghasilkan nilai konkordasi kendall sebesar 0,922. Dengan demikian maka pengaruh yang diberikan oleh variabel Sikap masyarakat, motivasi masyarakat, dan status sosial secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel partisipasi masyarakat adalah sebesar $(0,922)^2 \times 100\% = 85,01\%$.

Skor Menurut Nomor Responden					Ranking Urutan Wajar				
No. Resp.	X1	Rank	Y	Rank	No. Resp.	X1	Rank	Y	Rank
1	75	50,5	35	4,5	25	59	1,5	39	37,5
2	69	31,0	39	37,5	75	59	1,5	39	37,5
3	77	58,5	46	67,5	37	60	3,0	33	2,0
4	79	63,0	41	51,5	11	63	4,5	37	9,5
5	69	31,0	39	37,5	61	63	4,5	37	9,5
6	71	44,0	40	46,5	8	64	7,0	38	21,0
7	86	69,5	46	67,5	32	64	7,0	33	2,0
8	64	7,0	38	21,0	58	64	7,0	38	21,0
9	69	31,0	39	37,5	12	65	10,5	36	7,0
10	92	79,0	50	73,5	16	65	10,5	43	59,0
11	63	4,5	37	9,5	62	65	10,5	36	7,0
12	65	10,5	36	7,0	66	65	10,5	43	59,0
13	66	13,5	38	21,0	13	66	13,5	38	21,0
14	69	31,0	39	37,5	63	66	13,5	38	21,0
15	69	31,0	39	37,5	42	67	15,0	40	46,5
16	65	10,5	43	59,0	20	68	18,5	40	46,5
17	69	31,0	38	21,0	21	68	18,5	38	21,0
18	91	76,0	51	77,0	31	68	18,5	33	2,0
19	75	50,5	38	21,0	50	68	18,5	40	46,5
20	68	18,5	40	46,5	70	68	18,5	40	46,5
21	68	18,5	38	21,0	71	68	18,5	38	21,0
22	88	73,0	50	73,5	2	69	31,0	39	37,5
23	69	31,0	38	21,0	5	69	31,0	39	37,5
24	69	31,0	38	21,0	9	69	31,0	39	37,5
25	59	1,5	39	37,5	14	69	31,0	39	37,5
26	80	66,0	45	63,5	15	69	31,0	39	37,5
27	76	55,0	38	21,0	17	69	31,0	38	21,0
28	70	41,0	38	21,0	23	69	31,0	38	21,0
29	69	31,0	38	21,0	24	69	31,0	38	21,0
30	69	31,0	38	21,0	29	69	31,0	38	21,0
31	68	18,5	33	2,0	30	69	31,0	38	21,0
32	64	7,0	33	2,0	36	69	31,0	40	46,5
33	80	66,0	41	51,5	52	69	31,0	39	37,5
34	74	47,0	47	70,0	55	69	31,0	39	37,5
35	88	73,0	52	79,5	59	69	31,0	39	37,5
36	69	31,0	40	46,5	64	69	31,0	39	37,5
37	60	3,0	33	2,0	65	69	31,0	39	37,5
38	78	61,0	45	63,5	67	69	31,0	38	21,0
39	71	44,0	42	55,5	73	69	31,0	38	21,0
40	92	79,0	52	79,5	74	69	31,0	38	21,0
41	75	50,5	43	59,0	28	70	41,0	38	21,0
42	67	15,0	40	46,5	78	70	42,0	38	21,0
43	86	69,5	44	61,0	6	71	44,0	40	46,5
44	76	55,0	42	55,5	39	71	44,0	42	55,5

Skor Menurut Nomor Responden					Ranking Urutan Wajar				
No. Resp.	X1	Rank	Y	Rank	No. Resp.	X1	Rank	Y	Rank
45	86	69,5	42	55,5	56	71	44,0	41	51,5
46	77	58,5	45	63,5	48	73	46,0	36	7,0
47	77	58,5	42	55,5	34	74	47,0	47	70,0
48	73	46,0	36	7,0	1	75	50,5	35	4,5
49	79	63,0	49	71,0	19	75	50,5	38	21,0
50	68	18,5	40	46,5	41	75	50,5	43	59,0
51	75	50,5	35	4,5	51	75	50,5	35	4,5
52	69	31,0	39	37,5	69	75	50,5	38	21,0
53	77	58,5	46	67,5	80	75	50,5	38	21,0
54	79	63,0	41	51,5	27	76	55,0	38	21,0
55	69	31,0	39	37,5	44	76	55,0	42	55,5
56	71	44,0	41	51,5	77	76	55,0	38	21,0
57	86	69,5	46	67,5	3	77	58,5	46	67,5
58	64	7,0	38	21,0	46	77	58,5	45	63,5
59	69	31,0	39	37,5	47	77	58,5	42	55,5
60	92	79,0	50	73,5	53	77	58,5	46	67,5
61	63	4,5	37	9,5	38	78	61,0	45	63,5
62	65	10,5	36	7,0	4	79	63,0	41	51,5
63	66	13,5	38	21,0	49	79	63,0	49	71,0
64	69	31,0	39	37,5	54	79	63,0	41	51,5
65	69	31,0	39	37,5	26	80	66,0	45	63,5
66	65	10,5	43	59,0	33	80	66,0	41	51,5
67	69	31,0	38	21,0	76	80	66,0	45	63,5
68	91	76,0	51	77,0	7	86	69,5	46	67,5
69	75	50,5	38	21,0	43	86	69,5	44	61,0
70	68	18,5	40	46,5	45	86	69,5	42	55,5
71	68	18,5	38	21,0	57	86	69,5	46	67,5
72	88	73,0	50	73,5	22	88	73,0	50	73,5
73	69	31,0	38	21,0	35	88	73,0	52	79,5
74	69	31,0	38	21,0	72	88	73,0	50	73,5
75	59	1,5	39	37,5	18	91	76,0	51	77,0
76	80	66,0	45	63,5	68	91	76,0	51	77,0
77	76	55,0	38	21,0	79	91	76,0	51	77,0
78	70	42,0	38	21,0	10	92	79,0	50	73,5
79	91	76,0	51	77,0	40	92	79,0	52	79,5
80	75	50,5	38	21,0	60	92	79,0	50	73,5

PENGHITUNGAN STATISTIK
SECARA MANUAL PEMBUKTIAN HIPOTESIS
PENGARUH SIKAP DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Dari tabel daftar skor dan rangking variabel sikap dan variabel partisipasi masyarakat selanjutnya dihitung harga S, yaitu jumlah dari selisih antara ranking variabel tergantung yang telah diurutkan berdasarkan variabel bebas, yaitu antara ranking yang ada dengan ranking sebelah kanannya.

$$\begin{aligned}
 S = & (37-31)+(37-31)+(75-0)+(67-7)+(67-7)+(47-7)+(73-0)+(47-6) \\
 & (67-3)+(19-43)+(65-3)+(19-42)+(45-4)+(45-4)+(29-32)+(29-32) \\
 & (43-4)+(0-62)+(29-30)+(29-30)+(41-3)+(31-18)+(31-18)+(31-18) \\
 & (31-18)+(31-18)+(36-3)+(36-3)+(36-3)+(36-3)+(36-3)+(29-18) \\
 & (30-13)+(30-13)+(30-13)+(30-13)+(30-13)+(30-13)+(30-13)+ \\
 & (30-13)+(30-13)+(30-13)+(29-8)+(21-12)+(24-8)+(32-2)+ \\
 & (10-23)+(31-0)+(26-1)+(19-11)+(29-0)+(25-0)+(25-0)+(25-0)+ \\
 & (19-4)+(24-0)+(10-10)+(13-6)+(17-3)+(9-8)+(12-3)+(16-0)+ \\
 & (9-8)+(15-0)+(11-3)+(14-0)+(11-2)+(9-2)+(10-1)+(10-0)+ \\
 & (9-0)+(5-0)+(0-6)+(4-0)+(0-2)+(1-2)+(1-2)+(1-1)+(1-1)+ \\
 & (1-0) \\
 = & 1498
 \end{aligned}$$

$$TX1 = \frac{1}{2} \cdot t \cdot (t-1)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (2-1) + 2 \cdot (2-1) + 3 \cdot (3-1) + 4 \cdot (4-1) + 2 \cdot (2-1) + 6 \cdot (6-1) + 19 \cdot (19-1) +$$

$$3 \cdot (3-1) + 6 \cdot (6-1) + 3 \cdot (3-1) + 4 \cdot (4-1) + 3 \cdot (3-1) + 3 \cdot (3-1) + 4 \cdot (4-1) + 4 \cdot (4-1) +$$

$$3 \cdot (3-1) + 2 \cdot (2-1)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 548$$

$$= 274$$

$$Ty = \frac{1}{2} \cdot t \cdot (t-1)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot (12-1) + 2 \cdot (2-1) + 2 \cdot (2-1) + 21 \cdot (21-1) + 3 \cdot (3-1) + 2 \cdot (2-1) +$$

$$2 \cdot (2-1) + 6 \cdot (6-1) + 3 \cdot (3-1) + 3 \cdot (3-1) + 2 \cdot (2-1) + 4 \cdot (4-1) + 4 \cdot (4-1) +$$

$$4 \cdot (4-1) + 3 \cdot (3-1)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 700$$

$$= 350$$

$$N = 80$$

Langkah berikutnya adalah menghitung harga τ

$$\tau = \frac{S}{\sqrt{\frac{1}{2} N (N-1) - TX} \sqrt{\frac{1}{2} N (N-1) - TY S}}$$

$$\tau = \frac{1498}{\sqrt{\frac{1}{2} 80 (80-1) - 274} \sqrt{\frac{1}{2} 80 (80-1) - 350}}$$

$$\tau = 0,534$$

$$Z = \frac{\tau}{\sqrt{\frac{2(2N+5)}{9N(N-1)}}}$$

$$Z = \frac{0,534}{\sqrt{\frac{2(2 \cdot 80 + 5)}{9 \cdot 80(80-1)}}}$$

$$Z = 7,001$$

$$KD = (\tau)^2 \times 100 \%$$

$$= 0,534^2 \times 100 \%$$

$$= 28,51 \%$$

Skor Menurut Nomor Responden					Ranking Urutan Wajar				
No. Resp.	X2	Rank	Y	Rank	No. Resp.	X2	Rank	Y	Rank
1	39	20,5	35	4,5	25	31	1,5	39	37,5
2	41	35,0	39	37,5	75	31	1,5	39	37,5
3	40	27,0	46	67,5	11	32	4,0	37	9,5
4	45	60,0	41	51,5	31	32	4,0	33	2,0
5	39	20,5	39	37,5	61	32	4,0	37	9,5
6	42	44,5	40	46,5	8	35	8,0	38	21,0
7	46	63,5	46	67,5	37	35	8,0	33	2,0
8	35	8,0	38	21,0	42	35	8,0	40	46,5
9	38	14,0	39	37,5	50	35	8,0	40	46,5
10	56	79,0	50	73,5	58	35	8,0	38	21,0
11	32	4,0	37	9,5	36	36	11,0	40	46,5
12	39	20,5	36	7,0	9	38	14,0	39	37,5
13	41	35,0	38	21,0	29	38	14,0	38	21,0
14	41	35,0	39	37,5	48	38	14,0	36	7,0
15	40	27,0	39	37,5	51	38	14,0	35	4,5
16	50	71,5	43	59,0	59	38	14,0	39	37,5
17	42	44,5	38	21,0	1	39	20,5	35	4,5
18	50	71,5	51	77,0	5	39	20,5	39	37,5
19	41	35,0	38	21,0	12	39	20,5	36	7,0
20	43	52,5	40	46,5	24	39	20,5	38	21,0
21	43	52,5	38	21,0	55	39	20,5	39	37,5
22	50	71,5	50	73,5	62	39	20,5	36	7,0
23	43	52,5	38	21,0	74	39	20,5	38	21,0
24	39	20,5	38	21,0	78	39	20,5	38	21,0
25	31	1,5	39	37,5	3	40	27,0	46	67,5
26	40	27,0	45	63,5	15	40	27,0	39	37,5
27	41	35,0	38	21,0	26	40	27,0	45	63,5
28	43	52,5	38	21,0	65	40	27,0	39	37,5
29	38	14,0	38	21,0	76	40	27,0	45	63,5
30	42	44,5	38	21,0	2	41	35,0	39	37,5
31	32	4,0	33	2,0	13	41	35,0	38	21,0
32	42	44,5	33	2,0	14	41	35,0	39	37,5
33	42	44,5	41	51,5	19	41	35,0	38	21,0
34	45	60,0	47	70,0	27	41	35,0	38	21,0
35	54	76,5	52	79,5	52	41	35,0	39	37,5
36	36	11,0	40	46,5	53	41	35,0	46	67,5
37	35	8,0	33	2,0	56	41	35,0	41	51,5
38	49	67,0	45	63,5	63	41	35,0	38	21,0
39	42	44,5	42	55,5	64	41	35,0	39	37,5
40	56	79,0	52	79,5	69	41	35,0	38	21,0

Skor Menurut Nomor Responden					Ranking Urutan Wajar				
No. Resp.	X2	Rank	Y	Rank	No. Resp.	X2	Rank	Y	Rank
41	49	67,0	43	59,0	6	42	44,5	40	46,5
42	35	8,0	40	46,5	17	42	44,5	38	21,0
43	54	76,5	44	61,0	30	42	44,5	38	21,0
44	47	65,0	42	55,5	32	42	44,5	33	2,0
45	51	75,0	42	55,5	33	42	44,5	41	51,5
46	45	60,0	45	63,5	39	42	44,5	42	55,5
47	42	44,5	42	55,5	47	42	44,5	42	55,5
48	38	14,0	36	7,0	67	42	44,5	38	21,0
49	44	57,0	49	71,0	20	43	52,5	40	46,5
50	35	8,0	40	46,5	21	43	52,5	38	21,0
51	38	14,0	35	4,5	23	43	52,5	38	21,0
52	41	35,0	39	37,5	28	43	52,5	38	21,0
53	41	35,0	46	67,5	70	43	52,5	40	46,5
54	46	63,5	41	51,5	71	43	52,5	38	21,0
55	39	20,5	39	37,5	73	43	52,5	38	21,0
56	41	35,0	41	51,5	77	43	52,5	38	21,0
57	45	60,0	46	67,5	49	44	57,0	49	71,0
58	35	8,0	38	21,0	4	45	60,0	41	51,5
59	38	14,0	39	37,5	34	45	60,0	47	70,0
60	56	79,0	50	73,5	46	45	60,0	45	63,5
61	32	4,0	37	9,5	57	45	60,0	46	67,5
62	39	20,5	36	7,0	80	45	60,0	38	21,0
63	41	35,0	38	21,0	7	46	63,5	46	67,5
64	41	35,0	39	37,5	54	46	63,5	41	51,5
65	40	27,0	39	37,5	44	47	65,0	42	55,5
66	50	71,5	43	59,0	38	49	67,0	45	63,5
67	42	44,5	38	21,0	41	49	67,0	43	59,0
68	50	71,5	51	77,0	79	49	67,0	51	77,0
69	41	35,0	38	21,0	16	50	71,5	43	59,0
70	43	52,5	40	46,5	18	50	71,5	51	77,0
71	43	52,5	38	21,0	22	50	71,5	50	73,5
72	50	71,5	50	73,5	66	50	71,5	43	59,0
73	43	52,5	38	21,0	68	50	71,5	51	77,0
74	39	20,5	38	21,0	72	50	71,5	50	73,5
75	31	1,5	39	37,5	45	51	75,0	42	55,5
76	40	27,0	45	63,5	35	54	76,5	52	79,5
77	43	52,5	38	21,0	43	54	76,5	44	61,0
78	39	20,5	38	21,0	10	56	79,0	50	73,5
79	49	67,0	51	77,0	40	56	79,0	52	79,5
80	45	60,0	38	21,0	60	56	79,0	50	73,5

PENGHITUNGAN STATISTIK
SECARA MANUAL HIPOTESIS ADANYA
PENGARUH MOTIVASI DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Dari tabel Daftar Skor dan Rangking Variabel Motivasi dan Variabel Partisipasi Masyarakat selanjutnya dihitung harga S, yaitu jumlah dari selisih antara ranking variabel tergantung yang telah diurutkan berdasarkan variabel bebas, yaitu antara ranking yang ada dengan ranking sebelah kanannya.

$$\begin{aligned} S &= (37-31)+(37-31)+(68-8)+(75-0)+(68-7)+(47-7)+(72-0)+(30-36) \\ &\quad (30-6)+(46-6)+(30-35)+(34-25)+(46-6)+(61-3)+(63-1)+(34-22) \\ &\quad (61-1)+(34-21)+(59-2)+(43-2)+(34-19)+(57-1)+(42-1)+(42-1) \\ &\quad (11-41)+(33-16)+(14-36)+(32-16)+(14-35)+(31-16)+(36-1)+(31-15) \\ &\quad (35-1)+(35-1)+(31-13)+(11-31)+(23-17)+(32-1)+(29-12)+ \\ &\quad (31-1)+(26-11)+(28-1)+(28-1)+(36-0)+(23-10)+(19-12)+ \\ &\quad (19-12)+(22-0)+(23-7)+(25-0)+(25-0)+(25-0)+(23-4)+(23-0)+ \\ &\quad (23-0)+(23-0)+(9-14)+(20-1)+(9-12)+(11-7)+(9-8)+(18-0)+ \\ &\quad (9-8)+(16-0)+(15-0)+(9-5)+(10-1)+(0-6)+(9-1)+(2-7)+ \\ &\quad (3-3)+(7-1)+(2-5)+(2-2)+(5-0)+(0-3)+(3-0)+(1-0)+(0-1)+ \\ &\quad (0-0) \\ &= 1440 \end{aligned}$$

$$TX2 = \frac{1}{2} \cdot t \cdot (t-1)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot t \cdot (t-1)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (2-1) + 3(3-1) + 5(5-1) + 5(5-1) + 8(8-1) + 5(5-1) + 11(11-1) +$$

$$8(8-1) + 8(8-1) + 5(5-1) + 2(2-1) + 3(3-1) + 6(6-1) + 2(2-1) + 3(3-1)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 473$$

$$= 236,5$$

$$Ty = \frac{1}{2} \cdot t \cdot (t-1)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 12(12-1) + 2(2-1) + 3(3-1) + 21(21-1) + 6(6-1) + 3(3-1) +$$

$$2(2-1) + 3(3-1) + 4(4-1) + 3(3-1) + 3(3-1) + 3(3-1) + 4(4-1) +$$

$$3(3-1) + 2(2-1)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 703$$

$$= 351,5$$

$$N = 80$$

Langkah berikutnya adalah menghitung harga τ

$$\tau = \frac{S}{\sqrt{\frac{1}{2} N(N-1) - TX} \sqrt{\frac{1}{2} N(N-1) - TY S}}$$

$$\tau = \frac{1440}{\sqrt{\frac{1}{2} 80(80-1) - 236,5} \sqrt{\frac{1}{2} 80(80-1) - 351,5}}$$

$$\tau = 0,492$$

$$Z = \frac{\tau}{\sqrt{\frac{2(2N+5)}{9N(N-1)}}$$

$$Z = \frac{0,492}{\sqrt{\frac{2(2.80+5)}{9 \cdot 80(80-1)}}$$

$$Z = 6,45$$

$$\begin{aligned} KD &= (\tau)^2 \times 100 \% \\ &= 0,492^2 \times 100 \% \\ &= 24,20 \% \end{aligned}$$

Skor Menurut Nomor Responden					Ranking Urutan Wajar				
No. Resp.	X3	Rank	Y	Rank	No. Resp.	X3	Rank	Y	Rank
1	25	10,0	35	4,5	32	21	1,0	33	2,0
2	27	33,0	39	37,5	37	23	2,0	33	2,0
3	34	72,5	46	67,5	11	24	5,5	37	9,5
4	31	62,0	41	51,5	12	24	5,5	36	7,0
5	27	33,0	39	37,5	25	24	5,5	39	37,5
6	27	33,0	40	46,5	61	24	5,5	37	9,5
7	33	68,0	46	67,5	62	24	5,5	36	7,0
8	27	33,0	38	21,0	75	24	5,5	39	37,5
9	27	33,0	39	37,5	1	25	10,0	35	4,5
10	34	72,5	50	73,5	31	25	10,0	33	2,0
11	24	5,5	37	9,5	51	25	10,0	35	4,5
12	24	5,5	36	7,0	13	26	15,0	38	21,0
13	26	15,0	38	21,0	21	26	15,0	38	21,0
14	27	33,0	39	37,5	28	26	15,0	38	21,0
15	27	33,0	39	37,5	48	26	15,0	36	7,0
16	30	58,5	43	59,0	63	26	15,0	38	21,0
17	27	33,0	38	21,0	71	26	15,0	38	21,0
18	36	78,0	51	77,0	78	26	15,0	38	21,0
19	27	33,0	38	21,0	2	27	33,0	39	37,5
20	27	33,0	40	46,5	5	27	33,0	39	37,5
21	26	15,0	38	21,0	6	27	33,0	40	46,5
22	34	72,5	50	73,5	8	27	33,0	38	21,0
23	27	33,0	38	21,0	9	27	33,0	39	37,5
24	27	33,0	38	21,0	14	27	33,0	39	37,5
25	24	5,5	39	37,5	15	27	33,0	39	37,5
26	32	65,0	45	63,5	17	27	33,0	38	21,0
27	29	53,5	38	21,0	19	27	33,0	38	21,0
28	26	15,0	38	21,0	20	27	33,0	40	46,5
29	27	33,0	38	21,0	23	27	33,0	38	21,0
30	27	33,0	38	21,0	24	27	33,0	38	21,0
31	25	10,0	33	2,0	29	27	33,0	38	21,0
32	21	1,0	33	2,0	30	27	33,0	38	21,0
33	29	53,5	41	51,5	39	27	33,0	42	55,5
34	29	53,5	47	70,0	50	27	33,0	40	46,5
35	36	78,0	52	79,5	52	27	33,0	39	37,5
36	28	49,0	40	46,5	55	27	33,0	39	37,5
37	23	2,0	33	2,0	56	27	33,0	41	51,5
38	30	58,5	45	63,5	58	27	33,0	38	21,0
39	27	33,0	42	55,5	59	27	33,0	39	37,5
40	36	78,0	52	79,5	64	27	33,0	39	37,5

Skor Menurut Nomor Responden					Ranking Urutan Wajar				
No. Resp.	X3	Rank	Y	Rank	No. Resp.	X3	Rank	Y	Rank
41	29	53,5	43	59,0	65	27	33,0	39	37,5
42	28	49,0	40	46,5	67	27	33,0	38	21,0
43	33	68,0	44	61,0	69	27	33,0	38	21,0
44	30	58,5	42	55,5	70	27	33,0	40	46,5
45	29	53,5	42	55,5	73	27	33,0	38	21,0
46	31	62,0	45	63,5	74	27	33,0	38	21,0
47	28	49,0	42	55,5	80	27	33,0	38	21,0
48	26	15,0	36	7,0	36	28	49,0	40	46,5
49	32	65,0	49	71,0	42	28	49,0	40	46,5
50	27	33,0	40	46,5	47	28	49,0	42	55,5
51	25	10,0	35	4,5	27	29	53,5	38	21,0
52	27	33,0	39	37,5	33	29	53,5	41	51,5
53	34	72,5	46	67,5	34	29	53,5	47	70,0
54	31	62,0	41	51,5	41	29	53,5	43	59,0
55	27	33,0	39	37,5	45	29	53,5	42	55,5
56	27	33,0	41	51,5	77	29	53,5	38	21,0
57	33	68,0	46	67,5	16	30	58,5	43	59,0
58	27	33,0	38	21,0	38	30	58,5	45	63,5
59	27	33,0	39	37,5	44	30	58,5	42	55,5
60	34	72,5	50	73,5	66	30	58,5	43	59,0
61	24	5,5	37	9,5	4	31	62,0	41	51,5
62	24	5,5	36	7,0	46	31	62,0	45	63,5
63	26	15,0	38	21,0	54	31	62,0	41	51,5
64	27	33,0	39	37,5	26	32	65,0	45	63,5
65	27	33,0	39	37,5	49	32	65,0	49	71,0
66	30	58,5	43	59,0	76	32	65,0	45	63,5
67	27	33,0	38	21,0	7	33	68,0	46	67,5
68	36	78,0	51	77,0	43	33	68,0	44	61,0
69	27	33,0	38	21,0	57	33	68,0	46	67,5
70	27	33,0	40	46,5	3	34	72,5	46	67,5
71	26	15,0	38	21,0	10	34	72,5	50	73,5
72	34	72,5	50	73,5	22	34	72,5	50	73,5
73	27	33,0	38	21,0	53	34	72,5	46	67,5
74	27	33,0	38	21,0	60	34	72,5	50	73,5
75	24	5,5	39	37,5	72	34	72,5	50	73,5
76	32	65,0	45	63,5	18	36	78,0	51	77,0
77	29	53,5	38	21,0	35	36	78,0	52	79,5
78	26	15,0	38	21,0	40	36	78,0	52	79,5
79	36	78,0	51	77,0	68	36	78,0	51	77,0
80	27	33,0	38	21,0	79	36	78,0	51	77,0

**PENGHITUNGAN STATISTIK
SECARA MANUAL HIPOTESIS ADANYA
PENGARUH STATUS SOSIAL DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT**

Dari tabel Daftar Skor dan Rangking Variabel Status Sosial dan Variabel Partisipasi Masyarakat selanjutnya dihitung harga S, yaitu jumlah dari selisih antara ranking variabel tergantung yang telah diurutkan berdasarkan variabel bebas, yaitu antara ranking yang ada dengan ranking sebelah kanannya.

$$\begin{aligned}
 S = & (77-0)+(77-0)+(70-6)+(71-3)+(37-27)+(69-5)+(69-2)+(37-25) \\
 & (69-1)+(70-0)+(69-0)+(47-1)+(47-1)+(47-1)+(65-0)+(47-0) \\
 & (47-0)+(47-0)+(37-15)+(37-15)+(31-23)+(44-0)+(36-14)+(36-14) \\
 & (36-14)+(41-0)+(41-0)+(31-17)+(40-0)+(40-0)+(40-0)+(40-0)+ \\
 & (25-21)+ (30-13)+(33-8)+ (33-8)+ (25-14)+ (35-0)+ (32-7)+ \\
 & (32-7)+ + (32-7)+ (32-0)+(32-0)+ (29-5)+(31-0)+ (31-0)+ (31-0)+ \\
 & (29-2)+ (29-2)+ (25-5)+(28-0)+ (24-1)+ (10-17)+ (19-5)+ (23-3)+ (24- \\
 & 0)+ (19-3)+ (14-5)+ (21-2)+(17-2) (18-0)+ (14-2)+ (17-0)+ (14-1)+ (9-6)+ \\
 & (13-1)+ (9-1)+ (12-0)+ (9-0)+ (9-0)+ (5-1)+ (5-1)+ (7-0)+(5-0)+(5-0)+ (2- \\
 & 0)+ (0-2)+ (0-2)+ (0-0) + (0-0) \\
 = & 2177
 \end{aligned}$$

$$TX3 = \frac{1}{2}t(t-1)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 6(6-1) + 3(3-1) + 7(7-1) + 29(29-1) + 3(3-1) + 6(6-1) + 4(4-1) +$$

$$3(3-1) + 3(3-1) + 3(3-1) + 6(6-1) + 5(5-1)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 1072$$

$$= 536$$

$$Ty = \frac{1}{2} \cdot t(t-1)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 3(3-1) + 2(2-1) + 2(2-1) + 12(12-1) + 2(2-1) + 21(21-1) +$$

$$6(6-1) + 4(4-1) + 4(4-1) + 4(4-1) + 3(3-1) + 3(3-1) +$$

$$4(4-1) + 4(4-1) + 3(3-1) + 2(2-1)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 722$$

$$= 361$$

$$N = 80$$

Langkah berikutnya adalah menghitung harga τ

$$\tau = \frac{S}{\sqrt{\frac{1}{2}N(N-1) - TX} \sqrt{\frac{1}{2}N(N-1) - TY}}$$

$$\tau = \frac{2177}{\sqrt{\frac{1}{2}80(80-1) - 536} \sqrt{\frac{1}{2}80(80-1) - 361}}$$

$$\tau = 0,799$$

$$Z = \frac{\tau}{\sqrt{\frac{2(2N+5)}{9N(N-1)}}}$$

$$Z = \frac{0,799}{\sqrt{\frac{2(2.80+5)}{9 \cdot 80(80-1)}}}$$

$$Z = 10,48$$

$$\begin{aligned} KD &= (\tau)^2 \times 100 \% \\ &= 0,799^2 \times 100 \% \\ &= 63,84 \% \end{aligned}$$

No. Resp	Rank X1	Rank X2	Rank X3	Rank Y	Rj	(Rj - $\bar{R_j}$)	(Rj - $\bar{R_j}$) ²
1	50,5	20,5	10,0	4,5	85,50	-76,50	5.852,25
2	31,0	35,0	33,0	37,5	136,50	-25,50	650,25
3	58,5	27,0	72,5	67,5	225,50	63,50	4.032,25
4	63,0	60,0	62,0	51,5	236,50	74,50	5.550,25
5	31,0	20,5	33,0	37,5	122,00	-40,00	1.600,00
6	44,0	44,5	33,0	46,5	168,00	6,00	36,00
7	69,5	63,5	68,0	67,5	268,50	106,50	11.342,25
8	7,0	8,0	33,0	21,0	69,00	-93,00	8.649,00
9	31,0	14,0	33,0	37,5	115,50	-46,50	2.162,25
10	79,0	79,0	72,5	73,5	304,00	142,00	20.164,00
11	4,5	4,0	5,5	9,5	23,50	-138,50	19.182,25
12	10,5	20,5	5,5	7,0	43,50	-118,50	14.042,25
13	13,5	35,0	15,0	21,0	84,50	-77,50	6.006,25
14	31,0	35,0	33,0	37,5	136,50	-25,50	650,25
15	31,0	27,0	33,0	37,5	128,50	-33,50	1.122,25
16	10,5	71,5	58,5	59,0	199,50	37,50	1.406,25
17	31,0	44,5	33,0	21,0	129,50	-32,50	1.056,25
18	76,0	71,5	78,0	77,0	302,50	140,50	19.740,25
19	50,5	35,0	33,0	21,0	139,50	-22,50	506,25
20	18,5	52,5	33,0	46,5	150,50	-11,50	132,25
21	18,5	52,5	15,0	21,0	107,00	-55,00	3.025,00
22	73,0	71,5	72,5	73,5	290,50	128,50	16.512,25
23	31,0	52,5	33,0	21,0	137,50	-24,50	600,25
24	31,0	20,5	33,0	21,0	105,50	-56,50	3.192,25
25	1,5	1,5	5,5	37,5	46,00	-116,00	13.456,00
26	66,0	27,0	65,0	63,5	221,50	59,50	3.540,25
27	55,0	35,0	53,5	21,0	164,50	2,50	6,25
28	41,0	52,5	15,0	21,0	129,50	-32,50	1.056,25
29	31,0	14,0	33,0	21,0	99,00	-63,00	3.969,00
30	31,0	44,5	33,0	21,0	129,50	-32,50	1.056,25
31	18,5	4,0	10,0	2,0	34,50	-127,50	16.256,25
32	7,0	44,5	1,0	2,0	54,50	-107,50	11.556,25
33	66,0	44,5	53,5	51,5	215,50	53,50	2.862,25
34	47,0	60,0	53,5	70,0	230,50	68,50	4.692,25
35	73,0	76,5	78,0	79,5	307,00	145,00	21.025,00
36	31,0	11,0	49,0	46,5	137,50	-24,50	600,25
37	3,0	8,0	2,0	2,0	15,00	-147,00	21.609,00
38	61,0	67,0	58,5	63,5	250,00	88,00	7.744,00
39	44,0	44,5	33,0	55,5	177,00	15,00	225,00
40	79,0	79,0	78,0	79,5	315,50	153,50	23.562,25
41	50,5	67,0	53,5	59,0	230,00	68,00	4.624,00
42	15,0	8,0	49,0	46,5	118,50	-43,50	1.892,25
43	69,5	76,5	68,0	61,0	275,00	113,00	12.769,00
44	55,0	65,0	58,5	55,5	234,00	72,00	5.184,00

No. Resp	Rank X1	Rank X2	Rank X3	Rank Y	Rj	(Rj - \bar{Rj})	(Rj - \bar{Rj}) ²
45	69,5	75,0	53,5	55,5	253,50	91,50	8.372,25
46	58,5	60,0	62,0	63,5	244,00	82,00	6.724,00
47	58,5	44,5	49,0	55,5	207,50	45,50	2.070,25
48	46,0	14,0	15,0	7,0	82,00	-80,00	6.400,00
49	63,0	57,0	65,0	71,0	256,00	94,00	8.836,00
50	18,5	8,0	33,0	46,5	106,00	-56,00	3.136,00
51	50,5	14,0	10,0	4,5	79,00	-83,00	6.889,00
52	31,0	35,0	33,0	37,5	136,50	-25,50	650,25
53	58,5	35,0	72,5	67,5	233,50	71,50	5.112,25
54	63,0	63,5	62,0	51,5	240,00	78,00	6.084,00
55	31,0	20,5	33,0	37,5	122,00	-40,00	1.600,00
56	44,0	35,0	33,0	51,5	163,50	1,50	2,25
57	69,5	60,0	68,0	67,5	265,00	103,00	10.609,00
58	7,0	8,0	33,0	21,0	69,00	-93,00	8.649,00
59	31,0	14,0	33,0	37,5	115,50	-46,50	2.162,25
60	79,0	79,0	72,5	73,5	304,00	142,00	20.164,00
61	4,5	4,0	5,5	9,5	23,50	-138,50	19.182,25
62	10,5	20,5	5,5	7,0	43,50	-118,50	14.042,25
63	13,5	35,0	15,0	21,0	84,50	-77,50	6.006,25
64	31,0	35,0	33,0	37,5	136,50	-25,50	650,25
65	31,0	27,0	33,0	37,5	128,50	-33,50	1.122,25
66	10,5	71,5	58,5	59,0	199,50	37,50	1.406,25
67	31,0	44,5	33,0	21,0	129,50	-32,50	1.056,25
68	76,0	71,5	78,0	77,0	302,50	140,50	19.740,25
69	50,5	35,0	33,0	21,0	139,50	-22,50	506,25
70	18,5	52,5	33,0	46,5	150,50	-11,50	132,25
71	18,5	52,5	15,0	21,0	107,00	-55,00	3.025,00
72	73,0	71,5	72,5	73,5	290,50	128,50	16.512,25
73	31,0	52,5	33,0	21,0	137,50	-24,50	600,25
74	31,0	20,5	33,0	21,0	105,50	-56,50	3.192,25
75	1,5	1,5	5,5	37,5	46,00	-116,00	13.456,00
76	66,0	27,0	65,0	63,5	221,50	59,50	3.540,25
77	55,0	52,5	53,5	21,0	182,00	20,00	400,00
78	42,0	20,5	15,0	21,0	98,50	-63,50	4.032,25
79	76,0	67,0	78,0	77,0	298,00	136,00	18.496,00
80	50,5	60,0	33,0	21,0	164,50	2,50	6,25
					12.960,00		529.464,00

	X1	Rank	X2	Rank	X3	Rank	Y	Rank			X1	Rank	X2	Rank	X3	Rank	Y	Rank
1	59	1,5	31	1,5	21	1,0	33	2,0		41	70	41,0	42	44,5	27	33,0	39	37,5
2	59	1,5	31	1,5	23	2,0	33	2,0		42	70	42,0	42	44,5	27	33,0	39	37,5
3	60	3,0	32	4,0	24	5,5	33	2,0		43	71	44,0	42	44,5	27	33,0	39	37,5
4	63	4,5	32	4,0	24	5,5	35	4,5		44	71	44,0	42	44,5	27	33,0	40	46,5
5	63	4,5	32	4,0	24	5,5	35	4,5		45	71	44,0	42	44,5	27	33,0	40	46,5
6	64	7,0	35	8,0	24	5,5	36	7,0		46	73	46,0	42	44,5	27	33,0	40	46,5
7	64	7,0	35	8,0	24	5,5	36	7,0		47	74	47,0	42	44,5	27	33,0	40	46,5
8	64	7,0	35	8,0	24	5,5	36	7,0		48	75	50,5	42	44,5	28	49,0	40	46,5
9	65	10,5	35	8,0	25	10,0	37	9,5		49	75	50,5	43	52,5	28	49,0	40	46,5
10	65	10,5	35	8,0	25	10,0	37	9,5		50	75	50,5	43	52,5	28	49,0	41	51,5
11	65	10,5	36	11,0	25	10,0	38	21,0		51	75	50,5	43	52,5	29	53,5	41	51,5
12	65	10,5	38	14,0	26	15,0	38	21,0		52	75	50,5	43	52,5	29	53,5	41	51,5
13	66	13,5	38	14,0	26	15,0	38	21,0		53	75	50,5	43	52,5	29	53,5	41	51,5
14	66	13,5	38	14,0	26	15,0	38	21,0		54	76	55,0	43	52,5	29	53,5	42	55,5
15	67	15,0	38	14,0	26	15,0	38	21,0		55	76	55,0	43	52,5	29	53,5	42	55,5
16	68	18,5	38	14,0	26	15,0	38	21,0		56	76	55,0	43	52,5	29	53,5	42	55,5
17	68	18,5	39	20,5	26	15,0	38	21,0		57	77	58,5	44	57,0	30	58,5	42	55,5
18	68	18,5	39	20,5	26	15,0	38	21,0		58	77	58,5	45	60,0	30	58,5	43	59,0
19	68	18,5	39	20,5	27	33,0	38	21,0		59	77	58,5	45	60,0	30	58,5	43	59,0
20	68	18,5	39	20,5	27	33,0	38	21,0		60	77	58,5	45	60,0	30	58,5	43	59,0
21	68	18,5	39	20,5	27	33,0	38	21,0		61	78	61,0	45	60,0	31	62,0	44	61,0
22	69	31,0	39	20,5	27	33,0	38	21,0		62	79	63,0	45	60,0	31	62,0	45	63,5
23	69	31,0	39	20,5	27	33,0	38	21,0		63	79	63,0	46	63,5	31	62,0	45	63,5
24	69	31,0	39	20,5	27	33,0	38	21,0		64	79	63,0	46	63,5	32	65,0	45	63,5
25	69	31,0	40	27,0	27	33,0	38	21,0		65	80	66,0	47	65,0	32	65,0	45	63,5
26	69	31,0	40	27,0	27	33,0	38	21,0		66	80	66,0	49	67,0	32	65,0	46	67,5
27	69	31,0	40	27,0	27	33,0	38	21,0		67	80	66,0	49	67,0	33	68,0	46	67,5
28	69	31,0	40	27,0	27	33,0	38	21,0		68	86	69,5	49	67,0	33	68,0	46	67,5
29	69	31,0	40	27,0	27	33,0	38	21,0		69	86	69,5	50	71,5	33	68,0	46	67,5
30	69	31,0	41	35,0	27	33,0	38	21,0		70	86	69,5	50	71,5	34	72,5	47	70,0
31	69	31,0	41	35,0	27	33,0	38	21,0		71	86	69,5	50	71,5	34	72,5	49	71,0
32	69	31,0	41	35,0	27	33,0	39	37,5		72	88	73,0	50	71,5	34	72,5	50	73,5
33	69	31,0	41	35,0	27	33,0	39	37,5		73	88	73,0	50	71,5	34	72,5	50	73,5
34	69	31,0	41	35,0	27	33,0	39	37,5		74	88	73,0	50	71,5	34	72,5	50	73,5
35	69	31,0	41	35,0	27	33,0	39	37,5		75	91	76,0	51	75,0	34	72,5	50	73,5
36	69	31,0	41	35,0	27	33,0	39	37,5		76	91	76,0	54	76,5	36	78,0	51	77,0
37	69	31,0	41	35,0	27	33,0	39	37,5		77	91	76,0	54	76,5	36	78,0	51	77,0
38	69	31,0	41	35,0	27	33,0	39	37,5		78	92	79,0	56	79,0	36	78,0	51	77,0
39	69	31,0	41	35,0	27	33,0	39	37,5		79	92	79,0	56	79,0	36	78,0	52	79,5
40	69	31,0	41	35,0	27	33,0	39	37,5		80	92	79,0	56	79,0	36	78,0	52	79,5

**PEMBUKTIAN KEBENARAN ADANYA
PENGARUH SIKAP, MOTIVASI DAN STATUS SOSIAL DENGAN
PARTISIPASI MASYARAKAT**

PENGHITUNGAN SECARA MANUAL

Untuk mengetahui Hubungan variabel sikap, motivasi dan status sosial , dan variabel partisipasi masyarakat, sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu besarnya S dari ketiga variabel tersebut sebagaimana yang disajikan pada daftar hubungan variabel sikap, motivasi dan status sosial. Dari perhitungan diperoleh S sebesar 529.464,00 dan r_j sebesar 12.960,00.

Setelah mengetahui besarnya S, lalu dicari faktor korelasi ranking beragam sama pada X_1, X_2, X_3 dan Y.

$$\begin{aligned} TX1 &= 2(2-1) + 2(2-1) + 3(3-1) + 4(4-1) + 2(2-1) + 6(6-1) + 19(19-1) + 3(3-1) \\ &\quad + 6(6-1) + 3(3-1) + 4(4-1) + 3(3-1) + 3(3-1) + 4(4-1) + 3(3-1) + 2(2-1) \\ &\quad + 3(3-1) \\ &= 543 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} TX2 &= 2(2-1) + 2(2-1) + 5(5-1) + 5(5-1) + 8(8-1) + 5(5-1) + 11(11-1) + 8(8-1) \\ &\quad + 8(8-1) + 5(5-1) + 2(2-1) + 3(3-1) + 6(6-1) + 2(2-1) + 3(3-1) \\ &= 468 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} TX3 &= 6(6-1) + 3(3-1) + 7(7-1) + 29(29-1) + 3(3-1) + 6(6-1) + 4(4-1) + 3(3-1) \\ &\quad + 3(3-1) + 3(3-1) + 6(6-1) + 5(5-1) \\ &= 1072 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 TY &= 3(3-1) + 2(2-1) + 3(3-1) + 2(2-1) + 21(21-1) + 12(12-1) + 6(6-1) + 4 \\
 &\quad (4-1) + 4(4-1) + 3(3-1) + 4(4-1) + 4(4-1) + 4(4-1) + 3(3-1) + 2(2-1) \\
 &= 734
 \end{aligned}$$

kemudian didapat nilai T dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 T &= TX1 + TX2 + TX3 + TY \\
 &= 543 + 468 + 1072 + 734 \\
 &= 2817
 \end{aligned}$$

sehingga dapat diketahui :

$$S = 529.464$$

$$T = 2817$$

$$N = 80$$

$$K = 4 \text{ (Variabel)}$$

Dari data tersebut lalu dimasukkan ke dalam rumus Koefisien Konkordansi Kendall (W), sebagai berikut :

$$W = \frac{S}{\frac{1}{12} K^2 (N^3 - N) - K \cdot T}$$

$$\begin{aligned}
 &529.464 \\
 W &= \frac{529.464}{\frac{1}{12} \cdot 4^2 (80^3 - 80) - 4 \cdot 2817}
 \end{aligned}$$

$$W = 0,922$$

Untuk menguji signifikansi W, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}X^2 &= K (N-1) \cdot W \\&= 4 (80-1) 0,922 \\&= 291,35\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}KD &= (W)^2 \cdot 100 \% \\&= (0,922)^2 \cdot 100 \% \\&= 85,01 \%\end{aligned}$$

BLUE PRINT ANGKET

VARIABEL	INDIKATOR	ITEM NOMOR	JUMLAH
PARTISIPASI	<input type="checkbox"/> Tingkat pengetahuan masyarakat	1,2,3,4	4
	<input type="checkbox"/> Tingkat kesadaran masyarakat	5,6,7,8	4
	<input type="checkbox"/> Ketepatan waktu dalam membayar pajak	9,10	2
	<input type="checkbox"/> Tingkat pelanggaran perpajakan	11,12,13	3
SIKAP Komponen kognisi	<input type="checkbox"/> Pendapat masyarakat terhadap PBB	14,15,16,17,18	5
	<input type="checkbox"/> Pemahaman masyarakat terhadap pencapaian tujuan pemungutan PBB oleh pemerintah	19	1
	<input type="checkbox"/> Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pencapaian tujuan pemungutan PBB oleh pemerintah	20	1
	<input type="checkbox"/> Tingkat keyakinan kepastian hukum masyarakat tentang UU PBB	21	1
Komponen Afeksi	<input type="checkbox"/> Penerimaan masyarakat terhadap pembayaran PBB	22	1
	<input type="checkbox"/> Tingkat persetujuan masyarakat terhadap pembayaran PBB	23	1
	<input type="checkbox"/> Evaluasi atau penilaian masyarakat pada pembayaran PBB	24,25,26,27,28,29,30	7

Komponen Perilaku	<input type="checkbox"/> Tingkat keingintahuan masyarakat pada UU PBB	31,32,33	3
	<input type="checkbox"/> Tingkat usaha masyarakat dalam membayar PBB	34	1
	<input type="checkbox"/> Kecenderungan tindakan masyarakat terhadap pembayaran PBB	35,36	2
MOTIVASI	<input type="checkbox"/> Alasan masyarakat membayar PBB	37,38	2
	<input type="checkbox"/> Harapan masyarakat membayar PBB	39,41	2
	<input type="checkbox"/> Tingkat self assesment dari masyarakat (menghitung, memungut, dan menyector sendiri) PBBnya	40	1
	<input type="checkbox"/> Tingkat keaktifan serta pelayanan pemda setempat dalam menangani masalah PBB	42,43,44,45,46,47,48,49,50	9
STATUS SOSIAL	Jenis pekerjaan		
	<input type="checkbox"/> Pekerjaan tetap	51,52,53	3
	<input type="checkbox"/> Pekerjaan sampingan	54,55	2
	Besarnya pendapatan		
	<input type="checkbox"/> Besarnya pendapatan pokok	56,57	2
	<input type="checkbox"/> Besarnya pendapatan sampingan	58,59	2
	<input type="checkbox"/> Besarnya pengeluaran	60	1
	Tingkat pendidikan		
	<input type="checkbox"/> Pendidikan formal yang pernah diikuti masyarakat wajib pajak PBB	61	1
Jumlah			61

A. PENGANTAR.

Kepada yth : Bapak/ Ibu/ Saudara

Di tempat

Dengan Hormat,

Kami memohon dengan segala kerendahaan hati Bapak / Ibu / Saudara untuk berkenaan mengisi / menjawab pertanyaan dalam angket yang telah kami sediakan terlampir dalam daftar pertanyaan ini. Adapun daftar pertanyaan ini bertujuan untuk memperoleh data dalam penyusunan thesis peneliti yang mana thesis ini merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh peneliti sebagai mahasiswa program magister pada program pasca sarjana universitas Diponegoro Semarang program studi magister administrasi konsentrasi administrasi publik.

Untuk metode menjawab pertanyaan dalam angket ini, Silahkan Bapak / Ibu / Saudara membaca dan memahami setiap pernyataan di dalam angket ini, kemudian pilihlah salah satu jawaban yang paling cocok dan paling sesuai dengan diri Bapak / Ibu / Saudara, Jawablah dengan memberikan tanda silang (X) pada setiap jawaban yang Bapak / Ibu / Saudara pilih. Dalam hal ini, tidak ada jawaban yang salah dan benar. Bapak/ Ibu/ Saudara diharap menjawab semua pernyataan, jangan sampai ada yang terlewat

Akhirnya atas semua jawaban yang telah diberikan, kami sampaikan banyak-banyak terima kasih

Hormat kami

Peneliti



DAFTAR PERTANYAAN
PENGARUH SIKAP, MOTIVASI, STATUS SOSIAL
TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN PATI JAWA TENGAH

I. IDENTITAS RESPONDEN

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Umur :
- d. Agama :
- e. Alamat :

II. PARTISIPASI MASYARAKAT

- 1. Apakah bapak / Ibu / Saudara mengetahui tentang pajak bumi dan bangunan ?
 - a. sangat mengetahui
 - b. mengetahui
 - c. kurang mengetahui
 - d. tidak mengetahui
- 2. Apakah Bapak/ Ibu / Saudara mengetahui cara penibayaran PBB ?
 - a. Sangat mengetahui
 - b. Mengetahui
 - c. Kurang mengetahui
 - d. Tidak mengetahui

Alasan/Komentar :

.....

.....

.....

- 3. Bagaimana cara pembayaran PBB menurut Bapak / Ibu / Saudara ?
 - a. Sangat lancar
 - b. Cukup lancar
 - c. Kurang lancar
 - d. Tidak lancar

Alasan/Komentar :

.....

.....

.....

4. Bagaimana cara pembayaran PBB menurut Bapak / Ibu / Saudara, apakah Bapak / Ibu / Saudara mengalami kemudahan untuk memahami cara pembayarannya ?

- a. Sangat mudah dipahami
- b. Mudah dipahami
- c. Sulit dipahami
- d. Sangat sulit dipahami

Alasan/Komentar :

.....

.....

.....

5. Apakah Bapak / Ibu / Saudara selama ini sadar akan kewajiban anda sebagai warga negara, dan mematuhi peraturan pemerintah yang ada untuk membayar PBB ?

- a. Sangat sadar
- b. Sadar
- c. Kurang sadar
- d. Tidak sadar

Alasan/Komentar :

.....

.....

.....

6. Apakah Bapak / Ibu / Saudara dengan kerelaan hati mau mengeluarkan dana khusus untuk membayar PBB ?

- a. Sangat rela
- b. Relat
- c. Kurang rela
- d. Tidak rela

Alasan/Komentar :

.....

.....

.....

7. Apakah Bapak / Ibu / Saudara selalu bersedia untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Anda ?

- | | |
|--------------------|--------------------|
| a. sangat bersedia | c. kurang bersedia |
| b. bersedia | d. tidak bersedia |

Alasan/Komentar :

.....

.....

.....

8. Apakah Bapak / Ibu / Saudara selalu mentaati peraturan / undang-undang tentang PBB dan membayar pajak bumi dan bangunan anda ?

- | | |
|--------------------|--------------------|
| a. Sangat mentaati | c. Kurang mentaati |
| b. Mentaati | d. Tidak mentaati |

Alasan/Komentar :

.....

.....

.....

9. Apakah Bapak / Ibu / Saudara sering melakukan keterlambatan sesudah jatuh tanggal tempo dalam membayar PBB ?

- | | |
|------------------|------------------|
| a. Tidak pernah | c. Sering |
| b. Kadang-kadang | d. Sangat sering |

Alasan/Komentar :

.....

.....

10. Apakah Bapak / Ibu / Saudara selalu tepat waktu dalam membayar PBB sebelum tanggal jatuh tempo ?

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| a. Selalu tepat waktu | c. kadang-kadang tidak tepat waktu |
| b. Tepat waktu | d. selalu tidak tepat waktu |

Alasan/ Komentar :

.....

.....

11. Menurut Bapak / Ibu / Saudara, apakah Bapak / Ibu / Saudara sering melakukan pelanggaran dalam pembayaran PBB ?

- a. Tidak pernah
- b. Kadang - kadang
- c. Sering
- d. Sangat sering

Alasan/Komentar :

.....

.....

.....

12. Apakah Bapak / Ibu / Saudara pernah dikenai sanksi administrasi berupa denda administrasi ?

- a. Tidak pernah
- b. Kadang-kadang
- c. Sering
- d. Sering sekali

Alasan/Komentar :

.....

.....

.....

13. Apakah Bapak / Ibu / Saudara sering menunda dan selalu mempunyai tunggakan pembayaran PBB ?

- a. Tidak pernah
- b. Kadang - kadang
- c. Sering
- d. Sering sekali

Alasan/Komentar :

.....

.....

.....

III. SIKAP

a. Komponen Kognisi

14. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu / Saudara terhadap pemungutan PBB sekarang ini ?

- | | |
|----------------|----------------|
| a. Sangat baik | c. kurang baik |
| b. baik | d. tidak baik |

Alasan/Komentar :

.....

.....

.....

15. Bagaimana menurut Bapak/ Ibu / Saudara terhadap Prosedur atau cara pembayaran PBB yang selama ini di terapkan ?

- | | |
|------------------|------------------|
| a. Sangat setuju | c. Kurang setuju |
| b. Setuju | d. Tidak setuju |

Alasan/Komentar :

.....

.....

.....

16. Apakah Bapak / Ibu / Saudara merasakan kemudahan dalam memahami prosedur pelaksanaan pembayaran PBB ?

- | | |
|---------------------|---------------------|
| a. Sangat Merasakan | c. Kurang merasakan |
| b. Merasakan | d. Tidak merasakan |

Alasan/Komentar :

.....

.....

.....

17. Apakah Bapak / Ibu / Saudara selama ini setuju akan tata cara pemungutan PBB yang dilakukan oleh pemerintah ?

- | | |
|------------------|------------------|
| a. Sangat setuju | c. Kurang setuju |
| b. Setuju | d. Tidak setuju |

Alasan/Komentar :

.....

.....

.....

18. Apakah Bapak / Ibu / Saudara merasakan kemudahan dalam melaksanakan prosedur pelaksanaan pembayaran PBB oleh aparat setempat ?

- | | |
|---------------------|---------------------|
| a. Sangat merasakan | c. Kurang merasakan |
| b. Merasakan | d. Tidak merasakan |

Alasan/Komentar :

.....

.....

.....

19. Apakah Bapak / Ibu / Saudara selama ini paham akan tujuan atau pentingnya pemungutan PBB yang dilakukan oleh pemerintah ?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| a. Sangat paham | c. Kurang paham |
| b. Paham | d. Tidak paham |

Alasan/Komentar :

.....

.....

.....

20. Apakah Bapak / Ibu / Saudara, selama ini percaya atau yakin bahwa tujuan pemungutan PBB ini dapat tercapai ?

- a. Sangat percaya
- b. Percaya
- c. Kurang percaya
- d. Tidak percaya

Alasan/Komentar :

.....
.....
.....

21. Apakah Bapak / Ibu / Saudara yakin bahwa UU PBB yang ada sekarang ini, memberikan kepastian hukum ?

- a. Sangat yakin
- b. Yakin
- c. Kurang yakin
- d. Tidak yakin

Alasan/Komentar :

.....
.....
.....

b. Komponen afeksi

22. Apakah Bapak / Ibu / Saudara bisa menerima pembayaran PBB yang dikenakan pada Bapak / Ibu / Saudara ?

- a. Sangat bisa menerima
- b. Bisa menerima
- c. Kurang bisa menerima
- d. tidak menerima

Alasan/Komentar :

.....
.....
.....

23. Apakah Bapak / Ibu / Saudara setuju dengan tata cara pemungutan PBB yang dilakukan oleh pemerintah ?

- | | |
|------------------|------------------|
| a. Sangat setuju | c. Kurang setuju |
| b. Setuju | d. Tidak setuju |

Alasan/Komentar :

.....

.....

.....

24. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara merasakan keuntungan atas pemungutan PBB ?

- | | |
|---------------------|---------------------|
| a. Sangat merasakan | c. Kurang merasakan |
| b. Merasakan | d. tidak merasakan |

Alasan/Komentar :

.....

.....

.....

25. Apakah Bapak / Ibu / Saudara selama ini merasa puas dengan hasil pembangunan yang berasal dari pemungutan pajak ?

- | | |
|----------------|----------------|
| a. Sangat puas | c. Kurang puas |
| b. Puas | d. Tidak puas |

Alasan/Komentar :

.....

.....

.....

26. Apakah menurut Bapak / Ibu / Saudara, besarnya pemungutan PBB yang ada sekarang ini terasa memberatkan Bapak / Ibu / Saudara?

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| a. tidak memberatkan | c. memberatkan |
| b. cukup | d. sangat memberatkan |

Alasan/ Komentar :

.....

.....

27. Apakah Bapak / Ibu / Saudara, pemungutan PBB yang ada sekarang ini membuat beban kepada Bapak / Ibu / Saudara ?

- a. sangat tidak membebani
- b. tidak membebani
- c. membebani
- d. sangat membebani

Alasan/ Komentari :

.....

.....

28. Mengapa Bapak / ibu / saudara merasa keberatan?

- a. masih menanggung pajak lain
- b. penghasilan tidak memenuhi
- c. tidak mengerti kegunaan
- d. pelayanannya tidak baik

Alasan/komentari

.....

.....

.....

29. Mengapa Bapak / Ibu / Saudara tidak keberatan membayar PBB?

- a. Sudah menjadi kewajiban
- b. Ada manfaatnya
- c. prosedur lebih mudah
- d. pembayaran bisa ditunda

Alasan/komentari

.....

.....

.....

30. Bagaimanakah menurut Bapak / Ibu / Saudara, apakah pemungutan PBB sekarang ini mencerminkan keadilan ?

- a. Sangat Adil
- b. Adil
- c. Kurang adil
- d. Tidak adil

Alasan/ Komentari :

.....

.....

c. Komponen Perilaku

31. Apakah bapak / Ibu / Saudara ada keinginan untuk mengetahui tentang UU PBB ?

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. Sangat menginginkan | c. Kurang menginginkan |
| b. Menginginkan | d. Tidak menginginkan |

Alasan/komentar

.....

.....

.....

32. Apakah Bapak / Ibu / Saudara selalu berusaha untuk mengetahui informasi tentang tata cara perpajakan PBB ?

- | | |
|--------------------|--------------------|
| a. Sangat berusaha | c. Kurang berusaha |
| b. Berusaha | d. Tidak berusaha |

Alasan/Komentar :

.....

.....

.....

33. Dari mana atau dari siapakah Bapak / Ibu / Saudara mengetahui informasi tentang tata cara perpajakan PBB ?

- a. Dari diri sendiri dengan membaca buku atau artikel PBB
- b. Bertanya pada pihak terkait
- c. Penyuluhan dan pertemuan
- d. Lain – lain (sebutkan

34. Apakah Bapak / Ibu / Saudara selalu berusaha dalam membayar PBB anda ?

- | | |
|--------------------|--------------------|
| a. Sangat berusaha | c. Kurang Berusaha |
| b. Berusaha | d. Tidak berusaha |

Alasan/komentar

.....

.....

.....

35. Apakah Bapak / Ibu / Saudara menginginkan perubahan tata cara pembayaran PBB yang ada sekarang ini ?

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. sangat menginginkan | c. Kurang menginginkan |
| b. Menginginkan | d. Tidak menginginkan. |

Alasan/komentar

.....

.....

.....

36. apakah bapak / ibu / saudara selalu tepat dalam menghitung PBB anda ?

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| a. Selalu Tepat | c. Kurang tepat |
| b. Tepat | d. selalu tidak tepat |

Alasan/Komentar :

.....

.....

.....

IV. MOTIVASI

37. Apakah yang memotivasi bapak / Ibu / Saudara untuk berperan serta dalam membayar PBB ?

- a. sadar atas kemauan sendiri
- b. melaksanakan kewajiban dari peraturan pemerintah
- c. ikut-ikutan
- d. takut / terpaksa

Alasan/ Komentari :.....
.....
.....

38. Apakah yang mendorong atau membuat Bapak/ Ibu/ Saudara untuk selalu membayar atau melunasi PBB dengan tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo ?

- a. supaya tidak dikenakan denda 2 % sebulan
- b. merupakan sifat kegotongroyongan rakyat dalam membiayai pembangunan
- c. ikut-ikutan
- d. takut atau terpaksa

Alasan/ Komentari :.....
.....
.....

39. Menurut Bapak / Ibu / Saudara, apakah ada kebutuhan dan harapan dari Bapak/ Ibu/ Saudara membayar PBB ?

- a. Sangat ada sekali
- b. Ada
- c. tidak ada
- d. tidak ada sekali

Alasan/Komentari :.....
.....
.....

40. Apakah Bapak/Ibu/ Saudara selalu terdorong / berkeinginan untuk selalu menghitung, memungut dan menyetor sendiri PBB anda ?

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. Selalu menginginkan | c. Kurang menginginkan |
| b. Menginginkan | d. Tidak menginginkan |

Alasan/Komentar :

.....

.....

41. Apakah ada kebutuhan dan harapan dari Bapak / Ibu / Saudara menginginkan kemudahan pelayanan dalam pembayaran PBB ?

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. Sangat menginginkan | c. Kurang menginginkan |
| b. Menginginkan | d. Tidak menginginkan |

Alasan/Komentar :

.....

.....

42. Apakah Bapak / Ibu / Saudara, setiap akan membayar PBB sering menghadapi masalah ?

- | | |
|------------------|------------------|
| a. tidak pernah | c. Sering |
| b. kadang kadang | d. Sering sekali |

Alasan/Komentar :

.....

.....

43. Apakah permasalahan tersebut sering ditanggapi oleh petugas pajak ?

- | | |
|------------------|------------------|
| a. Sering sekali | c. Kadang-kadang |
| b. Sering | d. Tidak pernah |

Alasan/Komentar :

.....

.....

44. Apakah Bapak/Ibu/ Saudara jelas dalam menerima penjelasan yang diberikan petugas pajak tentang permasalahan yang dihadapi ?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| a. Sangat jelas | c. Kurang jelas |
| b. Jelas | d. Tidak jelas |

Alasan/Komentar :

.....

.....

45. Apakah pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah ?

- | | |
|------------------|------------------|
| a. Sesuai sekali | c. Kurang sesuai |
| b. Sesuai | d. Tidak sesuai |

Alasan/Komentar :

.....

.....

46. Dalam penarikan pajak / pembayaran pajak, bagaimana pelayanan yang diberikan oleh petugas ?

- | | |
|---------------------|---------------------|
| a. Sangat memuaskan | c. Kurang memuaskan |
| b. Memuaskan | d. Tidak memuaskan |

Alasan/Komentar :

.....

.....

47. Bagaimana menurut Bapak / Ibu / Saudara tentang keaktifan aparat setempat (Kelurahan / petugas PBB) dalam memberikan sanksi bagi pelanggar UU PBR ?

- | | |
|------------------|------------------|
| a. Sangat sering | c. Kadang-kadang |
| b. Sering | d. Tidak pernah |

Alasan/Komentar :

.....

.....

48. Menurut Bapak / Ibu / Saudara, apakah petugas atau aparat sering memberikan informasi atau penyuluhan kepada Bapak / Ibu / Saudara tentang tata cara pembayaran PBB ?

a. Sangat sering

c. Kadang- kadang

b. Sering

d. Tidak pernah

Alasan/Komentar :

.....

.....

49. Menurut Bapak / Ibu / Saudara, apakah petugas atau aparat sering memberikan informasi atau penyuluhan kepada Bapak / Ibu / Saudara tentang himbauan untuk membayar PBB ?

a. Sangat sering

c. Kadang- kadang

b. Sering

d. Tidak pernah

Alasan/Komentar :

.....

.....

50. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah petugas atau aparat sering memberikan informasi atau penyuluhan kepada Bapak/Ibu/ Saudara tentang kegunaan membayar PBB kepada Bapak/Ibu/ Saudara ?

a. Sangat sering

c. Kadang- kadang

b. Sering

d. Tidak pernah

Alasan/Komentar :

.....

.....

V. STATUS SOSIAL

51. Apakah Bapak / Ibu / Saudara atau dalam keluarga Bapak/Ibu/Saudara ada yang memiliki pekerjaan tetap ?
- a. ada
 - b. tidak ada
52. Jika ada, berapa jumlah anggota keluarga Bapak/Ibu/Saudara yang memiliki pekerjaan tetap ?
- a. lebih empat orang
 - b. tiga orang
 - c. dua orang
 - d. satu orang
53. Profesi / pekerjaan apa yang Bapak/Ibu/Saudara lakukan sekarang ini ?
- a. PNS/TNI/ karyawan Swasta
 - b. Wiraswasta
 - c. Pedagang
 - d. Buruh
54. Apakah dalam keluarga Bapak/ Ibu/ Saudara ada yang memiliki pekerjaan sampingan ?
- a. ada
 - b. tidak ada
- (jika jawaban tidak ada ke pertanyaan no. 56)
55. Jika ada, berapa jumlah anggota Bapak / Ibu / Saudara yang memiliki pekerjaan sampingan ?
- a. Lebih dari empat orang
 - b. Tiga orang
 - c. Dua orang
 - d. Satu orang
56. Berapa besar pendapatan pokok yang diperoleh Bapak/Ibu/ saudara dalam satu bulan ?
- a. Lebih dari Rp.400.000,00
 - b. Rp. 300.000,00 – Rp. 400.000,00
 - c. Rp. 225.000,00 –299.000,00
 - d. kurang dari Rp. 225.000,00
57. Apakah pendapatan pokok Bapak/Ibu/Saudara dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari ?
- a. Sangat mencukupi
 - b. Mencukupi
 - c. Kurang mencukupi
 - d. Tidak mencukupi

58. Berapa besar pendapatan sampingan yang diperoleh Bapak/Ibu/ saudara dalam satu bulan ?
- a. Lebih dari Rp.400.000,00
 - b. Rp. 300.000,00 – Rp. 400.000,00
 - c. Rp. 225.000,00 –299.000,00
 - d. kurang dari Rp. 225.000,00
59. Apakah pendapatan sampingan Bapak/Ibu/Saudara dapat membantu kebutuhan hidup sehari-hari keluarga ?
- a. Sangat membantu
 - b. Membantu
 - c. Kurang membantu
 - d. Tidak membantu
60. Berapakah besarnya pengeluaran keluarga Bapak/Ibu/Saudara dalam satu bulan ?
- a. Lebih dari Rp.400.000,00
 - b. Rp. 300.000,00 – Rp. 400.000,00
 - c. Rp. 225.000,00 –299.000,00
 - d. kurang dari Rp. 225.000,00
61. Pendidikan formal apa saja yang pernah diikuti oleh Bapak/ Ibu/Saudara ?
- a. Akademi / Perguruan Tinggi (Tamat/Tidak tamat)
 - b. SMA (Tamat/ Tidak Tamat)
 - c. SMP (Tamat/Tidak Tamat)
 - d. SD (Tamat/Tidak Tamat)

DAFTAR PUSTAKA

Ancok, Djamaludin, **Teknik Penyusunan Skala Pengukuran**, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1992

Arikunto, S, **Prosedur Penelitian**. PT Bina Aksara, Jakarta, 1998

A.T, Salamun, **Pajak, Citra dan Upaya Pembaharuannya**, PT Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1991

Azwar S, **Aspek – Aspek Perilaku**, Erlangga, Jakarta, 1988

———, **Reliabilitas dan Validitas**, Liberty , Yogyakarta, 1986

As'ad Moh, **Psikologi Industri**, Liberty Edisi Ke-empat, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 1995

C. Ewards III, George, **Implementing Public Policy**. Congressional Quarterly Press, Washinton, 1991

Crow L.D and Crow A, **Mental Hygiene**, 13 th Edition, Mc Graw Hill Book Co., N.Y, 1989

David, Keith, **Human Behavior at Work : Organizational Behavior**, Tata Mc. Graw-Hill Book Company Inc. New Delhi, 1985

Direktorat Jendral Pajak dan Yayasan Bina Pembangunan, **Buku Panduan Pajak Bumi dan Bangunan**, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1992

FORUM No.73, **Majalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**, Semarang, 1994

Gibson, Ivancevich, Donnely, **Organisasi dan Manajemen : Perilaku Struktur Proses**, Erlangga, Jakarta, 1989

Guilford, J.P 1973. **Fundamental Statistik Psychology**. Mc. GrawHill. New York

Gerungan WA., Dr, **Psikologi Sosial**, PT. Eresco, Bandung, 1983

Hadi, Sutrisno, **Statistik II**, Andi Offset, Yogyakarta, 1988

_____, **Metodologi Research I**, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1997

_____, **Metodologi Research II**, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1997

Hadisubroto, Subino, **Konsep Teknik Kontruksi Kuesioner, Penskalaan: Likert, Thurstone, Guttman, Osgood, Borgadus**, Fakultas Psikologi Universitas Islam, Bandung, 1988

Herbert, L. Petri, **Motivation, Theory and Research**, 1986, Mc Graww Hill, Kogakusha, Ltd. Tokyo

Indrajaya, Adam. I, **Perilaku Organisasi**, Sinar Baru, Bandung, 1989.

Kartasasmita, Ginandjar, **Administrasi Pembangunan Pemikiran dan praktiknya di Indonesia**. LP3ES, Jakarta, 1997

Khairuddin, H, **Pembangunan Masyarakat : Tinjauan Aspek Sosiologis, Ekonomi, dan Perencanaan**, Liberty, Yogyakarta, 1992

Koentjaraningrat, **Metode Penelitian Masyarakat**, Gramedia, Jakarta, 1977

Krech L. and Crutchfield R.S., **Theory and Problems Of Social Psychology**, Mc Graw Hill Book Co., Ins., N.Y. 1967

Larasati, Endang dan Hermiwati dan Suhardi, **Keuangan Negara Modul UT 1-9**, Departemen Pdan K, Jakarta, 1994

Lincoln, Arsyat, **Ekonomi Pembangunan**, Penerbit YKPN Cetakan ke-4, Yogyakarta, 1999

Manulang, Pengantar Ekonomi Perusahaan, Ghalia Indonesia, Medan, 1995

Maramis, W.F, Catatan ilmu kedokteran jiwa. Airlangga University Press, Surabaya, 1998

Mar'at, Sikap Manusia : Perubahan Serta Penyelesaiannya. Ghalia Indonesia, Jakarta

Mardiasno, Perpajakan Edisi II, Andi, Yogyakarta, 1994

Modul UT, Keuangan Negara, Penerbit Karunika Universitas Terbuka, Jakarta, 1986

Moeljarto, T, Politik Pembangunan : Sebuah Analisis Konsep, Arah, dan Strategi, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1994

Muller, J. Daniel, Mengukur Skala Sikap, diterjemahkan Oleh Eddy Soewardi Kartawidjaja, Bina Aksara, Jakarta, 1992

Muslim, Danny, Pendidikan Antar Sekolah Dan Peranannya, Jakarta, 1983

Perwodarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, UI, Jakarta, 1954

Rusli, Said, et. At., Metodologi Identifikasi Golongan dan Daerah Miskin, Suatu Tinjauan dan Alternatif, Grasindo, Jakarta, 1995

Robbins, Stephen. P, Teori Organisasi, Penerbit Arcan, Jakarta, 1994

Sastropoetro, Santosa, Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional, Alumni, Bandung, 1986

Siagian, Sondang P, Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional, Gunung Agung, Jakarta, 1984

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta, 1985

Siegel, Sidney, Statistik Nonparametrik Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Gramedia, Jakarta, 1985

Suryabrata, S, Metodologi Penelitian, CV. Rajawali, Jakarta, 1990

Sears, David O, Freedman Jonathan L, L. Anne Peplau, Psikologi Sosial, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1999

Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali, Jakarta, 1989

Soemitro, Rochmat, Pajak Penghasilan, Eresco, Bandung, 1986

Soesanto, Astrid S., Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, Bina Cipta, Bandung, 1977

Surbaki, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1992

Steers, Richard M, Efektifitas Organisasi, Erlangga, Jakarta, 1985

Svalastoga, Kaere, Diferensiasi Sosial, Bina Aksara, Jakarta, 1989

Syamsi, Ibnu, Ensiklopedi Administrasi, Gunung Agung, Jakarta, 1983

Taneko, Soleman B., Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan, Rajawali, Jakarta, 1983

Thoha, Haliti dan Purnomo, Hubungan kerja Majikan dan Buruh, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Tjokroamidjojo, Bintoro, Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 1974

Perencanaan Pembangunan, Haji Masagung, Jakarta, 1989

Vembrianto, S.T., Pendidikan Sosial, Paramita, Yogyakarta, 1981

Walgito, Bimo, **Psikologi Sosial**, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM,
Yogyakarta, 1998

Winardi, **Asas – Asas Manajemen**, Mandar Maju, Bandung, 1990

Zandjani, Tubagus Chairul Amachi, **Perpajakan**, PAU-EK-UI dan Gramedia,
Jakarta, 1992